

Prospek Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Israel



Prospek Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Israel

Penulis

Broto Wardoyo dan Diyauddin

Asisten Penulis

Rizal Valentino dan Kamila Rona Balqish

LABORATORIUM INDONESIA 2045

2023

Prospek Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Israel

©Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45)

Cetakan Pertama, Juni 2023

E-ISBN: 978-623-99095-9-8

Tim Penulis

Broto Wardoyo
Diyauddin

Asisten Penulis

Rizal Valentino
Kamila Rona Balqish

Penyelaras Akhir

Rinaldy

Desain Sampul dan Tata Letak

Fariz Abdurrahman
Rudi Yusuf

Untuk mengutip:

Wardoyo, Broto, et. al. 2023. "Prospek Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Israel". *LAB 45 Monograf*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

LAB 45 adalah pemegang tunggal hak cipta atas monograf ini. Seluruh isi dokumen ini adalah tanggung jawab LAB 45. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi monograf ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan.

Laboratorium Indonesia 2045

Jalan Mabas Hankam No. T65
Bambu Apus, Cilangkap
Jakarta Timur
+62811452045
lab45@lab45.id

Kata Pengantar

Selama berpuluh-puluh tahun, Timur Tengah selalu didera oleh kekacauan dan konflik yang diakibatkan oleh rivalitas, sektarianisme, dan kepentingan geopolitik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perkembangan regional menunjukkan adanya pergeseran dinamika yang signifikan. Salah satunya adalah penandatanganan Perjanjian Abraham (*Abraham Accords*) yang berhasil menormalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko, dan Sudan. Traktat tersebut merupakan terobosan diplomatik bersejarah di Abad XXI, dan mengundang optimisme bahwa negara-negara Timur Tengah lain akan mengikuti proses serupa.

Secara khusus, normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel adalah wacana yang paling menarik perhatian dunia internasional di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Yerusalem dalam beberapa waktu terakhir. Dinamika dalam relasi kedua negara itu akan sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan Palestina dan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam konteks tersebut, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) telah menyelesaikan sebuah monograf dengan tajuk "Prospek Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Israel".

Publikasi ini menghadirkan analisis mendalam mengenai perubahan yang signifikan dalam relasi antara Arab Saudi dan Israel. Tim penulis ini menganalisis latar belakang historis, faktor politik, dan dinamika sosial yang membentuk keputusan Riyadh untuk memulai langkah-langkah menuju normalisasi dengan Tel Aviv dan begitu pula sebaliknya. Normalisasi hubungan kedua negara akan menjadi peristiwa yang paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah di kawasan tersebut, jika terjadi suatu hari nanti. Monograf ini pun menyajikan proyeksi mengenai implikasi dari peresmian hubungan bilateral kedua negara terhadap perdamaian Israel-Palestina, serta posisi Indonesia ke depan.

Semoga publikasi ini dapat semakin memperkaya wawasan para pembacanya dan bermanfaat bagi komunitas epistemik kebijakan luar negeri Indonesia. Kami juga berharap monograf ini dapat mendorong lebih banyak penerbitan karya ilmiah tentang dinamika politik internasional di Timur Tengah dan proses perdamaian Palestina-Israel.

Jakarta, 26 Mei 2023

Iis Gindarsah

Kepala LAB 45

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Akronim dan Singkatan	iii
Daftar Bagan dan Tabel	v
Ringkasan Eksekutif	1
Pendahuluan	2
Bedah Literatur: Model Normalisasi Hubungan Diplomatik Negara-Negara Arab dengan Israel	6
Pola Normalisasi	8
Faktor Pendorong Normalisasi	12
Dampak Normalisasi	17
Data dan Metodologi	21
Proyeksi Normalisasi Hubungan Arab Saudi-Israel	23
Pola Normalisasi (+)	23
Pendorong Normalisasi	29
Dampak normalisasi (+)	48
Implikasi Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi-Israel terhadap Palestina dan Indonesia	50
Dampak bagi Palestina	50
Dampak bagi Indonesia	55
Saran Kebijakan Luar Negeri Indonesia	59

Daftar Akronim dan Singkatan

AIPAC	: <i>American Israel Public Affairs Committee</i>
API	: <i>Arab Peace Initiative atau Inisiatif Perdamaian Arab</i>
BRI	: <i>Belt and Road Initiative</i>
CNIA	: <i>Critical National Infrastructure Authority atau Otoritas Infrastruktur Kritis Nasional</i>
DK PBB	: <i>Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
DSR	: <i>Digital Silk Road</i>
FIFA	: <i>Fédération Internationale de Football Association atau Federasi Sepak Bola Internasional</i>
FPI	: <i>Front Pembela Islam</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Countries</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
HLJC	: <i>High Level Joint Committee</i>
HTI	: <i>Hizbut Tahrir Indonesia</i>
IAEA	: <i>International Atomic Energy Agency atau Badan Tenaga Atom Internasional</i>
IM	: <i>Ikhwanul Muslimin</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IRENA	: <i>International Renewable Energy Agency atau Badan Energi Terbarukan Internasional</i>
JCPOA	: <i>Joint Comprehensive Plan of Action atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama</i>
JIF	: <i>Joint Investment Fund</i>
JIP	: <i>Jihad Islam Palestina</i>
MBN	: <i>Mohammed bin Nayef</i>
MBS	: <i>Mohammed bin Salman</i>

<i>MU PBB</i>	<i>: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
<i>NPT</i>	<i>: Nuclear Non-Proliferation Treaty</i>
<i>OKI</i>	<i>: Organisasi Kerja Sama Islam</i>
<i>PA 212</i>	<i>: Presidium Alumni 212</i>
<i>PIF</i>	<i>: Public Investment Fund</i>
<i>PLO</i>	<i>: Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina</i>
<i>PSR atau PCPSR</i>	<i>: The Palestinian Center for Policy and Survey Research</i>
<i>SAMA</i>	<i>: Saudi Arabian Monetary Authority</i>
<i>SDM</i>	<i>: Sumber Daya Manusia</i>
<i>SIPRI</i>	<i>: Stockholm International Peace Research Institute atau Lembaga Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm</i>
<i>UEA</i>	<i>: Uni Emirat Arab</i>
<i>UKM</i>	<i>: Usaha Kecil Menengah</i>
<i>UMKM</i>	<i>: Usaha Mikro Kecil dan Menengah</i>
<i>UNESCO</i>	<i>: The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB</i>
<i>UNRWA</i>	<i>: The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near West</i>
<i>USD</i>	<i>: United States Dollar</i>
<i>UTJ</i>	<i>: United Torah Judaism</i>

Daftar Bagan dan Tabel

Bagan 1. Negara-Negara Arab Yang Mengakui Israel	7
Bagan 2. Kerangka Kerja	20
Bagan 3. Lini Masa Hubungan Israel-Arab Saudi	23
Bagan 4. Lokasi Instalasi Nuklir Iran	26
Bagan 5. Jangkauan Misil Iran	28
Bagan 6. Peta Politik Di Israel	32
Bagan 7. Komposisi Kabinet Netanyahu Dari 29 Desember 2022	33
Bagan 8. Perkembangan Pemukiman Yahudi Di Tepi Barat	35
Bagan 9. Lingkaran Kekuasaan MBS	38
Bagan 10. Lini Masa Hubungan Arab Saudi Dengan Cina	44
Bagan 11. Lini Masa Hubungan Iran Dengan Cina	46
Bagan 12. Dukungan Terhadap Palestina	51
Bagan 13. Pemetaan Kelompok Politik Palestina	55
Bagan 14. Peta Kelompok Pendukung Palestina Di Indonesia	58

Ringkasan Eksekutif

Normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel menjadi isu penting setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, dua negara satelit Arab Saudi, menandatangani Perjanjian Abraham (*Abraham Accords*). Kondisi hubungan Arab Saudi dan Israel memiliki kesamaan dengan UEA dan Israel dimana kedua negara Arab tersebut sama-sama memiliki hubungan baik, meski tidak formal, dengan Israel di berbagai bidang. Meski demikian, kondisi politik di Israel yang didominasi partai sayap kanan-religius tidaklah kondusif bagi upaya *rapproachment* Arab Saudi dan Israel. Fokus Israel sendiri juga lebih diarahkan pada isu-isu domestik di tengah instabilitas politik akibat sikap partai-partai sayap kanan. Di Arab Saudi sendiri, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) sudah mampu melakukan konsolidasi kekuasaan. Dia menekankan pada program reformasi Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 yang mengarah pada modernitas.

Pada level struktural, penurunan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah yang telah berlangsung beberapa waktu tidak sepenuhnya diisi oleh Cina. Pendekatan Cina di Timur Tengah yang mengarah pada sektor ekonomi tidak bertabrakan dengan fokus Amerika Serikat dalam bidang politik dan keamanan. Dampak dari peran Cina dalam mediasi hubungan Arab Saudi dan Iran membuat harga bagi *rapproachment* Arab Saudi dengan Israel, yang diinginkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menjadi lebih mahal. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel tetap terbuka lebar meski nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Langkah semacam itu tentu akan berdampak secara langsung bagi Palestina dan secara tidak langsung bagi Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu lebih serius mengamati perkembangan di Timur Tengah, terutama Palestina, hingga pada titik perlu memiliki individu atau tim yang ditugaskan secara khusus untuk membangun kebijakan terkait dengan perkembangan di Palestina dan Timur Tengah.

Pendahuluan

Sejak penandatanganan Perjanjian Abraham (*Abraham Accords*) tanggal 15 September 2020 antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, muncul pertanyaan mengenai negara Arab mana yang akan menyusul menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Sudan dan Maroko ternyata menjadi negara Arab berikutnya yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.¹ Oman juga dikabarkan akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, namun ternyata mereka membatalkan langkah tersebut dengan alasan lebih memilih kondisi status quo dalam hubungan mereka dengan Israel. Ada beberapa alasan pembatalan tersebut, seperti ketidakpuasan Oman terhadap kebijakan Israel dalam masalah pembangunan pemukiman Yahudi, penolakan publik Oman terhadap langkah normalisasi, dan juga Oman menunggu sikap Arab Saudi dalam keputusan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.² Negara Arab lain yang kemudian disebut-sebut akan menyusul UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko adalah Arab Saudi. Hal ini tidak terlepas dari pernyataan terbuka Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang secara terbuka menjadikan Arab Saudi sebagai target normalisasi selanjutnya karena menilai hal tersebut akan memperkuat posisi diplomatik Israel di kawasan Timur Tengah, terutama Dunia Arab, dan di Dunia Islam.³

Selain itu, Netanyahu juga percaya bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan Arab Saudi akan membawa dampak positif pada penyelesaian konflik Palestina-Israel.⁴ Arab Saudi dikenal sebagai pendukung beberapa kelompok perlawanan Palestina, seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina, yang memilih mengangkat senjata dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.⁵ Selain itu, Arab Saudi juga menjadi donor penting bagi Palestina⁶. Arab Saudi juga mendorong beberapa opsi perdamaian Palestina-Israel, salah satunya dengan mengusulkan Inisiatif Saudi (*Saudi Initiative*), yang merupakan proposal dari Putra Mahkota Abdullah, yang kemudian diadopsi oleh Liga Arab sebagai Inisiatif Perdamaian Arab (*Arab Peace Initiative* atau API). Inisiatif ini disepakati oleh Liga Arab tahun 2002 di Beirut dalam Pertemuan Liga Arab (*Arab Summit Conference*).

¹ UEA dan Bahrain menandatangani Perjanjian Abraham tanggal 15 September 2020. Sudan menyusul menandatangani kesepakatan tersebut tanggal 26 September 2020 dan Maroko tanggal 22 Desember 2020.

² Imad K. Harb, "Walking a Tightrope: Oman and Normalization with Israel," *Arab Center Washington DC*, 7 Maret 2023, <https://arabcenterdc.org/resource/walking-a-tightrope-oman-and-normalization-with-israel/>.

³ Elizabeth Hagedorn, "Israel's Netanyahu Seeks Saudi Ties, But Is Normalization Within Reach?," *Al Monitor*, 20 Januari 2023, <https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/israels-netanyahu-seeks-saudi-ties-normalization-within-reach#ixzz80FiACAHU>.

⁴ Tuqa Khalid, "Netanyahu Says Peace With Saudi Arabia Is Key To Ending Arab-Israeli Conflict," *Al Arabiya News*, 17 April 2023, <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/04/17/Netanyahu-says-peace-with-Saudi-Arabia-is-key-to-ending-Arab-Israeli-conflict>.

⁵ Adnan Abu Amer, "What Is behind the Saudi Campaign against Hamas?," *Al Jazeera*, 23 September 2019, <https://www.aljazeera.com/opinions/2019/9/23/what-is-behind-the-saudi-campaign-against-hamas>

⁶ "Saudi Arabia among top aid providers for Palestinians, nearly \$1 mln per day," *Al Arabiya English*, 15 Agustus 2020, <https://english.alarabiya.net/News/gulf/2020/08/15/Saudi-Arabia-remains-top-aid-provider-for-Palestinians-nearly-1-mln-per-day>.

Inisiatif ini diterima secara bulat oleh negara-negara anggota Liga Arab dan memberikan penekanan pada penyelesaian masalah Palestina-Israel secara utuh berdasarkan solusi dua negara dengan tanpa menggunakan kekerasan. Usulan penting dalam API meliputi pendirian negara Palestina berdaulat dalam batas 1967⁷ dan beribukota di Yerusalem Timur serta penyelesaian masalah pengungsi Palestina secara adil dengan imbalan normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara anggota Liga Arab dengan Israel secara utuh. Inisiatif ini diluncurkan kembali tahun 2007 dalam Pertemuan Liga Arab di Riyadh. Israel sendiri bersikap dingin terhadap usulan tersebut, salah satunya karena adanya kemungkinan gangguan terhadap integritas teritorial mereka.⁸

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir sendiri telah ada perbaikan hubungan antara Arab Saudi dengan Israel yang memungkinkan adanya normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara. Hubungan kedua negara dilakukan secara rahasia dan terbatas. Pertarungan politik Dunia Arab dan kebutuhan keamanan disebut sebagai dua alasan mengapa perbaikan hubungan tersebut bisa berlangsung, meski di permukaan keduanya tetap menunjukkan sikap berlawanan.⁹ Ancaman dari Iran disebut sebagai salah satu alasan utama perbaikan hubungan Arab Saudi dan Israel.¹⁰

Klaim Netanyahu mengenai sentralitas Arab Saudi sendiri tidak salah. Arab Saudi merupakan salah satu negara paling penting dalam politik di Dunia Islam. Hal tersebut karena lahir dan berkembangnya Islam bermula dari wilayah yang sekarang menjadi negara tersebut. Selain itu, penguasaan Arab Saudi atas Mekkah, kota suci bagi umat Islam, semakin menegaskan posisi penting mereka di Dunia Islam. Islam juga menjadi faktor penting dalam politik Arab Saudi.

Islam, dalam konteks Arab Saudi, dimobilisasi untuk melindungi negara.¹¹ Hubungan kemitraan antara negara/nasionalisme dengan Islam menjadi fitur penting dalam politik di Arab Saudi melebihi negara-negara lain yang juga berupaya mengintegrasikan Islam dalam bangunan nasionalisme mereka.¹² Alasan-alasan tersebut yang membuat Arab Saudi memiliki posisi penting di Dunia Islam.

Arab Saudi juga sering disebut sebagai pemimpin negara-negara Arab Teluk. Secara geografis, Arab Saudi merupakan negara terbesar di antara negara-negara Arab Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (*Gulf Cooperation Countries* atau GCC).¹³

⁷ Yang dimaksud dengan batas 1967 adalah batas de facto sebelum berlangsungnya Perang Enam Hari. Batas ini berbeda dengan batas yang ditentukan dalam Resolusi PBB mengenai partisi. Hingga saat ini, batas 1967 dijadikan sebagai rujukan dalam semua upaya penyelesaian damai Palestina-Israel. Berbagai kritik diberikan pada penggunaan batas 1967 sebagai rujukan penyelesaian konflik, salah satunya adalah Noura Erakat, "Taking the Land without the People: The 1967 Story as Told by the Law," *Journal of Palestine Studies* 47, no. 1 (2017): 18-38.

⁸ Alon Ben-Meir, "Israel and the Arab Peace Initiative," *American Foreign Policy Interests: The Journal of the National Committee on American Foreign Policy* 31, no. 3 (2009): 206-212.

⁹ Jacob Abadi, "Saudi Arabia's Rapprochement with Israel: The National Security Imperatives," *Middle Eastern Studies* 55, no. 3 (2013): 433-449.

¹⁰ Jonathan Rynhold dan Michal Yaari, "The Transformation of Saudi-Israeli Relations," *Israel Affairs* 26, no. 6 (2020): 799-818.

¹¹ Joseph Nevo, "Religion and National Identity in Saudi Arabia," *Middle Eastern Studies* 34, no. 3 (1998): 34-53.

¹² Ghassan Salamé, "Islam and Politics in Saudi Arabia," *Arab Studies Quarterly* 9, no. 3 (1987): 306-326.

¹³ Negara-negara anggota GCC adalah Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan UEA.

Sebagai sebuah blok ekonomi, kekuatan GCC tidak dapat begitu saja diremehkan. Keseluruhan negara anggota GCC merupakan negara produsen minyak. Cadangan minyak yang terverifikasi (*proven reserves*) dari seluruh negara GCC mencapai 34% dari keseluruhan cadangan minyak dunia.¹⁴ Laporan IMF bulan November 2022 mengindikasikan bahwa peningkatan harga migas akibat Perang Ukraina akan memberikan keuntungan besar pada GCC yang dapat mendorong mereka untuk pulih lebih cepat dari dampak pandemi Covid-19.¹⁵ Pada akhirnya, hal tersebut akan menambah signifikansi GCC, dengan Arab Saudi sebagai motor utamanya, terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Tengah.

Selain melalui GCC, posisi Arab Saudi sebagai negara kunci di Timur Tengah juga datang dari kekuatan ekonomi yang mereka miliki. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa Arab Saudi berkontribusi 22% dari Produk Domestik Bruto (PDB) seluruh negara Timur Tengah.¹⁶ Hal tersebut memperlihatkan betapa besar kontribusi Arab Saudi bagi perekonomian Timur Tengah. Selain secara ekonomi, Arab Saudi juga memiliki kapasitas politik yang memadai di Timur Tengah. Kapasitas ekonomi Arab Saudi membuat negara tersebut mampu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pertahanannya. SIPRI mencatat bahwa Arab Saudi mengalokasikan 7,4% dari PDB mereka untuk pertahanan.¹⁷ Persentase tersebut melebihi negara-negara lain dan hanya kalah dari Ukraina yang saat ini sedang dalam kondisi perang.

Dalam konteks politik kawasan Timur Tengah, Arab Saudi, bersama-sama dengan Israel dan Iran, merupakan negara-negara utama di kawasan yang menentukan stabilitas atau instabilitas kawasan. Hubungan antara ketiga negara tersebut dibangun berdasarkan adanya kesamaan persepsi ancaman. Walt menjelaskan bahwa negara yang menghadapi ancaman akan bergabung dengan negara yang lain untuk menetralkan ancaman tersebut.¹⁸ Di kawasan Timur Tengah, persepsi ketiga negara utama tersebut mengenai kekuatan mana yang paling mengancam bagi keamanannya akan mendorong negara tersebut untuk membangun aliansi dengan negara utama lain yang memiliki persepsi ancaman yang sama. Mudah-mudahan, manakala Arab Saudi merasa bahwa ancaman utamanya datang dari Iran, maka mereka akan lebih mudah membangun aliansi atau kerja sama dengan Israel untuk menghadapi Iran. Dalam logika ini, pertanyaan yang kemudian perlu dijawab adalah bagaimana persepsi ancaman mereka terbentuk.

Persepsi ancaman oleh Walt dijelaskan dibentuk oleh empat hal, yaitu: kekuatan agregat yang dimiliki suatu negara, jarak atau kedekatan, kekuatan ofensif yang dimiliki suatu negara, dan intensi agresif suatu negara.¹⁹ Namun, dalam konteks Timur Tengah,

¹⁴ Majed Al Suwailem dan Abdullah Aldayel, "Crude Oil Reserves Metrics of GCC Members," *KAPSARC Data Insight*, 16 April 2020, <https://www.kapsarc.org/research/publications/crude-oil-reserves-metrics-of-gcc-members/>.

¹⁵ International Monetary Fund, *Economic Prospect and Challenges for the GCC Countries—2022*, *Policy Paper* no. 52, 29 November 2022, <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2022/11/29/Gulf-Cooperation-Council-Economic-Prospects-and-Policy-Challenges-for-the-GCC-Countries-525945>.

¹⁶ Arab Saudi berkontribusi 30% dari keseluruhan GDP Dunia Arab.

¹⁷ "Saudi military expenditure fifth-highest in the world in 2022: Report," *Al Arabiya English*, 25 April 2023, <https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2023/04/25/Saudi-military-expenditure-fifth-highest-in-the-world-in-2022-Report>

¹⁸ Stephen M. Walt, *The Origin of Alliance* (New York: Cornell University Press, 1987), 32.

¹⁹ Walt, *The Origin of Alliance*, 32.

hal-hal yang sifatnya non-materialistik, seperti hubungan sosial politik dan ideologis²⁰ atau ancaman politik yang bersumber pada stabilitas domestik²¹, juga memainkan peran penting dalam merumuskan persepsi ancaman. Faktor hubungan sosial politik tersebut nampak, misalnya, dalam aliansi Iran-Suriah, Arab Saudi- UEA, dan Turki-Qatar di Timur Tengah pasca Musim Semi Arab dan faktor ideologi serta politik domestik nampak dalam perilaku Yordan, Suriah, dan Arab Saudi selama periode 1971-1991.²²

Dalam logika persepsi ancaman seperti yang dijelaskan oleh Walt tersebut, rumus utama perilaku ketiga negara utama kawasan tersebut adalah mana diantara dua negara utama lain yang lebih membawa ancaman. Pola aliansi diantara ketiga negara tersebut akan ditentukan oleh kesamaan persepsi ancaman. Dalam konstelasi politik kawasan pasca tahun 1979, misalnya, bagi Arab Saudi akan lebih mudah mengidentifikasi Iran, dan bukan Israel, sebagai ancaman utama. Hal tersebut terkait dengan kedekatan geografis dan aliansi ideologis.

Namun, apakah hal tersebut bisa menjelaskan perbaikan hubungan antara Arab Saudi dan Israel yang berlangsung dengan cepat sejak tahun 2005. Jika Iran yang menjadi penyebab perbaikan hubungan tersebut, apakah dengan adanya normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran tanggal 10 Maret 2023 akan membawa dampak pada memburuknya hubungan Arab Saudi dan Israel. Atau sebaliknya, hubungan antara Arab Saudi dan Israel tidak sebatas dibangun oleh persepsi ancaman terhadap Iran sehingga kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik keduanya tetap terbuka. Pertanyaan mengenai faktor-faktor apa yang mendorong perbaikan hubungan Arab Saudi dan Israel tersebut memunculkan spekulasi akan adanya normalisasi hubungan kedua negara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Monograf ini menjawab pertanyaan: bagaimana prospek normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel serta apa dampak dari normalisasi tersebut bagi Palestina dan bagi Indonesia. Secara lebih detil, pertanyaan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa sub-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Israel?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Israel?
3. Bagaimana dan sejauh mana faktor-faktor tersebut menentukan proyeksi normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Israel?
4. Apa dampak dari proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Israel bagi kemerdekaan Palestina?
5. Apa dampak dari proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Israel bagi Indonesia?

²⁰ Mustafa Yetim dan İsmail Numan Telci, "Another "Third Way" to Narrate the Existing Alliances in the Middle East: Turkey-Qatar, Saudi Arabia-UAE, and Iran-Syria," *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 25, no. 3 (2023): 484-505.

²¹ F. Gregory Gause III, "Balancing What? Threat Perception and Alliance Choice in the Gulf," *Security Studies* 13, no. 2 (2003): 273-305.

²² Yetim dan Telci, "Another "Third Way" to Narrate the Existing Alliances in the Middle East," 484-505.

Bedah Literatur: Model Normalisasi Hubungan Diplomatik Negara-Negara Arab dengan Israel

Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, kajian literatur ini meninjau literatur-literatur terdahulu yang membahas normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Israel. Tujuan akhir dari kajian literatur ini adalah untuk membangun model normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Arab dengan Israel yang kemudian digunakan untuk memproyeksikan normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel. Dalam kebutuhan membangun model tersebut, kajian literatur ini memetakan pola, faktor-faktor pendorong, dan dampak normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Israel.

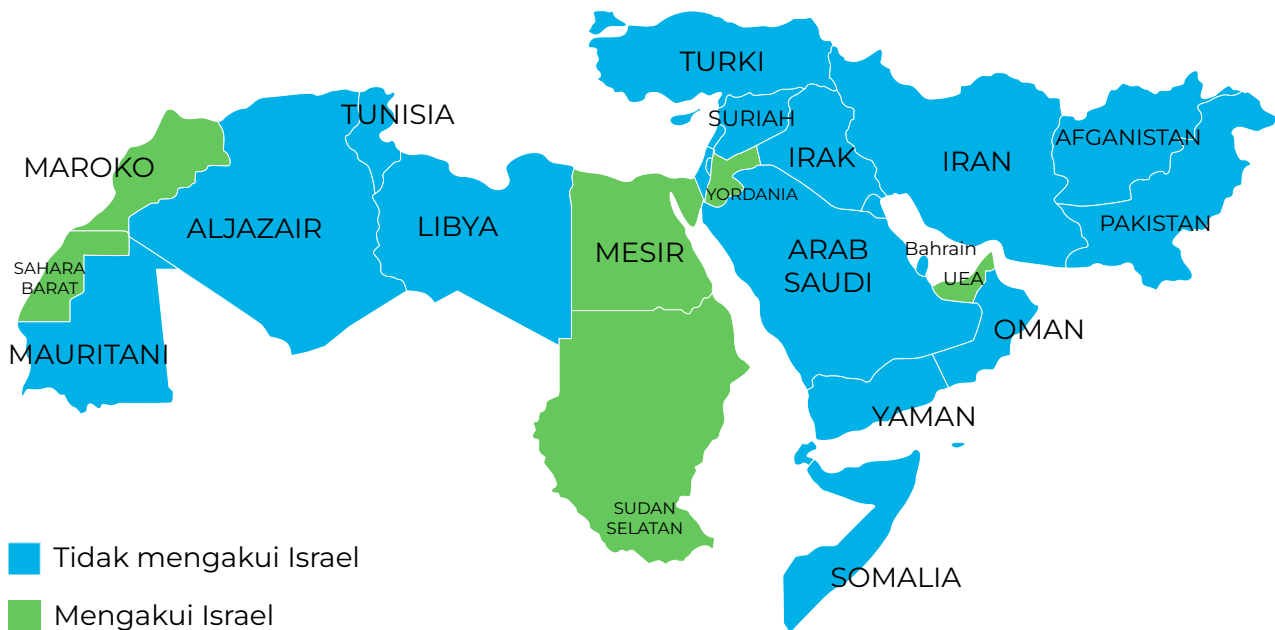
Dalam sejarah hubungan negara-negara Arab dengan Israel sendiri telah ada enam negara Arab yang mengakui kedaulatan dan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu: Mesir, Yordania, UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Selain negara-negara tersebut, Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization atau PLO) juga mengakui Israel berdasarkan Perjanjian Oslo tahun 1993.²³ Dari beberapa negara tersebut, keputusan tiga negara Arab (Mesir, Yordania, dan UEA) akan dipelajari untuk memahami pola normalisasi hubungan diplomatik yang mereka lakukan dan faktor-faktor pendorong serta dampak dari normalisasi hubungan diplomatik tersebut. Tiga kesepakatan yang ditandatangani ketiga negara tersebut adalah Perjanjian Camp David (1978)²⁴, Perjanjian Wadi Araba (1994), dan Perjanjian Abraham (2020). Perjanjian Oslo dikecualikan dari kajian literatur ini mengingat sifatnya yang khusus dimana hubungan merekalah (konflik Palestina-Israel) yang mendasari permusuhan antara negara-negara Arab dengan Israel²⁵. Artinya, semua negara Arab pada dasarnya menggunakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai dasar bagi mereka untuk tidak melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Arab Saudi, sama seperti negara-negara Arab lain, juga menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan normalisasi hubungan diplomatik karena menunggu kemerdekaan Palestina.

²³ Perjanjian Oslo adalah istilah yang dipakai untuk merujuk pada Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements atau disingkat sebagai Declaration of Principles. Perjanjian ini ditandatangani di Washington, DC. Tanggal 13 September 1993. Meski demikian, pembicaraan yang menghasilkan perjanjian ini dilakukan di Oslo pada bulan Agustus tahun yang sama. Perjanjian ini menjadi dasar bagi proses perdamaian Palestina-Israel yang kemudian dikenal sebagai Proses Oslo. Isi perjanjian ini sendiri mengatur pembentukan Otoritas Palestina yang merupakan lembaga pemerintahan mandiri Palestina, penarikan mundur Israel dari wilayah-wilayah yang disepakati bersama, dan beberapa kerja sama lain antara kedua pihak. PLO menjadi pihak yang mewakili Palestina dalam perjanjian ini.

²⁴ Perjanjian Camp David sendiri sebenarnya bukan kesepakatan damai antara Mesir dengan Israel namun perjanjian ini menjadi dasar bagi kesepakatan damai kedua negara. Kesepakatan damai Mesir dan Israel ditandatangani setelah Perjanjian Camp David disepakati.

²⁵ Hal ini tidak berarti Perjanjian Oslo tidak memiliki signifikansi yang tinggi mengingat tanpa adanya kesepakatan ini maka Perjanjian Wadi Araba tidak akan pernah bisa ditandatangani. Keputusan Yordania menandatangani Perjanjian Wadi Araba salah satunya dipengaruhi oleh keputusan PLO untuk menandatangani Perjanjian Oslo setahun sebelumnya.

Bagan 1. Negara-Negara Arab Yang Mengakui Israel



Perjanjian Camp David adalah kesepakatan antara Mesir dan Israel, diwakili oleh Presiden Anwar Sadat dan Perdana Menteri Menachem Begin, yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan ditandatangani tanggal 17 September 1978. Perjanjian tersebut memiliki dua bagian besar, yaitu Kerangka Kerja Perdamaian Timur Tengah dan Kerangka Kerja Perdamaian Mesir-Israel.²⁶ Kerangka kedua inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan damai antara Mesir dan Israel tanggal 26 Maret 1979 dan menandai normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Sementara itu, Perjanjian Wadi Araba, atau dikenal juga sebagai Perjanjian Damai Israel-Yordania, merupakan kesepakatan yang ditandatangani tanggal 26 Oktober 1994 oleh Raja Hussein dari Yordania dan Perdana Menteri Yitzhak Rabin dari Israel yang juga dimediasi oleh Amerika Serikat. Perjanjian tersebut mengakhiri status perang antara kedua negara dan menandai dimulainya hubungan diplomatik Yordania dan Israel.²⁷ Di dalam perjanjian ini diatur juga mengenai pembagian sumber daya air, kerja sama keamanan, dan kesepakatan perbatasan, termasuk mengatur pembentukan komisi perbatasan untuk menetapkan batasan kedua negara.

Terakhir, Perjanjian Abraham merupakan kesepakatan antara Israel dan beberapa negara Arab, seperti UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan, yang ditujukan untuk menormalisasi hubungan diplomatik, ekonomi, dan budaya antara negara-negara yang terlibat, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.²⁸ Perjanjian ini, sama seperti dua perjanjian lain, juga difasilitasi oleh Amerika Serikat. Perjanjian Abraham dianggap sebagai terobosan karena perjanjian ini seakan-akan merevisi apa yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Liga Arab dalam API. Dalam API dijelaskan secara tegas bahwa mekanisme normalisasi hubungan diplomatik

²⁶ *Camp David Accords*, dirilis oleh *Institute of Strategic Studies Islamabad* (1993).

²⁷ *Israel-Jordan: Treaty of Peace*, dirilis oleh *Cambridge University Press* (Januari 1995).

²⁸ *Abraham Accords Peace Agreement*, dirilis oleh *Department of State United States of America*, diakses melalui https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/UAE_Israel-treaty-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf.

antara negara-negara anggota Liga Arab dengan Israel hanya akan dilakukan apabila Israel telah memenuhi tiga syarat, yakni: telah menarik diri dari wilayah Palestina yang dikuasai pasca Perang Enam Hari tahun 1967, telah memberikan solusi bagi pengungsi Palestina sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) nomor 194, dan telah mengakui kedaulatan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Saat Perjanjian Abraham ditandatangani, Israel belum memenuhi satu pun dari tiga syarat tersebut.

Dalam bagian selanjutnya dibahas mengenai pola normalisasi hubungan diplomatik antara Mesir, Yordania, dan UEA dengan Israel. Kemudian, akan dipetakan juga faktor-faktor pendorong normalisasi hubungan diplomatik dan selanjutnya dibahas mengenai dampak dari normalisasi hubungan diplomatik.

Pola Normalisasi

Perjanjian Camp David, Perjanjian Wadi Araba, dan Perjanjian Abraham merupakan hasil atau kulminasi dari sebuah rangkaian peristiwa (proses) panjang. Di dalam proses tersebut, ada upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mendekatkan negara-negara penandatangan dimana, dalam keseluruhan kasus, peran pihak ketiga tersebut dijalankan oleh Amerika Serikat. Selain itu, tidak ada hambatan yang relatif besar yang datang dari negara-negara besar (great powers) lain yang menentang upaya mediasi tersebut.

Akar dari kesepakatan pertama, Perjanjian Camp David, bermula dari tahun 1973 ketika terjadi Perang Yom Kippur yang melibatkan negara-negara Arab dan Israel. Dalam perang tersebut, Mesir dan Suriah meluncurkan serangan gabungan ke wilayah Israel. Mesir menyerang melalui Kanal Suez dan Suriah menyerang melalui Dataran Tinggi Golan. Israel berhasil memukul mundur kedua serangan tersebut dan bahkan melancarkan serangan balik untuk memperluas wilayah penguasaan mereka di Semenanjung Sinai yang sebelumnya dimiliki Mesir dan merebut Dataran Tinggi Golan dari tangan Suriah. DK PBB akhirnya mengadopsi resolusi nomor 338 untuk mengakhiri peperangan tersebut.

Pasca Perang Yom Kippur, Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, melakukan serangkaian upaya diplomasi untuk mencegah kembalinya konflik. Upaya diplomasi Kissinger tersebut dilakukan dengan melakukan negosiasi secara langsung pada pemimpin negara-negara Arab serta Israel. Kissinger berkunjung ke Kairo, Yerusalem, Damaskus, dan Amman untuk membangun kepercayaan negara-negara Arab bahwa Amerika Serikat memiliki niat yang serius untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Dari negara-negara Arab tersebut, hanya Sadat yang memperlihatkan ketertarikan untuk bernegosiasi dengan Israel. Hafez al-Assad, Presiden Suriah, tidak memiliki ketertarikan untuk berdamai dengan Israel sedangkan Raja Hussein juga tidak tertarik untuk berdamai dengan Israel meski dia mendukung keputusan Mesir.

Sadat sendiri menjadi Presiden Mesir untuk menggantikan Gamal Abdel Nasser. Jika dibandingkan dengan Nasser, Sadat lebih pragmatis dan tidak terlalu mengedepankan ideologi pan-Arabisme²⁹ serta lebih menomorsatukan kepentingan

²⁹ Pan Arabisme merupakan ideologi yang berdasar pada persatuan Arab. Representasi nyata dari ideologi ini adalah penyatuan Mesir dan Suriah dalam United Arab Republic (UAR) tahun 1958. Namun, tahun 1961 Suriah memutuskan keluar dari UAR, namun namanya tetap digunakan oleh Mesir hingga tahun 1971. Ideologi pan Arabisme membuat negara-negara Arab sulit untuk berdamai dengan Israel karena membutuhkan kesepakatan negara-negara Arab. Pan Arabisme dalam pemaknaan yang lebih longgar tetap hidup di negara-negara Arab yang salah satunya diwujudkan dengan kesepakatan API yang menjadi pegangan negara-negara Arab dalam perdamaian dengan Israel yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina terlebih dahulu.

nasional Mesir. Sadat tidak menilai hubungan dengan Uni Soviet sebagai hal yang vital bagi Mesir. Nasser sendiri membangun hubungan baik dengan Uni Soviet untuk memperoleh berbagai bantuan ekonomi dan militer. Kisingger mampu meyakinkan Sadat bahwa Amerika Serikat adalah solusi yang tepat bagi Mesir mengingat berapapun besarnya bantuan dari Uni Soviet ke Mesir tidak akan mampu untuk mengembalikan Semenanjung Sinai ke tangan Mesir. Hanya mediasi Amerika Serikat saja yang akan mampu membantu Mesir mendapatkan kembali wilayah Semenanjung Sinai tersebut. Sadat kemudian berkunjung ke Yerusalem pada tahun 1977 dan berpidato di depan parlemen Israel, Knesset, yang diikuti dengan kunjungan Begin ke Kairo. Presiden Jimmy Carter pun akhirnya mengundang Sadat dan Begin ke Camp David untuk bernegosiasi dan berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Camp David.

Perjanjian Wadi Araba juga tidak dapat dilepaskan dari peran pihak ketiga, yaitu Amerika Serikat. Proses menuju kesepakatan tersebut berawal dari Konferensi Madrid tahun 1991 pasca berakhirnya Perang Teluk tahun 1990 yang mempertemukan negara-negara Arab dengan Israel dalam sebuah pertemuan multilateral. Konferensi tersebut dimungkinkan karena negara-negara Arab yang terlibat, dengan pengecualian Yordania, merupakan bagian dari koalisi anti-Saddam Husein dalam Perang Teluk tahun 1990. Yordania tidak terlibat dalam koalisi anti-Saddam Husein tersebut. Pasca Perang Teluk, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Baker III, melakukan serangkaian kunjungan ke negara-negara Arab untuk mendorong mereka berdialog dengan Israel. Yordania, PLO³⁰, Suriah, dan Lebanon sepakat untuk bertemu dengan Israel dengan mediasi Amerika Serikat. Tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Madrid, namun pembicaraan bilateral antara Israel dengan negara-negara tersebut tetap berlanjut pasca konferensi tersebut.

Amerika Serikat melanjutkan mediasi perundingan Yordania dan Israel. Amerika Serikat menyediakan bantuan ekonomi dan persenjataan untuk memotivasi Raja Hussein agar mau menandatangani kesepakatan damai dengan Israel. Bantuan ekonomi tersebut memainkan peran penting dalam keputusan Yordania karena adanya tekanan besar dalam ekonomi mereka. Tekanan tersebut muncul akibat keputusan Yordania untuk tidak bergabung dalam koalisi anti-Saddam Husein membuat mereka dikucilkan oleh negara-negara Arab Teluk. Padahal, negara-negara Arab Teluk merupakan sumber keuangan utama Yordania dari remitansi yang dikirimkan oleh para pekerja Yordania di negara-negara tersebut. Ada dua hal yang mendorong keputusan Yordania untuk mendukung Saddam Husein dalam Perang Teluk tahun 1990.³¹ Pertama, Yordania memiliki ketergantungan pasokan minyak yang tinggi dari Irak. Selain itu, volume perdagangan dengan Irak pada tahun 1990-an sendiri mencapai 70% dari total perdagangan Yordania. Kedua, dukungan PLO pada Saddam Husein membuat Yordania tidak punya pilihan lain karena banyaknya warga Palestina yang bermukim di negara dan pilihan untuk anti-Saddam Husein akan memunculkan gejolak politik domestik. Keputusan tersebut membuat negara-negara Arab Teluk memaksa warga Yordania yang bekerja di negara mereka untuk pulang. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya lonjakan penduduk sebesar 10%. Lonjakan penduduk ini mengakibatkan tekanan pada penyediaan perumahan, jaminan sosial, dan biaya pendidikan. Kepulangan mereka juga menyebabkan hilangnya pemasukan negara dari remitansi sebesar 200 juta USD. Pengucilan Yordania oleh negara-negara Arab Teluk juga memaksa penutupan Pelabuhan Aqaba yang membuat mereka merugi hingga 1,5 miliar USD. Tekanan-tekanan tersebut memaksa Yordania membuat perubahan pada kebijakan luar negerinya, salah satunya dengan menyepakati normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel untuk

³⁰ Pada saat itu, PLO menjadi bagian dari delegasi Yordania.

³¹ Stanley Reed, "Jordan and the Gulf Crisis," *Foreign Affairs* 69, no. 5 (1990): 21-35.

mengakhiri paceklik ekonomi, mendapatkan suntikan dana dan penghapusan hutang dari Amerika Serikat, dan mengalami diversifikasi ekonomi dari hubungan dengan Israel.

Proses menuju penandatanganan Perjanjian Wadi Araba dapat berjalan mulus karena Yordania dan Israel sebelumnya telah memiliki hubungan pertemanan yang panjang. Pada tahun 1930, Raja Abdullah dari Yordania sudah menjalin hubungan baik dengan Agensi Yahudi untuk Israel (*Jewish Agency for Israel*) yang beroperasi di Palestina. Dalam Perang 1948, menurut Shlaim, terdapat kolusi antara Raja Abdullah dan Agensi Yahudi tersebut untuk membagi daerah Mandatoris Palestina di antara mereka.³² Setelah perang berakhir, Letnan Kolonel Moshe Dayan dan Kolonel Abdullah al-Tal menegosiasikan gencatan senjata dan, dengan masukan personal dari Raja Abdullah, membahas rancangan perjanjian damai antara kedua negara.³³

Namun, Raja Abdullah ternyata ragu untuk menandatangani kesepakatan tersebut karena kerasnya penolakan dari kelompok Palestina di Yordania. Raja Abdullah sendiri akhirnya dibunuh pada bulan Juli 1951 oleh seorang nasionalis Palestina. Raja Hussein yang menggantikan Raja Abdullah tetap membangun hubungan baik dengan Israel. Dia kerap melakukan pertemuan klandestin dengan pejabat-pejabat Israel.³⁴ Raja Hussein tercatat menemui seluruh Perdana Menteri Israel selama masa kepemimpinannya. Dari relasi ini, kedua negara mampu bekerja sama dalam bidang keamanan perbatasan sehingga menciptakan sebuah relasi yang fungsional meski tanpa perjanjian damai. Pada tahun 1987, Raja Hussein dan Perdana Menteri Shimon Peres juga sempat bertemu di London untuk menyusun rancangan perjanjian damai yang akhirnya gagal mencapai kesepakatan karena meningkatnya kekerasan dalam konflik Palestina-Israel dan adanya problem politik domestik Israel.³⁵

Proses panjang menuju penandatanganan Perjanjian Abraham juga dapat terjadi. Hubungan antara UEA dengan Israel sudah berlangsung sejak tahun 1970-an dan dilakukan secara diam-diam. Hubungan kedua negara baru mulai dilakukan secara terbuka di periode 2000-an. Sifat dari hubungan tersebut adalah tidak resmi (*unofficial*) dan dilakukan untuk menghormati sikap Liga Arab dalam masalah Palestina. UEA merupakan salah satu penandatanganan API sehingga opsi untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam API.

Namun, kesamaan kepentingan antara UEA dan Israel membuat mereka tetap membangun kerja sama di berbagai bidang, seperti: politik, keamanan, ekonomi, dan sipil. Dalam bidang politik, pertemuan-pertemuan politik tingkat tinggi antara kedua negara dilakukan secara berkala dan diam-diam. Sebagai contoh, Netanyahu menemui Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan, pada tahun 2012 saat Sidang Umum PBB di New York dan membahas langkah-langkah untuk menggagalkan rencana pembangunan fasilitas nuklir Iran.³⁶ Direktur Umum Kementerian Luar Negeri

³² Avi Shlaim, *Collusion Across the Jordan: King Abdullah, The Zionist Movement, and The Partition of Palestine* (New York: Columbia University Press, 1988), 122-159.

³³ Shlaim, *Collusion Across the Jordan*, 122-159.

³⁴ Shlaim, *Collusion Across the Jordan*, 122-159.

³⁵ Amanda Borschel-Dan, "Missed opportunity? The 1987 Peres-Hussein peace deal that wasn't Pushed by Margaret Thatcher, Shimon Peres believed the London Agreement would have averted the Intifada. Here's what went wrong," *The Times of Israel*, 30 September 2016, <https://www.timesofisrael.com/missed-opportunity-the-1987-peres-hussein-peace-deal-that-wasnt/>.

³⁶ Barak Ravid, "Exclusive: Netanyahu Secretly Met With UAE Foreign Minister in 2012 in New York," *Haaretz*, 25 Juli 2017, <https://www.haaretz.com/israel-news/2017-07-25/ty-article/netanyahu-secretly-met-with-uae-foreign-minister-in-2012-in-new-york/0000017f-f5d4-d47e-a37f-fdfe3a30000>.

Israel, Dore Gold, bahkan melakukan kunjungan ke UEA pada November 2015 untuk membahas pembukaan kantor misi Israel untuk salah satu badan PBB, yakni Badan Energi Terbarukan Internasional (*Internasional Renewable Energy Agency* atau IRENA) yang bermarkas di Kota Masdar.³⁷ Jauh sebelumnya, pada tahun 2003, UEA memfasilitasi 80 anggota delegasi Israel untuk menghadiri konferensi Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund* atau IMF) di Dubai.³⁸

Dalam bidang keamanan, seperti sudah disinggung sebelumnya, kedua negara melakukan kerja sama intelijen dan keamanan sejak tahun 1971.³⁹ Kedua negara juga terlibat dalam transaksi perdagangan senjata yang dilakukan melalui Otoritas Infrastruktur Kritis Nasional (*Critical National Infrastructure Authority* atau CNIA), lembaga yang bertanggung jawab atas urusan militer dan keamanan di UEA.⁴⁰ Pada tahun 2006 dan 2009, Israel mengizinkan UEA untuk mengakses satelit Eros-A dan Eros-B untuk memantau perkembangan nuklir Iran.⁴¹

Dalam bidang ekonomi, hubungan UEA dan Israel juga berjalan dengan baik. Neraca perdagangan kedua negara didominasi oleh ekspor barang-barang dari Israel ke UEA, meliputi peralatan medis, alat telekomunikasi, barang mentah, produk pertahanan, mesin, dan produk agrikultur. Ekspor tersebut dilakukan melalui negara ketiga dengan tanpa mencantumkan label asal demi menjaga kerahasiaan kerja sama kedua negara. Media juga mengabarkan beberapa kerja sama bisnis, seperti: perusahaan AGT International milik Mati Kochavi dikontrak oleh Abu Dhabi untuk memasang pagar listrik, sistem sensor, dan kamera untuk memantau perbatasan dan mengamankan ladang minyak dan gas pada tahun 2008, pembukaan toko permata di Dubai oleh Lev Leviev Group pada tahun 2008, proyek bersama antara Yitzhak Tshuva dengan pemerintah UEA dalam pembangunan Plaza Hotel, kerja sama antara Ofer Brothers Group dan UEA dalam bidang pengiriman barang, dan negosiasi antara Beny Steinmetz dan pemerintah UEA dalam bidang energi dan proyek perhotelan.⁴² Hubungan tersebut terus berkembang dan dalam selama periode 2008 hingga 2013 UEA mengimpor produk-produk Israel senilai 138,4 juta USD.⁴³

Kerja sama di bidang sipil salah satunya dapat dilihat di bidang olahraga. Pada tahun 2010, UEA mengizinkan Shahr Peer untuk bertanding dalam Internasional Tennis

³⁷ Rori Donaghy, "Back-door diplomacy: Israel to open mission in UAE," *Middle East Eye*, 27 November 2015, <https://www.middleeasteye.net/news/back-door-diplomacy-israel-open-mission-uae>.

³⁸ Moran Zaga, "Israel and the United Arab Emirates: Opportunities on Hold," dalam *Israel's Relations with Arab Countries: The Unfulfilled Potential (Israel: The Israeli Institute for Regional Foreign Policies, 2018)*, 10.

³⁹ Zaga, "Israel and the United Arab Emirates," 4.

⁴⁰ "Emirates 'has security links with Israel'," *United Press International*, 27 Januari 2012, <https://www.upi.com/Defense-News/2012/01/27/Emirates-has-security-links-with-Israel/73471327687767/>.

⁴¹ "Abu Dhabi Purchases Eros-B Imagery from ImageSat," *Via Satellite*, 24 Februari 2009, "<https://www.satellitetoday.com/telecom/2009/02/24/abu-dhabi-purchases-eros-b-imagery-from-imagesat-2/>"<https://www.satellitetoday.com/telecom/2009/02/24/abu-dhabi-purchases-eros-b-imagery-from-imagesat-2/>.

⁴² Rori Donaghy, "Falcon Eye: The Israeli-installed mass civil surveillance system of Abu Dhabi," *Middle East Eye*, 15 Juli 2015, <https://www.middleeasteye.net/news/falcon-eye-israeli-installed-mass-civil-surveillance-system-abu-dhabi>.

⁴³ Gadi Hitman and Chen Kertcher, "The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict," *The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies*, no. 2 (2018): 43-63; Clive Jones and Yoel Guzansky, "Israel's Relations with the Gulf States: Toward the Emergence of a Tacit Security Regime?," *Contemporary Security Policy* 38, no. 3 (2017): 398-419.

Tournament di Dubai.⁴⁴ Pada tahun 2015, UEA kembali mengizinkan atlet asal Israel untuk mengikuti kompetisi judo yang diadakan di Abu Dhabi. UEA bahkan mengizinkan pemutaran lagu kebangsaan Israel dalam ajang Judo Grand Slam setelah Sagi Muki dari Israel berhasil memenangkan medali emas.⁴⁵

Selain proses panjang tersebut, normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Israel juga tidak dapat dilepaskan dari upaya mediasi Amerika Serikat. Perjanjian ini dilihat sebagai keberhasilan Amerika Serikat untuk meneguhkan kembali peran kepemimpinan mereka di kawasan Timur Tengah. Peran Penasehat Presiden Trump, Jared Kushner, dan asistennya, Avi Berkowitz, dalam menjembatani negosiasi antara UEA, serta Bahrain, Sudan, dan Maroko, sangat sentral.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pola normalisasi hubungan diplomatik yang terjadi di Perjanjian Camp David, Perjanjian Wadi Araba, dan Perjanjian Abraham dilakukan secara perlahan dalam sebuah proses panjang dengan bantuan dan peran sentral dari pihak ketiga, yaitu Amerika Serikat. Proses tersebut juga tidak mendapatkan ganjalan dari negara-negara besar lain. Meski demikian, hasil perjanjian tersebut tidaklah sama antara yang satu dengan yang lain. Perjanjian Camp David dan Perjanjian Wadi Araba tidak menghasilkan hubungan yang hangat atau dapat disebut sebagai perdamaian dingin atau "*cold peace*" sedangkan Perjanjian Abraham, terutama antara UEA dan Israel, menghasilkan perdamaian hangat atau "*warm peace*" karena hubungan antar-masyarakat mereka juga mengalami peningkatan.

Faktor Pendorong Normalisasi

Faktor-faktor yang mendorong normalisasi hubungan diplomatik antara ketiga negara Arab dengan Israel dalam Perjanjian Camp David, Perjanjian Wadi Araba, dan Perjanjian Abraham dapat dibedakan dalam dua level, yaitu: faktor yang sifatnya *agent-based*, terutama kondisi politik domestik di masing-masing negara, dan faktor struktural, yang muncul dalam kebijakan negara-negara besar. Dalam tataran yang pertama, situasi domestik, termasuk ekonomi, memainkan peran yang signifikan. Hal tersebut muncul dalam Perjanjian Camp David, Perjanjian Wadi Araba, dan Perjanjian Abraham. Keterpurukan atau kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting di tataran domestik yang mendorong Mesir, Yordania, dan UEA untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Keuntungan ekonomi tersebut tidak harus didapatkan dari hubungan langsung dengan Israel namun bisa melalui pihak ketiga, dalam hal ini Amerika Serikat. Selain itu, kekuatan (atau legitimasi) politik pemimpin yang kuat juga menjadi kunci bagi keberhasilan normalisasi hubungan diplomatik. Kemudian, di tataran kedua, kondisi struktural yang terkait dengan kebijakan negara-negara besar akan mendorong, atau menghambat, pemimpin untuk menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik.

Dalam Perjanjian Camp David, kondisi nyata di lapangan yang dihadapi oleh Mesir adalah stagnansi ekonomi dan disusul dengan hilangnya wilayah Semenanjung Sinai. Persoalan ekonomi yang dihadapi Mesir di bawah kepemimpinan Sadat merupakan warisan dari periode sebelumnya. Ekonomi terpimpin yang dibawa oleh Nasser membawa berbagai dampak mulai dari inefisiensi perusahaan-perusahaan negara hingga meningkatnya ketergantungan terhadap Uni Soviet di berbagai bidang,

⁴⁴ Donald McRae, "I Feel very Proud: Israel's Shahar Peer on Playing Tennis in the UAE," *The Guardian*, 18 Mei 2020, <https://www.theguardian.com/sport/2010/may/18/shahar-peer-israeli-woman-uae>.

⁴⁵ "Israeli anthem plays in the UAE for the first time after Judo athlete wins Gold," *The Jewish Chronicle*, 29 Oktober 2018, <https://www.thejc.com/news/israel/israeli-brothers-rushed-to-hospital-after-accidentally-eating-cannabis-cookies-3cM40bdRdLCqqoTunydj7p>.

termasuk ekonomi.⁴⁶ Meski terdapat protes-protes dari beberapa elemen dari publik, kepemimpinan Nasser tetap bertahan karena berbagai kebijakan populis yang dia ambil. Sadat mewarisi berbagai masalah ekonomi tersebut, namun tidak mewarisi kepopuleran Nasser. Dia kemudian memperkenalkan *infitah* (liberalisasi perekonomian) untuk menangani masalah ekonomi Mesir pasca Perang Yom Kippur.⁴⁷ Kebijakan tersebut menarik perhatian banyak negara Arab maupun non-Arab, termasuk negara-negara Barat. Sadat mulai meninggalkan Uni Soviet dan berpaling pada Amerika Serikat untuk membantu perbaikan ekonomi Mesir seiring dengan pendekatan yang dilakukan secara *intens* oleh Kissinger.

Selain masalah ekonomi, dalam Perang Yom Kippur, Mesir kehilangan wilayah Semenanjung Sinai. Kekalahan dalam perang tersebut membuat kebutuhan untuk mengembalikan kedaulatan Mesir menjadi misi yang penting. Di titik tersebut, Mesir tidak lagi terlalu mempertimbangkan pan-Arabisme ataupun kemerdekaan Palestina dan lebih fokus pada dirinya sendiri. Mendapatkan Semenanjung Sinai akan mampu mendorong legitimasi Sadat. Hal ini terkait dengan faktor domestik ketiga, yaitu legitimasi pemimpin. Tidak seperti Nasser, Sadat tidak memiliki basis pendukung yang luas sehingga ketika dia menggantikan Nasser maka dia perlu memperluas basis dukungannya. Hal ini membuat Sadat membiarkan munculnya kelompok-kelompok berbasis agama di Mesir. Namun sayangnya, kelompok Islam radikal kemudian melihat kesepakatan damai dengan Israel sebagai sebuah pengkhianatan dan membuat Sadat terbunuh.

Kondisi domestik juga berperan dalam keputusan Yordania untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Tekanan ekonomi akibat keputusan Yordania untuk tidak bergabung dalam aliansi anti-Saddam Husein menjadi masalah tersendiri bagi pemerintahan Raja Husein. Meski dia tidak kehilangan legitimasi, namun tekanan ekonomi tersebut menjadi perhatian utama karena dapat menciptakan instabilitas domestik. Keputusan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel akan membuat Yordania mendapatkan berbagai keuntungan finansial, seperti komersialisasi laut mati dan kerja sama kota kembar Eliat-Aqaba.⁴⁸ Keuntungan yang sama tentu juga akan didapatkan oleh Israel. Selain itu, perjanjian damai dengan Israel sama halnya dengan menghilangkan kemungkinan perang melawan Israel, mengurangi ketergantungan militer atas Irak yang pada awal 1990-an menjadi satu-satunya mitra Yordania di kawasan Timur Tengah, dan memperbaiki relasi ekonomi dengan Amerika Serikat yang tentu berarti adanya potensi pemulihan ekonomi.

Dalam Perang Teluk tahun 1990, ketika Irak menyerbu Kuwait, Yordania menjadi satu dari sedikit negara yang mendukung posisi Irak. Tekanan dari mayoritas populasi Palestina di Yordania saat itu membuat Yordania diasingkan dari sekutu kawasan mereka, yakni negara-negara Arab Teluk dan Amerika Serikat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya hal tersebut membebani perekonomian Yordania, termasuk melemahkan nilai tukar dinar Yordania. Dari kondisi di atas, normalisasi hubungan dengan Israel ditujukan untuk mendapat pengampunan hutang luar negeri Yordania oleh AS sebesar \$702 juta⁴⁹. Pengampunan tersebut juga membukakan jalan bagi Yordania untuk keluar

⁴⁶ Peter Johnson, "Egypt under Nasser," *MERIP Report*, no. 10 (1972): 3-14.

⁴⁷ Marie-Christine Aulas, "Sadat's Egypt: A Balance Sheet," *MERIP Report*, no. 107 (1982): 6-18 dan 30-31; Henry J. Bruton, "Egypt's Development in the Seventies," *Economic Development and Cultural Change* 31, no. 4 (1983): 679-704.

⁴⁸ Steven A. Cook, "Jordan-Israel Peace, Year One: Laying the Foundation," *The Washington Institute Policy Focus*, no. 30 (Desember 1995): 2 dan 5.

⁴⁹ Farooq Mitha, "The Jordanian-Israeli Relationship: The Reality of "Cooperation"," *Middle East Policy*, (17 Februari 2010): 110.

dari pengasingan kawasan, dan membantu Yordania mendapat mitra keamanan baru sehingga tidak lagi bergantung pada Irak.

Dalam kasus Perjanjian Abraham, normalisasi didorong oleh beberapa hal, seperti: kepentingan ekonomi UAE, terutama terkait dengan *respons* Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan anjloknya harga minyak dunia, padahal minyak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar bagi UEA. Dengan menandatangani normalisasi dengan Israel maka UEA akan bisa membuka kanal diversifikasi ekonomi lantaran Israel mampu menyediakan transfer teknologi, wisatawan, dan investasi bagi Abu Dhabi.⁵⁰ Selain menghindari UEA dari ancaman krisis ekonomi, penandatanganan perjanjian damai ini juga merupakan salah satu bentuk perwujudan rencana pembangunan jangka panjang UEA, yakni Vision 2021 yang menitikberatkan pada diversifikasi ekonomi.

Selain faktor internal (*agent-based*) tersebut, ada juga faktor struktural atau eksternal yang mendorong normalisasi. Dalam konteks Perjanjian Camp David, pertarungan antara blok Barat dan blok Timur menjadi latar belakang normalisasi hubungan diplomatik Mesir dan Israel. Perang Yom Kippur tidak dapat dilepaskan dari situasi Perang Dingin. Nasser membawa Mesir mendekati ke Uni Soviet. Hubungan Mesir dan Uni Soviet sangatlah mendalam. Meski demikian, Uni Soviet tidak menginginkan pecahnya perang antara Mesir dan Suriah, serta negara-negara Arab lain, dengan Israel.⁵¹ Saat itu, hubungan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat masuk dalam situasi *détente*. Situasi tersebut mendorong Uni Soviet untuk menahan Mesir dan Suriah untuk menginisiasi konflik terbuka. Apalagi, saat itu Uni Soviet yang sudah berinvestasi besar di Mesir dan Suriah tidak menghendaki adanya konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat. Uni Soviet bahkan dengan segera membangun kebijakan untuk meminimalkan risiko akibat keterlibatan Mesir dan Suriah dalam Perang Yom Kippur.⁵²

Dari faktor eksternal, berakhirnya Perang Dingin membuat negara-negara Arab, termasuk Yordania, tidak punya pilihan selain mendekati ke Amerika Serikat. Penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang memulihkan hubungan Palestina dan Israel membuat adanya negosiasi langsung antara Israel dan PLO mengenai status Yerusalem. Hal tersebut memaksa Raja Hussein untuk cepat-cepat mengamankan kepentingan Yordania di Yerusalem. Berbeda dengan upaya penandatanganan Perjanjian Camp David antara Sadat dan Begin, Raja Hussein dan Rabin justru menerima dukungan populer di dalam negeri sehingga memudahkan jalannya negosiasi. Rabin mendapatkan dukungan yang kuat dari dalam negeri lantaran oposisi sayap kanan lebih memilih untuk bernegosiasi dengan Yordania dibanding dengan PLO. Di sisi lain, meski Raja Hussein mendapatkan penolakan dari golongan Islamis dan sayap kiri, kedua golongan tersebut tidak memiliki kekuatan signifikan dalam parlemen.

Pada pembicaraan antara Israel dan Yordania sepanjang tahun 1993-1994, Amerika Serikat menjadi kekuatan eksternal yang diinginkan oleh kedua pihak. Amerika Serikat menyediakan bantuan ekonomi dan persenjataan sehingga memotivasi Raja Hussein untuk bersedia menandatangani normalisasi dengan Israel. Menurut Klieman, kontribusi penting Amerika Serikat pada negosiasi perdamaian menjadi penting karena mereka

⁵⁰ Raden Mas Wicaksono, "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab Dengan Israel," *Jurnal ICMES* 4, no. 2 (2020): 148.

⁵¹ Galia Golan, "The Soviet Union and the Yom Kippur War," *Israel Affairs* 6, no. 1 (1999): 126-152.

⁵² William B. Quandt, "Soviet Policy in the Oktober 1973 War," *RAND Report*, R-1864-ISA (1976). <https://www.rand.org/pubs/reports/R1864.html>.

menjadi penjamin, memiliki kapasitas untuk memastikan negosiator tetap pada jalur dan menarik minat mereka untuk menandatangani perjanjian.⁵³

Dalam kasus Perjanjian Abraham, bagi Israel, menandatangani perjanjian ini berguna untuk mengakhiri isolasi regional, memperkuat relasinya dengan Amerika Serikat, dan memperluas langkah untuk urusan keamanan kawasan.⁵⁴ Dengan menandatangani perjanjian ini, Israel seolah-olah terhindar dari tiga kewajiban yang harus dipenuhinya terkait isu Palestina seperti yang tercatat pada API. Terlebih dengan menjadikan UAE sebagai mitra, Israel memiliki rekan yang sama-sama memandang Iran sebagai ancaman keamanan kawasan.⁵⁵

UEA sendiri menilai Iran sebagai ancaman utama mereka, terutama karena adanya keinginan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Rencana pembangunan infrastruktur nuklir Iran membuat negara-negara di sekitarnya, termasuk UEA, merasa tidak aman. Ambisi nuklir Iran kembali mencuat ke permukaan ketika Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (*Joint Comprehensive Plan of Action* atau JCPOA), sebuah perjanjian yang mengatur mengenai pembatasan aktivitas nuklir Iran, pada tahun 2018.

Selain itu, Timur Tengah juga dilanda permasalahan radikalisme. UEA dan Israel sama-sama menganggap kelompok Islamis seperti Ikhwanul Muslimin (IM), Hamas, Negara Islam Irak dan Suriah (Daesh), dan kelompok Houthi sebagai ancaman. IM dan Daesh merupakan ancaman bagi negara-negara Arab lantaran mereka ingin menjatuhkan penguasa-penguasa di kawasan tersebut.⁵⁶ Sementara itu, Hamas dan Houthi merupakan kelompok teror yang disinyalir mendapat dukungan dari Iran untuk melakukan penyerangan pada Israel dan UEA.⁵⁷ Langkah untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel memperlihatkan bahwa UEA berupaya untuk meningkatkan kekuatan militernya di kawasan. UEA mencoba untuk beraliansi dengan salah satu negara yang memiliki kekuatan militer terkuat dan satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki nuklir.⁵⁸ Hal ini mereka lakukan untuk meningkatkan daya gentar negaranya sehingga Iran akan berpikir dua kali apabila hendak melancarkan serangan nuklir terhadap UEA. Selanjutnya, dengan melakukan normalisasi di bawah mediasi Amerika Serikat, Presiden Trump menyetujui penjualan 50 unit F-35 dan 18 Drone Reaper senilai Rp 328,8 triliun.⁵⁹ Upaya penguatan kekuatan militer ini dinilai akan dapat mengatasi ancaman nuklir Iran dan kelompok radikal di timur Tengah.

⁵³ Aharon S. Klieman, *Approaching The Finish Line: The United States in Post-Oslo Peace Making (Begin-Sadat Center Bar-Ilan University: 1995)*, 18.

⁵⁴ Muhammad Rafi Khan dan Sajid Mehmod Shahzad, "The Abraham Accords: Israel resizing Spheres of Influence," *JRSP* 58, no. 2 (April-Juni 2021): 180-183.

⁵⁵ Broto Wardoyo dan Rizal Valentino, "Breaking Taboo: Keputusan Uni Emirat Arab untuk Melakukan Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel," *Global Strategis* 16, no. 1 (2022): 164.

⁵⁶ Peter Salisbury, "Risk Perception and Appetite in UAE Foreign and National Security Policy," *Chatham House's Middle East and North Africa Programme*, (Juli 2020): 15. <https://doi.org/10.1515/sirius-2020-4015>

⁵⁷ Salisbury, "Risk Perception and Appetite in UAE Foreign and National Security Policy," 15.

⁵⁸ Shlomo Maital and Ella Barzani, "The Economic Impact of the Abraham Accords After One Year: Passions vs Interests," *Samuel Neaman Institute for National Policy Research Technion - Israel Institute of Technology*, (Desember 2021): 2-7.

⁵⁹ Natasha Turak, "UAE to get its first Reaper drones, clinches F-35 deal as Trump administration pushes through final arms sales," *CNBC*, 12 November 2020, <https://www.cnbc.com/2020/11/12/uae-set-to-get-its-first-reaper-drones-clinch-f-35-deal-as-trump-administration-pushes-through-final-arms-sales-.html>.

Kebutuhan akan mitra aliansi yang dapat dipercaya (*reliable*) tersebut menjadi semakin penting karena kehadiran pasukan militer Amerika Serikat telah menurun secara drastis sejak era perang melawan terorisme. Penarikan diri Amerika Serikat tersebut tidak dilepaskan dari adanya penurunan komitmen presiden-presiden Amerika Serikat setelah Presiden George W. Bush dalam melakukan intervensi militer di wilayah Timur Tengah. Penurunan komitmen tersebut disebabkan oleh rasa enggan masyarakat Amerika Serikat untuk mengalokasikan pajak mereka untuk membiayai pelaksanaan kebijakan luar negeri yang tidak jelas hasilnya dan preferensi mereka untuk menggunakan pajak tersebut untuk kebijakan dalam negeri yang dampaknya dapat secara langsung dirasakan.⁶⁰

Berkaca dari keadaan domestik di atas, presiden-presiden Amerika Serikat setelah Presiden Bush memutuskan untuk mengampunahkan pengurangan komitmen Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan menyerahkan pelaksanaan kebijakan luar negeri di kawasan-kawasan pada aktor-aktor kawasan kepercayaan mereka. Terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden pada pemilihan umum tahun 2008, misalnya, merupakan hasil dari sikap penolakannya terhadap kebijakan perang melawan terorisme. Apalagi Presiden Obama mendorong komitmen untuk memulangkan tentara Amerika Serikat.⁶¹ Hal tersebut kemudian diwujudkan dengan penarikan pasukan Amerika Serikat yang berada di Irak pada periode pertama kepemimpinannya serta penandatanganan kesepakatan kontroversial dengan Iran pada periode kedua.⁶² Selanjutnya, kemenangan Trump pada pemilihan umum 2016 juga dipengaruhi oleh sikapnya yang mengecam keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah yang dianggap tidak menguntungkan.⁶³ Pandangan tersebut terwujud dalam kebijakannya untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Suriah di tahun 2019.⁶⁴ Keadaan ini membuat elit-elit politik Timur Tengah khawatir bahwa Amerika Serikat akan mengurangi porsinya untuk mencegah perkembangan ancaman Iran atau, bahkan, Amerika Serikat akan memicu peperangan yang menempatkan negara-negara Timur Tengah di garis depan peperangan.⁶⁵ Elit politik kawasan dipaksa untuk membayangkan Timur Tengah tanpa kepemimpinan yang jelas dan meyakinkan dari Amerika Serikat.

Faktor eksternal lain yang mempengaruhi normalisasi hubungan diplomatik UEA dengan Israel adalah kuatnya lobi-lobi Israel di dalam tubuh pemerintahan Amerika Serikat. Kekuatan tersebut membuat pejabat pemerintahan Amerika Serikat harus

⁶⁰ William F. Wechsler, "US Withdrawal from the Middle East: Perception and Reality," *Publication of Institute for International Political Studies*, (2019): 25.

⁶¹ Wechsler, "US Withdrawal from the Middle East: Perception and Reality," 26.

⁶² Mark Landler, "U.S. Troops to Leave Iraq by Year's End, Obama Says," *The New York Times*, 21 Oktober 2011, <https://www.nytimes.com/2011/10/22/world/middleeast/president-obama-announces-end-of-war-in-iraq.html>.; Michael R. Gordon and David E. Sanger, "Deal Reached on Iran Nuclear Program; Limits on Fuel Would Lessen with Time," *The New York Times*, 14 Juli 2015, <https://www.nytimes.com/2015/07/15/world/middleeast/iran-nuclear-deal-is-reached-after-long-negotiations.html>.

⁶³ "Remarks by President Trump at Turning Point USA's Teen Student Action Summit 2019," *National Archives and Records Administration*, 23 Juli 2019, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-turning-point-usa-teen-student-action-summit-2019/>.

⁶⁴ Julian E. Barnes dan Eric Schmitt, "Trump Orders Withdrawal of U.S. Troops from Northern Syria," *The New York Times*, 13 Oktober 2019, <https://www.nytimes.com/2019/10/13/us/politics/mark-esper-syria-kurds-turkey.html>.

⁶⁵ William F. Wechsler, "US Withdrawal from the Middle East: Perception and Reality," *Publication of Institute for International Political Studies*, (2019): 30.

memenuhi kepentingan Israel apabila ingin memastikan kursi di pemerintahan.⁶⁶ Penjelasan di balik dukungan Amerika Serikat terhadap Israel ada pada kuatnya lobi Israel. Mearsheimer dan Walt mengidentifikasi lobi Israel sebagai koalisi lepas dari individu dan organisasi yang secara aktif mengendalikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sehingga sejalan dengan kepentingan Israel.⁶⁷ Pada kampanye presidensial tahun 2016, sebagai calon presiden dari partai Republikan, Trump menyambangi AIPAC untuk mendiskusikan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Pada kesempatan itu, Trump menyatakan bahwa Israel merupakan rekan strategis, kawan abadi, saudara sekultur, dan satu satunya negara demokrasi di Timur Tengah.⁶⁸

Kunjungan yang diikuti pernyataan demikian menunjukkan pentingnya AIPAC bagi keberhasilan pencalonan Trump dalam pemilihan umum Amerika Serikat. AIPAC merupakan organisasi yang mampu memberikan dana kampanye bagi masing-masing calon. Penyaluran dana tidak dilakukan oleh AIPAC secara langsung, melainkan menggunakan individu-individu yang terhubung dengannya. Dalam kasus ini, Trump mendapatkan dana kampanye dari Sheldon Anderson, salah seorang penyumbang terbesar bagi Republikan.⁶⁹ Anderson memberikan \$25 juta untuk membantu kesuksesan Trump dalam pemilu 2016.⁷⁰ Dengan adanya sumbangan tersebut, tidak mengherankan apabila Trump kemudian memprioritaskan agenda-agenda Israel dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa kepemimpinannya.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut nampak bahwa dinamika politik domestik dan kepentingan ekonomi merupakan dua faktor yang berkontribusi pada normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Israel. Di level struktural, kebijakan negara besar merupakan faktor penting yang berkontribusi pada keputusan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Arab dengan Israel.

Dampak Normalisasi

Normalisasi hubungan diplomatik tentu membawa konsekuensi bagi negara yang melakukan. Ada dampak positif namun ada juga dampak negatifnya. Seperti yang telah disebut sebelumnya, perdamaian antara Mesir dan Israel serta Yordania dan Israel lebih berkarakter dingin sedangkan perdamaian antara UEA dan Israel lebih hangat. Bagian ini memaparkan pelajaran (*lesson learnt*) dari normalisasi hubungan diplomatik Mesir, Yordania, dan UEA dengan Israel.

Perjanjian Camp David memberikan Mesir dua keuntungan. Pertama, Mesir menjadi negara Arab yang menerima bantuan militer tertinggi dari Amerika Serikat. Dari tahun 1978 hingga 2020 telah menerima 50,2 milyar USD bantuan militer dari

⁶⁶ Stephen Walt dan John J. Mearsheimer, "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy," *KSG Faculty Research Working Paper, Series RWP06-011 (SSRN Electronic Journal, Maret 2006)*: 9. <https://doi.org/10.2139/ssrn.891198>

⁶⁷ Walt dan Mearsheimer, "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy," 9.

⁶⁸ Sarah Begley, "Read Donald Trump's Speech to AIPAC," *TIME*, 21 Maret 2016, <https://time.com/4267058/donald-trump-aipac-speech-transcript/>.

⁶⁹ Peter Stone, "Sheldon Adelson to donate \$100m to Trump and Republicans, fundraisers say," *The Guardian*, 10 Februari 2020, <https://www.theguardian.com/us-news/2020/feb/10/sheldon-adelson-trump-donation-republicans-congress>.

⁷⁰ Peter Stone, "Sheldon Adelson to Give \$25m Boost to Trump Super PAC," *The Guardian*, 23 September 2016, <https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/23/sheldon-adelson-trump-super-pac-donation-25-million>.

Amerika Serikat.⁷¹ Di Timur Tengah, angka itu hanya kalah dari Israel. Selain itu, Mesir juga menjadi aktor penting dalam mediasi konflik Palestina-Israel. Pengakuan mereka terhadap Israel membuat mereka bisa berperan sebagai mediator. Dalam banyak kasus, Mesir memediasi gencatan senjata antara Israel dengan kelompok Hamas di Gaza.⁷² Peran tersebut biasanya dimainkan oleh Badan Intelijen Mesir. Sentralitas peran mereka juga terasa dalam masalah di Gaza karena Mesir memiliki kendali atas pintu perbatasan Rafah.

Lebih jauh, Dampak Perjanjian Camp David dapat dilihat dari butir-butir yang disepakati. Pertama, perjanjian perdamaian antara Israel dan Mesir disertai dengan penarikan pasukan kedua pihak dari wilayah El Aris hingga Ras Muhammad untuk kemudian ditempatkan pasukan perdamaian PBB. Kedua, disepakati juga kerangka kerja guna menjamin perdamaian yang ingin dicapai yang mengatur masalah Tepi Barat dan Gaza serta kerangka kerja yang menekankan kedua pihak untuk memberikan pengakuan penuh atas teritori masing-masing. Berdasarkan kedua kerangka kerja tersebut, Israel harus mengembalikan wilayah yang merupakan kedaulatan Mesir dengan imbalan penghapusan boikot.⁷³ Akan tetapi, dua hal yang disetujui dalam Perjanjian Camp David ini diimplementasikan dengan baik dan masih menyisakan konflik teritori di wilayah Taba.⁷⁴ Selain itu, penyelesaian Tepi Barat dan Gaza juga belum mencapai titik temu, padahal hal tersebut diatur di dalam kerangka kerja yang disepakati. Hal ini tidak terlepas dari keengganan Israel untuk membahas solusi damai bagi masalah Palestina, baik dengan Mesir maupun negara Arab lain serta PLO.

Salah satu alasan bagi kegagalan implementasi secara penuh tersebut adalah adanya pergantian pemimpin. Pada tahun 1985 terjadi pergantian kepemimpinan di Mesir, Israel, dan Amerika Serikat. Israel yang sebelumnya dipimpin oleh Begin digantikan oleh koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shimon Peres. Di dalam koalisi tersebut terdapat partai Likud yang beranggapan bahwa wilayah Tepi Barat dan Gaza harus tetap dikuasai Israel, meski Peres sendiri pernah secara terbuka mengungkapkan kemungkinan untuk mengembalikan sebagian wilayah Tepi Barat dan Gaza kepada Yordania. Di sisi lain, Mesir dipimpin oleh Presiden Hosni Mubarak yang enggan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Israel dan hanya menginginkan dialog dengan Amerika Serikat serta Yordania dalam penyelesaian masalah Tepi Barat dan Gaza. Amerika Serikat sendiri dianggap gagal untuk memberikan tekanan pada Israel untuk menarik diri dari seluruh wilayah Mesir yang mereka kuasai atau menghentikan aneksasi atas wilayah Dataran Tinggi Golan.⁷⁵

Normalisasi hubungan diplomatik antara Yordania dan Israel menghasilkan beberapa proyek kerja sama ekonomi dan keamanan. Meski demikian, normalisasi ini tidak dapat menciptakan hubungan yang benar-benar normal di antara keduanya. Hal ini disebabkan oleh dominasi etnis Palestina di Yordania yang menolak perjanjian damai dengan Israel yang kemudian menyulitkan rezim Hashemite untuk menjalin hubungan

⁷¹ Jeremy M. Sharp, "Egypt: Background and U.S. Relations," *CRS Report* RL33003, (Congressional Research Service, 2023). <https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33003.pdf>.

⁷² "Egypt's role in Gaza: More than a mediator," *Al Jazeera*, 26 April 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/26/egypts-role-gaza-more-than-mediator>.

⁷³ A. G. Naidu, "Camp David Accords: A Study in American Foreign Policy," *The Indian Journal of Political Science* 53, no. 3 (Juli-September 1992): 405. <https://www.jstor.org/stable/41855619>.

⁷⁴ Adriana Kemp dan Uri Ben-Eliezer, "Dramatizing Sovereignty: The Construction of Territorial Dispute in the Israeli-Egyptian Border at Taba," *Political Geography* 19, no. 3 (2000): 315-344.

⁷⁵ Pengembalian Semenanjung Sinai sendiri memakan waktu dari 1979 hingga 1982. Seluruh pemukiman Yahudi dibongkar kecuali beberapa di kota Sharm el-Sheikh.

yang lebih mendalam dengan Israel. Pada akhirnya, normalisasi hubungan diplomatik tersebut hanya berfungsi sebagai langkah untuk menetralkan ancaman dan bukan merupakan sebuah upaya normalisasi hubungan yang utuh.

Penandatanganan perjanjian damai dengan Israel sendiri tidak diikuti oleh dampak ekonomi yang awalnya diharapkan oleh Yordania. Hal ini karena ada ekspektasi yang tidak realistis yang dikampanyekan oleh rezim Hashemite untuk meyakinkan warga Yordania bahwa perekonomian mereka akan membaik setelah adanya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Faktanya, pertumbuhan ekonomi di lapangan justru mengalami penurunan dari rata-rata 10% pada 1992-1994 menjadi 5,6% di tahun 1995 dan kemudian semakin turun menjadi 1,5% pada 1996-1998.⁷⁶ Buruknya kondisi ekonomi tersebut menjadi faktor penting yang berkontribusi pada penurunan dukungan warga Yordania terhadap perjanjian damai dengan Israel. Dari berbagai harapan perbaikan seperti peningkatan ekspor, peningkatan aktivitas pariwisata, peningkatan investasi, penurunan anggaran militer, dan transfer teknologi ternyata hanya tercapai bidang pariwisata. Jumlah turis mengalami peningkatan drastis, meski peningkatan tersebut tetap ada dalam bayang-bayang ancaman terorisme dan turbulensi kawasan. Banyak proposal kerja sama Israel yang ditolak oleh warga Yordania. Serikat profesional dan komunitas bisnis Yordania memutuskan untuk memboikot mereka yang bekerja sama dengan Israel. Meski demikian, seiring berjalannya waktu pemerintah Yordania mampu mengadakan kerja sama ekonomi seperti pembelian gas alam dari Israel tahun 2014 dan kerja sama desalinasi Laut Mati tahun 2015.⁷⁷

Meski tidak maksimal secara ekonomi, dalam bidang keamanan terdapat peningkatan yang perlu diapresiasi. Kerja sama intelijen kedua negara semakin mapan. Kerja sama intelijen Israel, Yordania, dan Amerika Serikat berhasil mendeteksi keberadaan Abu Musab al-Zarqawi yang kemudian terbunuh dalam operasi militer tahun 2006.⁷⁸ Israel juga membantu rezim Hashemite untuk mempertahankan legitimasi mereka dalam Musim Semi Arab dari para pensiunan tentara dan pemimpin suku-suku Bedouin.⁷⁹

Perjanjian Abraham, di sisi lain, membuat UEA dan Israel lebih mudah dalam melakukan kerja sama dalam bidang keamanan maupun ekonomi. Dalam bidang keamanan, perjanjian ini memberikan ruang bagi Israel dan UAE untuk melawan pengaruh Iran. Mereka juga bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keamanan, seperti pengadaan misil balistik, roket, mortar, pesawat nir-awak murah, ranjau laut, dan peningkatan kekuatan siber.⁸⁰ Dalam praktiknya, kedua negara melakukan latihan

⁷⁶ Maen Nsour, "Economic Aspects of the Peace Treaty Between Jordan and Israel," *Annual Conference of Association of Israel Studies*, Washington DC, 1999.

⁷⁷ Ruth Eglash, "Israeli-U.S. Energy Partnership Agrees to Export Natural Gas to Jordan," *The Washington Post*, diakses pada 16 Mei 2023, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israeli-us-energy-partnership-agrees-to-export-natural-gas-to-jordan/2014/09/04/cd3797f0-344e-11e4-a723-fa3895a25d02_story.html; Suleiman Al-Khalidi, "Jordan, Israel Agree \$900 Million Red Sea-Dead Sea Project," *Reuters*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://www.reuters.com/article/us-mideast-economy-water-idUSKBNOLU23Z20150226>.

⁷⁸ Ronen Yitzhak, "The War against Terrorism and for Stability of the Hashemite Regime: Jordanian Intelligence Challenges in the 21st Century," *International Journal of Intelligence and Counterintelligence*, (2016): 221.

⁷⁹ Moshe Maoz, "The Political Islam and the Arab Spring" dalam *Nimrod Goren and Jenia Yudkevich (eds.), Israel and the Arab Spring: Opportunities in Change* (Ramat Gan: Mitvim—*The Israeli Institute for Regional Foreign Policies*, 2013), 36.

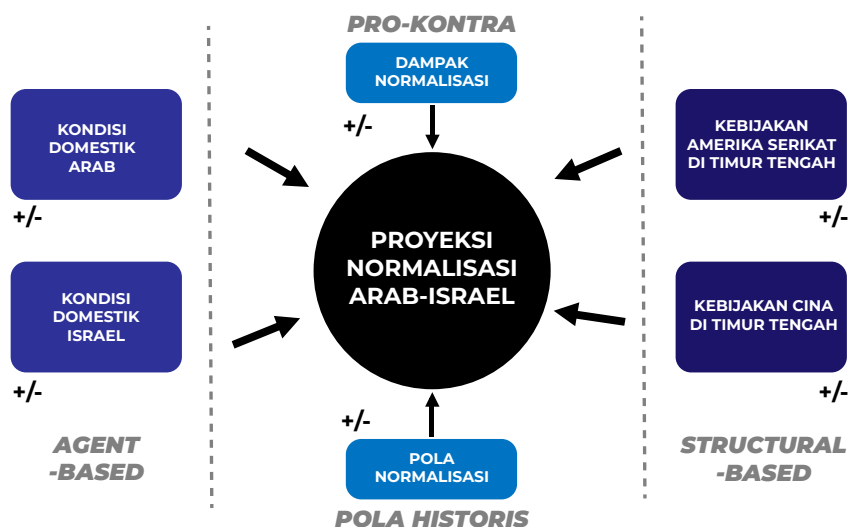
⁸⁰ "Abraham Accords Treaties Continue to Promote Defense Cooperation in the Middle East," *Army Technology*, 18 November 2022, <https://www.army-technology.com/comment/abraham-accords-treaties-middle-east/>.

militer bersama di Laut Merah, yang dilakukan pada bulan November 2021.⁸¹ Pada bulan September 2022, sebuah perusahaan teknologi Israel, *Rafael Advance Defence System*, setuju untuk menjual sistem keamanan udara SPYDER kepada UEA untuk melindungi mereka dari serangan pesawat tempur, misil, maupun pesawat nir-awak.⁸²

Hubungan ekonomi antara UEA dan Israel juga semakin meningkat setelah penandatanganan Perjanjian Abraham. Kedua negara melakukan sinergi dalam banyak bidang seperti finansial, investasi, dan energi. Di bidang finansial dan investasi, UEA dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement* atau FTA) pada tanggal 31 Maret 2022.⁸³ Di bidang energi sebuah perusahaan minyak asal Abu Dhabi, Mubadala Petroleum, membeli 22% saham Israel di tambang gas Tamar.⁸⁴ UEA juga kini diperbolehkan menggunakan kanal Israel untuk menjual minyak mentah ke pasar Barat.⁸⁵

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, model normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Israel harus mempertimbangkan variabel-variabel berikut. Pertama, pola normalisasi yang melibatkan proses panjang dan keterlibatan mediator negara besar. Kedua, faktor pendorong normalisasi yang dapat dibedakan dalam dua level, yaitu: domestik/internal dan struktural. Dalam level domestik/internal, pertimbangan politik domestik di kedua negara, Arab Saudi dan Israel, menjadi hal utama yang perlu ditelaah. Dalam level struktural kebijakan negara-negara besar, Amerika Serikat dan juga Cina, perlu untuk dilihat. Ketiga, perhitungan dampak normalisasi juga menjadi pertimbangan normalisasi hubungan diplomatik. Model tersebut dapat digambarkan dalam kerangka kerja berikut ini.

Bagan 2. Kerangka Kerja



⁸¹ "Abraham Accords Treaties Continue to Promote Defense Cooperation in the Middle East," *Army Technology*, 18 November 2022, <https://www.army-technology.com/comment/abraham-accords-treaties-middle-east/>.

⁸² "Exclusive: In Saudi Arabia, Criticism of Crown Prince Grows after Attack," *Reuters*, 2 Oktober 2019, <https://www.reuters.com/article/us-saudi-crownprince-exclusive-idUSKBN1WH227>.

⁸³ "Israel, UAE Sign Free Trade Pact into Effect," *Reuters*, 26 Maret 2023, <https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-uae-sign-free-trade-pact-into-effect-2023-03-26/>.

⁸⁴ Archana Rani, "Delek to Sell Entire Stake in Israeli Field to Mubadala for \$1.02bn," *Offshore Technology*, 3 September 2021, <https://www.offshore-technology.com/news/delek-stake-tamar-mubadala/#:~:text=Delek%20Drilling%20has%20agreed%20to,a%20deal%20worth%20%241.02bn>.

⁸⁵ Archana Rani, "Delek to Sell Entire Stake in Israeli Field to Mubadala for \$1.02bn," *Offshore Technology*, 3 September 2021, <https://www.offshore-technology.com/news/delek-stake-tamar-mubadala/#:~:text=Delek%20Drilling%20has%20agreed%20to,a%20deal%20worth%20%241.02bn>.

Data dan Metodologi

Monograf ini menggunakan metode kualitatif. Untuk membuat proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel, monograf ini terlebih membangun model normalisasi hubungan diplomatik dari kasus-kasus sebelumnya. Model tersebut⁸⁶ kemudian diaplikasikan dalam kasus normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel. Model tersebut mempertimbangkan enam variabel, mulai dari pola normalisasi, kondisi domestik Israel, kondisi domestik Arab Saudi, kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, kebijakan Cina di Timur Tengah, dan dampak normalisasi. Masing-masing variabel memiliki variasi plus (+) atau minus (-).

Dari tinjauan literatur, nampak bahwa normalisasi hubungan diplomatik tiga negara Arab terjadi karena adanya nilai plus (+) di pola normalisasi, kondisi domestik Israel, kondisi domestik negara-negara Arab tersebut, dan kebijakan Amerika Serikat. Kebijakan Cina tidak dipertimbangkan dalam ketiga kasus tersebut karena Cina belum menjadi pemain penting di kawasan Timur Tengah pada saat ditandatanganinya kesepakatan damai. Sementara itu, dampak normalisasi menunjukkan nilai netral (memiliki nilai plus maupun minus) yang artinya tidak secara signifikan menciptakan gangguan dalam keputusan normalisasi hubungan diplomatik. Apalagi, dampak tersebut baru dapat diobservasi ketika keputusan normalisasi hubungan diplomatik sudah dibuat sehingga yang dapat diobservasi adalah prediksi dampaknya.

Pengukuran plus (+) maupun minus (-) untuk tiap-tiap variabel dilakukan dengan melakukan interpretasi data. Beberapa indikator akan dipertimbangkan di tiap-tiap variabel. Variabel pola normalisasi mempertimbangkan ada atau tidaknya kerja sama di level empirik yang dilakukan secara diam-diam atau tertutup serta terbuka secara informal. Keberadaan kerja sama-kerja sama tersebut memberikan pondasi bagi normalisasi hubungan diplomatik. Dua variabel berikutnya, kondisi domestik Israel dan Arab Saudi mempertimbangkan peta politik di masing-masing negara. Untuk Israel, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan koalisi partai serta arah kebijakan mereka dalam hubungan dengan Arab Saudi dan Palestina. Posisi terhadap Palestina ini penting mengingat kemerdekaan Palestina menjadi salah satu kunci kesediaan negara-negara Arab dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Dalam Perjanjian Camp David, isu Palestina ada dalam butir kesepakatan meski implementasinya masih belum berhasil. Dalam Perjanjian Wadi Araba, negosiasi bilateral PLO dengan Israel menjadi alasan Raja Hussein untuk melakukan negosiasi dengan Israel. Selain karena ketidakinginan untuk ditinggalkan, Yordania juga bisa lebih bebas mendiskusikan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel karena Palestina sudah melakukannya terlebih dahulu. Dalam Perjanjian Abraham, proses negosiasi kesepakatan dilakukan setelah Duta Besar UEA menulis di Yedioth Ahronot mengkritik kebijakan yang diambil Israel di Tepi Barat. Tulisan tersebut direspon dengan tawaran perundingan oleh Amerika Serikat yang kemudian menggulirkan proses negosiasi dan berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Abraham. Variabel kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dinilai dengan mempertimbangkan komitmen mereka untuk menjembatani normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel. Hal yang sama juga dinilai dari kebijakan Cina di Timur Tengah. Terakhir, variabel dampak normalisasi dilihat dengan mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian dari keputusan normalisasi.

Data-data yang terkait dengan indikator-indikator tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Data primer didapatkan dari berbagai dokumen resmi pemerintahan, terutama yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris,

⁸⁶ Lihat Bagan 2.

seperti Saudi Vision 2030 ataupun *China's Arab Policy*. Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber terbuka terutama pemberitaan media, artikel jurnal, maupun buku. Untuk mendukung interpretasi atas data-data tersebut, monograf ini juga melakukan wawancara dengan empat narasumber yang menguasai politik dan kehidupan sosial-budaya Arab Saudi, politik Israel, pemetaan kelompok-kelompok Islam di Timur Tengah dan Indonesia, serta peta politik Iran. Keseluruhan narasumber akan ditulis secara anonim dan dibedakan dari tanggal wawancaranya.⁸⁷ Para narasumber tersebut juga sudah menyampaikan kesediaan mereka untuk dikutip dalam monograf ini.

⁸⁷ Secara berurutan wawancara narasumber dilakukan tanggal 7 April 2023 (mantan Duta Besar RI untuk Republik Islam Iran), 8 April 2023 (dosen di Universitas Raja Fahd, Arab Saudi), 11 April 2023 (mantan diplomat Israel di Singapura), dan 2 Mei 2023 (akademisi dari Universitas Ibrani di Yerusalem).

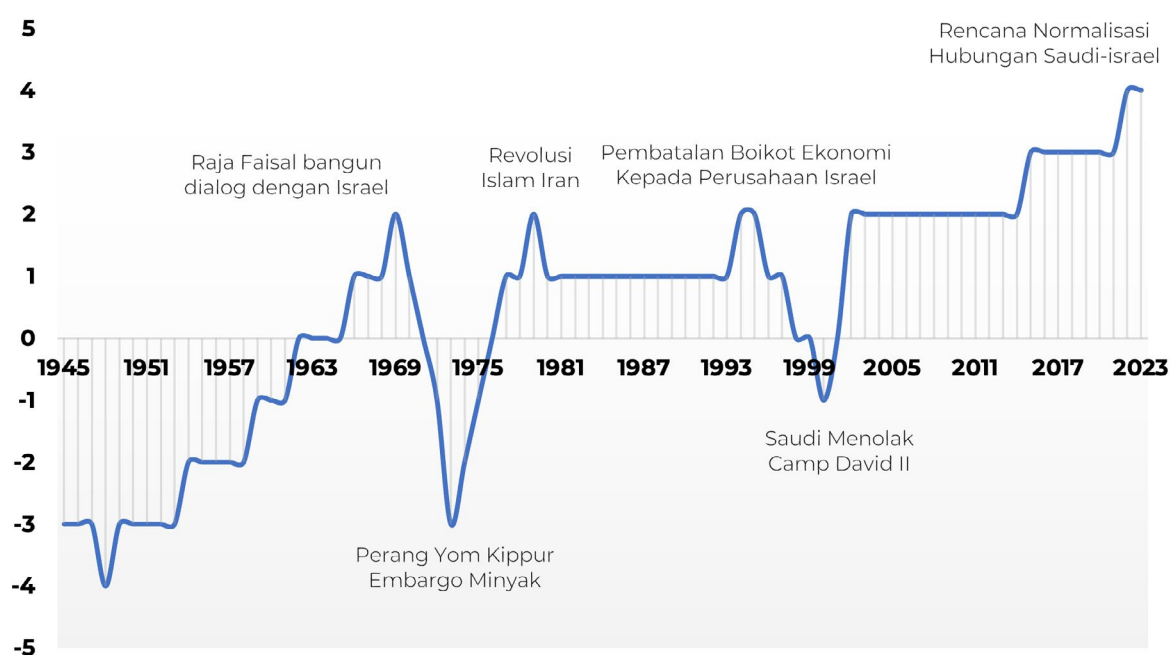
Proyeksi Normalisasi Hubungan Arab Saudi dan Israel

Bagian ini memaparkan proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel. Proyeksi tersebut mempertimbangkan tiga hal, yaitu: pola, pendorong, dan dampak normalisasi. Untuk melihat pola normalisasi, monograf ini melihat lini masa hubungan Arab Saudi dan Israel. Sementara itu, faktor pendorong normalisasi mempertimbangkan kondisi domestik di Arab Saudi dan Israel dalam penjelasan berbasis agensi (faktor internal) serta Cina di Timur Tengah. Terakhir, dampak normalisasi dilihat dari potensi keuntungan maupun instabilitas yang akan didapatkan pasca normalisasi. Masing-masing variabel tersebut akan diberikan nilai plus (+), minus (-), atau netral.

Pola Normalisasi (+)

Hubungan antara Arab Saudi dan Israel mengalami pergeseran positif dari sejak akhir 1960-an. Peningkatan hubungan (*rapprochement*) tersebut berlangsung secara perlahan dan diawali dengan kontak-kontak tertutup dan terbatas hingga akhirnya ditingkatkan menjadi hubungan yang lebih terbuka. Hubungan tersebut dibangun atas dasar pragmatisme kedua pihak.⁸⁸ Untuk melihat pola normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel, hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah melihat lini masa hubungan kedua negara. Bagan di bawah memperlihatkan adanya perbaikan hubungan kedua negara setelah Raja Faisal dari Arab Saudi mulai membangun dialog dengan Israel tahun 1969. Kemudian, peningkatan hubungan kembali terjadi seiring dengan berlangsungnya Revolusi Islam Iran tahun 1979. Terakhir, hubungan kedua negara kembali berada dalam kondisi positif sejak tahun 2005 ketika krisis nuklir Iran berlangsung. Dari ketiga kasus peningkatan hubungan tersebut, ada dua hal penting yang mendorong perbaikan hubungan antara Arab Saudi dan Israel tersebut, yaitu: faktor politik domestik di Arab Saudi dan faktor Iran.

Bagan 3. Lini Masa Hubungan Israel-Arab Saudi



⁸⁸ Elie Podeh, "Saudi Arabia and Israel: From Secret to Public Engagement," *Middle East Journal* 72, no. 4 (2018): 563-586.

Dalam kasus peningkatan hubungan yang pertama, faktor politik domestik lebih dominan menjelaskan terjadinya peningkatan hubungan tersebut. Arab Saudi pada saat itu dipimpin oleh Raja Faisal yang mengambil kebijakan untuk melakukan modernisasi, terutama di sektor minyak dan gas, serta mengambil kebijakan yang lebih akomodatif terhadap berbagai aliran dan kelompok etnis untuk membangun integrasi nasional yang baik.⁸⁹ Sektor minyak dan gas Arab Saudi sendiri sebenarnya telah tumbuh sejak 1920-an, namun modernisasi sektor ini baru berkembang dengan pesat ketika Faisal menjadi Raja. Faisal sendiri dikenal sebagai sosok yang cerdas dan liberal. Faisal memiliki kedekatan dengan beberapa pemimpin Amerika Serikat dan tokoh industri migas di negara tersebut sejak dia masih menjadi Putera Mahkota.⁹⁰ Ketika Faisal menjadi Raja, dia mengambil kebijakan-kebijakan yang pro-Barat. Era kepemimpinan Raja Faisal pun kemudian dilihat sebagai wajah modern Arab Saudi.

Faktor Iran tidak terlalu nampak dalam kasus peningkatan hubungan ini, namun, pertarungan politik Dunia Arab tetap berpengaruh. Pertarungan politik Arab antara Nasser dengan Faisal muncul secara nyata dalam Perang Sipil di Yaman tahun 1962. Nasser mendukung Abdullah Yahya al-Sallal menggulingkan Imam Muhammad al-Badr⁹¹ dari kekuasaan. Langkah tersebut membuat Raja Faisal khawatir dan memutuskan mendukung kelompok royalis yang mendukung Imam al-Badr. Pertarungan tersebut merupakan bagian dari pertarungan kelompok konservatif Arab (Arab Saudi) dan kelompok moderat Arab (Mesir). Dalam kasus tersebut, Mesir mendapatkan dukungan dari Uni Soviet sedangkan Arab Saudi memiliki kesamaan kepentingan dengan Inggris serta Israel. Israel sendiri berkepentingan untuk mencegah menguatnya popularitas Nasser di Dunia Arab mengingat Nasser konsisten menyerukan perang melawan Israel.⁹² Keterlibatan Israel sendiri dilakukan tidak secara terbuka namun dengan memanfaatkan operasi intelijen yang dijalankan oleh Inggris.⁹³

Dalam kasus peningkatan hubungan yang kedua, kombinasi antara faktor Iran berperan dominan dalam mendorong adanya perbaikan hubungan antara Arab Saudi dengan Israel. Kondisi kawasan Timur Tengah pasca ambuknya pemerintahan Shah Reza Pahlevi⁹⁴ di Iran dan naiknya Imam Ayatollah Ruhollah Khomeini menjadi pemimpin negara tersebut mengubah arah kebijakan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Ketakutan akan adanya penyebaran revolusi Islam di negara-negara Arab, terutama negara-negara Teluk yang berbatasan atau berdekatan dengan Iran, mendorong beberapa negara berusaha untuk mengisolasi Iran. Salah satunya adalah Saddam Husein dari Irak yang mengambil keputusan untuk memerangi Iran.

⁸⁹ Mai Yamani, "The Two Faces of Saudi," *Survival* 50, no. 1 (2008): 143-156.

⁹⁰ Victor McFarland, *Oil Power: A History of the U.S.-Saudi Alliance* (New York: Columbia University Press, 2020).

⁹¹ Saeed Mohammed Badeeb, *The Saudi-Egyptian Conflict over North Yemen, 1962-1970*, Washington D.C.: *George Washington University*, 1985, disertasi tidak dipublikasikan. Lihat juga Asher Aviad Orkaby, *The International History of the Yemen Civil War, 1962-1968*, Cambridge, Mass.: *Harvard University*, 2014, disertasi tidak dipublikasikan.

⁹² Yogev Elbaz, "Beyond the Periphery – Israel's Intervention in the Yemen Civil War in the 1960s," *Israel Studies* 27, no. 1 (2022): 84-107. Lihat juga Elie Podeh, Loc.cit. Kongsi antara Arab Saudi dengan Israel dalam Perang Sipil di Yaman ini juga disampaikan oleh salah satu narasumber dalam wawancara, 8 April 2023. Hanya saja, kongsi tersebut tidak dalam wujud koordinasi langsung antara kedua negara dalam perang.

⁹³ Elbaz, "Beyond the Periphery – Israel's Intervention in the Yemen Civil War in the 1960s," 84-107.

⁹⁴ Shah Reza Pahlevi berkuasa di Iran dari tahun 1941 hingga dijatuhkan di tahun 1979. Pemerintahannya pro pada Barat. Iran pada masa kepemimpinannya juga dekat dengan Israel.

Negara-negara Arab lain, termasuk Arab Saudi, pun memberikan dukungan pada Irak dalam perang tersebut. Negara-negara Arab khawatir bahwa revolusi serupa akan bisa terjadi di negara mereka dan mengancam kekuasaan yang mereka pegang. Apalagi, Iran sendiri ingin mengeksport revolusi serupa ke negara-negara tetangganya.⁹⁵ Kedekatan antara Iran dengan kelompok-kelompok Islam di beberapa negara Timur Tengah ditengarai sebagai salah satu celah bagi adanya ekspor tersebut.⁹⁶

Revolusi Islam Iran tersebut berlangsung hampir bersamaan dengan kasus Pendudukan Masjidil Haram oleh kelompok Ikhwan⁹⁷ pimpinan Juhayman al-Otaybi. Pendudukan tersebut dilakukan dengan alasan kerajaan terlalu kebarat-baratan dan mulai kehilangan nafas Islaminya. Merespon kejadian tersebut, Raja Khalid kemudian memberlakukan hukum Islam yang lebih ketat yang sekaligus membuat posisi ulama Wahabi⁹⁸ menjadi semakin kuat di kerajaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Raja Faisal membuat wajah Arab Saudi menjadi lebih modern. Kebijakan Raja Faisal yang membuka keran inklusi berbagai pandangan dan juga kelompok etnis membuat beberapa pihak, terutama kelompok Islam radikal⁹⁹, tidak puas. Kelompok Ikhwan merupakan salah satunya. Merespon hal tersebut, Raja Khalid kemudian mengambil kebijakan yang lebih tegas dalam implementasi hukum Islam untuk menunjukkan bahwa kerajaan Arab Saudi masih memegang teguh Islam dalam kehidupan bernegara.¹⁰⁰ Hal tersebut seakan membalikkan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kebijakan yang lebih mengedepankan revivalisme Islam tersebut mendorong peran dominan ulama Wahabi dalam kehidupan bernegara di Arab Saudi. Kebijakan tersebut tetap dipertahankan di era raja-raja selanjutnya hingga naiknya Raja Salman.

Fase ketiga membaiknya hubungan Arab Saudi dan Israel muncul seiring dengan menguatnya krisis nuklir Iran. Dugaan pengembangan senjata nuklir Iran bermula tahun 2005 ketika Iran hanya mengizinkan inspeksi Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency* atau IAEA) secara terbatas instalasi di basis militer Parchin.¹⁰¹

⁹⁵ Ramazani menilai bahwa mengeksport revolusi Islam merupakan prinsip penting (cardinal principle) dalam politik luar negeri Iran pasca revolusi. Lihat R.K. Ramazani, "Iran's Islamic Revolution and the Persian Gulf," *Current History* 84, no. 498 (1985): 5-8 dan 40-41.

⁹⁶ Hunter menilai bahwa revolusi Islam Iran menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok Islam di berbagai negara, namun pengaruhnya terhadap perilaku kelompok-kelompok tersebut juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Lihat Shireen T. Hunter, "Iran and the Spread of Revolutionary Islam," *Third World Quarterly* 10, no. 2 (1988): 730-743.

⁹⁷ Kelompok Ikhwan merupakan kelompok bersenjata dari wilayah Otaibah, Mutair, dan Ajman yang pada awalnya membantu Ibnu Saud untuk menguasai jazirah Arab. Namun, kelompok ini akhirnya berselisih jalan dengan Ibnu Saud dan memberontak pada tahun 1927-1930.

⁹⁸ Wahabi merupakan kelompok Islam yang puritan. Kelompok ini memiliki peran yang dominan di Arab Saudi dan merupakan mitra utama klan Saud dalam meneguhkan kekuasaan mereka di Arab Saudi. Secara teologis, ajaran Wahabi berasal dari Muhammad Ibn Abd al-Wahhab yang bersama-sama dengan Muhammad bin Saud berkerja sama untuk menyatukan suku-suku di jazirah Arab.

⁹⁹ Meski istilah radikal bisa diperdebatkan namun pilihan pada penggunaan kekerasan atau teror dalam kasus pendudukan Masjidil Haram membuat label radikal dapat digunakan terhadap kelompok ini. Hal ini untuk membedakan dari istilah revivalisme.

¹⁰⁰ Lihat misalnya William Ochsenwald, "Saudi Arabia and the Islamic Revival," *International Journal of Middle East Studies* 13, no. 3 (1981): 271-286. Untuk telaah dampak yang lebih panjang dari kebangkitan Islam pasca pendudukan Masjidil Haram terhadap revivalisme Islam Arab Saudi lihat R. Hrair Dekmejian, "The Rise of Political Islamism in Arab Saudi," *Middle East Journal* 48, no. 4 (1994): 627-643.

¹⁰¹ Rencana pengembangan senjata nuklir Iran sendiri sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 1960-an, Iran sudah memulai program nuklir dengan bantuan Amerika Serikat.

Di tahun yang sama, Iran memutuskan mengaktifkan kembali instalasi nuklirnya di Isfahan. IAEA akhirnya menyatakan status *non-compliance* Iran terhadap NPT *Safeguards Agreement* dan melaporkannya ke DK PBB yang di tahun 2006 memutuskan mengadopsi resolusi nomor 1737 untuk membekukan seluruh transaksi teknologi terkait nuklir ke Iran dan membekukan aset pihak-pihak yang terkait pengembangan nuklir Iran. Tahun 2007, DK PBB kembali mengadopsi resolusi 1747 yang membekukan penjualan senjata ke Iran¹⁰² dan membekukan aset-aset Iran. Resolusi tersebut mendapat dukungan dari semua negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia.

Meski nuklir bukanlah satu-satunya masalah dalam hubungan Arab Saudi dengan Iran, rencana pengembangan senjata nuklir Iran menjadi sumber ketakutan baru. Upaya Iran untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri nampak masif. Instalasi nuklir Iran ada di beberapa lokasi. Reaktor nuklir Iran ada di Arak, Fordo, Natanz, Isfahan, dan Bushehr. Sementara itu, reaktor penelitian Iran dibangun di Bonab, Ramsar, dan Teheran. Produksi uranium Iran dipusatkan di Saghand, Yazd, dan Gachin serta pangkalan militer Pachin menjadi basis militer untuk pengembangan senjata nuklir Iran. Dekonsentrasi instalasi tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kemandekan manakala ada serangan lawan seperti yang terjadi dalam kasus pengembangan senjata nuklir Iran.¹⁰³

Bagan 4. Lokasi Instalasi Nuklir Iran



¹⁰² Untuk lini masa yang lebih detil, lihat "Timeline of Iran Nuclear Activities," *The Iran Primer—USIP*, 17 Agustus 2021, <https://iranprimer.usip.org/resource/timeline-irans-nuclear-activities>.

¹⁰³ Wawancara dengan narasumber 7 April 2023. Berdasarkan observasi narasumber tersebut ketika bertugas di Iran tahun 2011-2016, dia meragukan bahwa Israel akan mampu melancarkan serangan seperti yang mereka lakukan di Irak mengingat kapabilitas militer Iran saat ini sangat superior di kawasan Timur Tengah.

Upaya pengembangan yang ekstensif tersebut mendorong negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mengupayakan skema kesepakatan damai dengan Iran yang terwujud dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (*Joint Comprehensive Plan of Action* atau JCPOA) tahun 2015. Kesepakatan tersebut berhasil dicapai karena kebijakan Presiden Obama yang cenderung akomodatif terhadap Iran dan memberikan otorisasi bagi pembicaraan rahasia antara Iran dengan Amerika Serikat dalam penyelesaian masalah nuklir.¹⁰⁴ Meski Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Trump, kemudian memutuskan untuk keluar dari JCPOA tahun 2018, namun kesepakatan tersebut mendorong Iran untuk melambatkan pengembangan senjata nuklirnya. Trump sendiri menilai bahwa pencabutan sanksi terhadap Iran, yang merupakan inti dari JCPOA, tidak membuat Iran menghentikan program nuklir mereka.¹⁰⁵ Meski demikian, intelijen Amerika Serikat memperkirakan bahwa kemampuan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir sangat “mengkhawatirkan”¹⁰⁶ dan hanya membutuhkan waktu “beberapa bulan saja”¹⁰⁷ bagi Iran untuk memiliki kapasitas membangun senjata nuklir. Apabila estimasi tersebut benar maka keamanan Arab Saudi ada dalam ancaman besar mengingat Iran telah memiliki kapabilitas misil yang memadai untuk melancarkan serangan ke wilayah Arab Saudi. *The Military Balance* tahun 2022 mencatat bahwa Iran memiliki hingga 50 misil jangka menengah, termasuk Shahab-3, dan hingga 100 misil jarak pendek, termasuk Shahab-1, Shahab-2, Fateh-110, Zolfaghar, dan Qiam-1.¹⁰⁸ Keseluruhan misil tersebut mampu menjangkau wilayah Arab Saudi. Selain itu, Iran juga dapat menggerakkan kelompok-kelompok pro-Iran di beberapa negara tetangga Arab Saudi, seperti misalnya kelompok Houthi di Yaman.¹⁰⁹ Salah satu narasumber menyampaikan bahwa beberapa kali terjadi serangan roket ke wilayah Arab Saudi yang berasal dari kelompok Houthi di Yaman. Sasaran utama dari serangan roket Houthi adalah kilang minyak dan serangan tersebut bahkan mencapai kilang minyak Yanbu, kilang minyak Abqaib dan Khurays yang relatif jauh dari perbatasan Yaman.¹¹⁰ Houthi juga menasar lapangan terbang seperti serangan yang mereka lakukan di King Khalid International Airport di Riyadh tanggal 4 November 2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kapabilitas tempur kelompok Houthi cukup mumpuni yang disebabkan oleh dukungan penuh dari Iran.

¹⁰⁴ Sanam Vakil, "Obama's Iranian Gamble," *The International Spectator* 49, no. 3 (2014): 8-13.; Mauro Lucentini, "The Obama Presidency and the 5+1 Agreement with Iran," *Rivista di Studi Politici Internazionali* 82, no. 3 (2015): 335-342.

¹⁰⁵ Kimberley Anne Nazareth, "Trump's Policy towards Iran," *World Affairs: The Journal of International Issues* 23, no. 2 (2019): 22-35.

¹⁰⁶ Sophia Barkoff, "CIA Director: Iran's Nuclear Program Advancing at 'Worrisome Pace'," *CBS News*, 26 Februari 2023, <https://www.cbsnews.com/news/william-burns-cia-director-iran-nuclear-program-face-the-nation-interview/>

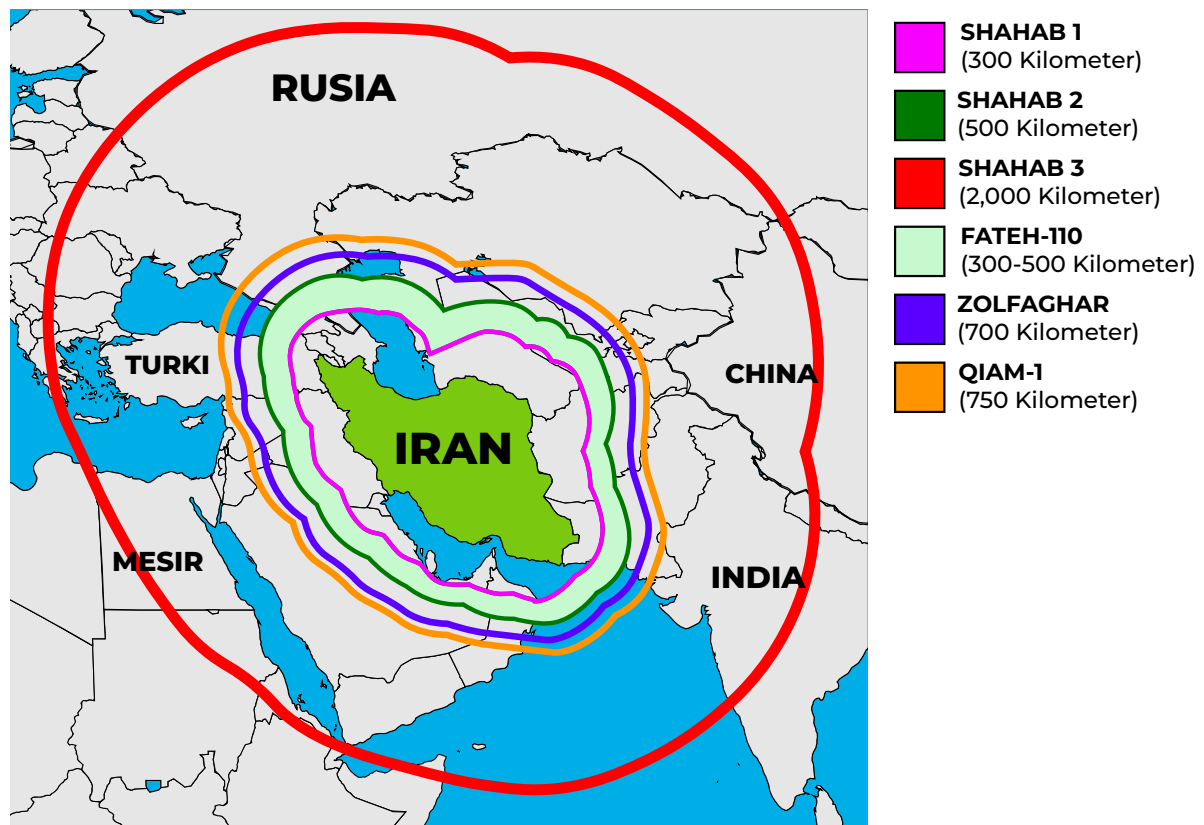
¹⁰⁷ Estimasi tersebut berdasarkan pada kesaksian Mark Milley, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, dalam rapat dengar pendapat Sub-Komisi Pertahanan pada bulan Maret 2023. Lihat dalam Paul K. Kerr, "Iran and Nuclear Weapon Production," *CRS In Focus*, 14 April 2023, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12106>.

¹⁰⁸ IISS, "Middle East and North Africa," *The Military Balance* 122, no. 1 (2022): 318-377.

¹⁰⁹ Wawancara dengan narasumber, 8 April 2023. Serangan tersebut terjadi tanggal 14 September 2019 menasar dua kilang minyak di pantai timur Arab Saudi.

¹¹⁰ Luca Nevola dan Ana Marco, "Beyond Riyadh: Houthi Cross-Border Aerial Warfare, 2015-2022," *The Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED)*, 17 Januari 2023, <https://acleddata.com/2023/01/17/beyond-riyadh-houthi-cross-border-aerial-warfare-2015-2022/>.

Bagan 5. Jangkauan Misil Iran



Selain karena faktor Iran, peningkatan hubungan antara Arab Saudi dan Israel juga didorong oleh faktor domestik. Sejak era Raja Khalid hingga Raja Abdullah, kekuatan Wahabi dalam politik di Arab Saudi sangatlah kuat. Hal tersebut terjadi karena mereka memberikan ruang bagi kelompok tersebut untuk tampil dominan sebagai dampak kebijakan yang lebih tegas dalam menjalankan hukum Islam. Pada saat bersamaan, publik Arab Saudi sendiri menghendaki adanya keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kerinduan akan masa lalu Arab Saudi yang modern ini yang ditangkap dengan baik oleh Raja Salman maupun Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS). Relaksasi atas implementasi hukum Islam kemudian menjadi kebijakan yang dominan, salah satunya melalui Visi Saudi 2030, yang membuat Arab Saudi secara perlahan membuka hubungannya dengan Israel.¹¹¹

Kemudian, jika melihat pada pola umum normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Israel, nampak adanya keterlibatan pihak ketiga. Dalam kasus Arab Saudi dan Israel, kedua negara memiliki kedekatan hubungan dengan Amerika Serikat.¹¹² Belakangan, keduanya juga membangun hubungan baik dengan Cina.¹¹³ Namun, langkah Cina memediasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran tahun 2023 ini memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel.

Untuk variabel ini, skor plus (+) diberikan karena hubungan antara Arab Saudi dan Israel sudah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, sama seperti dalam kasus Yordania maupun UEA, dan komprehensif di berbagai bidang terutama pada

¹¹¹ Hal ini akan dibahas dalam Peta Politik Arab Saudi.

¹¹² Hal ini akan dibahas dalam Kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah.

¹¹³ Hal ini akan dibahas dalam Kebijakan Cina di Timur Tengah.

fase peningkatan hubungan yang ketiga. Hubungan di berbagai bidang tersebut bisa menjadi pondasi untuk menciptakan perdamaian hangat dan bukan perdamaian dingin.

Pendorong Normalisasi

Pemetaan tentang faktor-faktor pendorong normalisasi hubungan diplomatik dilakukan dengan mengidentifikasi empat hal, yaitu: kondisi domestik Israel, kondisi domestik Arab Saudi, dan kebijakan negara-negara besar, dalam hal ini Amerika Serikat dan Cina.

Kondisi Domestik Israel: Peta Politik Israel (netral)

Usulan mengenai pembukaan hubungan diplomatik Israel dan Arab Saudi sering dikemukakan oleh Netanyahu. Dasar dari usulan tersebut adalah kebutuhan untuk membangun aliansi untuk meminimalkan pengaruh Iran dalam politik Timur Tengah serta justifikasi pendekatan ke negara-negara Arab dan Islam. Dalam konteks pertama, logika yang digunakan oleh Netanyahu adalah kesamaan persepsi ancaman yang dimiliki oleh Israel dan Arab Saudi. Hanya saja, dengan adanya normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran memunculkan pertanyaan apakah Arab Saudi dan Israel masih memiliki persepsi ancaman yang sama¹¹⁴. Dalam logika kedua, seberapa besar sebenarnya kekuatan politik Arab Saudi di Dunia Arab dan Dunia Islam¹¹⁵. Bagian ini menjelaskan peta politik Israel saat ini untuk melihat apakah usulan normalisasi merupakan hal diterima oleh elit-elit politik di Israel.

Untuk memetakan politik domestik Israel, hal pertama yang perlu dilihat adalah struktur formal dari pemerintahan Israel. Negara Yahudi tersebut menganut sistem parlementer dimana pemenang pemilihan umum akan diberi mandat untuk membangun koalisi pemerintahan. Spektrum politik Israel dapat diklasifikasikan ke dalam tipologi seperti digambarkan di Bagan 6 berikut. Dalam satu sumbu, ideologi politik di Israel dapat dibedakan dari apakah partai tersebut merupakan partai sayap kanan, belakangan muncul kategori ultra-kanan merujuk pada beberapa partai tertentu, tengah (*centrist*), atau kiri. Dalam sumbu yang lain, mereka dapat dibedakan sebagai partai religius atau sekuler. Dalam sejarah politik Israel, koalisi yang terbentuk biasanya mengarah ke tengah. Namun, hal tersebut tidak terjadi dalam pemerintahan Netanyahu saat ini.

Dalam sistem parlementer tersebut, kekuasaan politik/pemerintahan terbesar ada di tangan Perdana Menteri, sementara posisi kepala negara yang dipegang oleh Presiden terbatas dalam peran seremonial. Parlemen Israel, Knesset, bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan negara dan mengesahkan hukum. Perdana Menteri atau kepala pemerintahan bertugas membentuk pemerintahan dengan dukungan Knesset (voting mayoritas) dan menunjuk menteri-menteri yang akan mengisi kabinet. Presiden bertanggung jawab untuk mengesahkan kebijakan yang telah disetujui Knesset dan menunjuk Perdana Menteri berdasarkan rekomendasi ketua partai terbesar di Knesset.

Knesset sendiri memiliki 120 kursi yang diisi oleh representasi partai-partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum yang normalnya diadakan 4 tahun sekali.¹¹⁶ Calon

¹¹⁴ Hal ini akan dibahas dalam Kebijakan Cina di Timur Tengah.

¹¹⁵ Hal ini akan dibahas dalam Peta Politik Arab Saudi.

¹¹⁶ Pemilihan umum dapat diadakan kembali apabila pemimpin partai pemenang pemilihan umum yang diberikan mandat membentuk kabinet gagal dalam membentuk atau mempertahankan kabinetnya.

independen dapat mengikuti pemilihan umum dengan membentuk daftar calon legislatif gabungan (*joint list*). Langkah yang sama bisa dilakukan oleh partai-partai politik. Setelah terpilih, mereka bisa membubarkan diri dan menjadi anggota Knesset secara independen atau mewakili partai politiknya masing-masing. Sistem ini memungkinkan Knesset memiliki representasi dari partai-partai kecil atau anggota yang independen sehingga keputusan akhir Knesset umumnya inklusif.

Meski memiliki partai politik yang banyak, mereka dapat diklasifikasikan menjadi partai Arab (21.1%), partai Yahudi (73.9%), dan lainnya (5%). Partai Arab di Israel terdiri dari gabungan atau aliansi partai nasionalis Hadash, Balad, dan Ta'al yang disebut sebagai *Joint List* dan partai Ra'am yang merupakan partai Islam religius konservatif. Partai Yahudi terdiri dari beberapa partai. Yang pertama adalah partai sayap kanan Likud yang percaya bahwa hanya Netanyahu yang dapat memimpin dan membawa Israel menuju kejayaan eksistensial, solusi dua negara, dan ekonomi liberal. Selain partai sayap kanan ada juga partai ultra-kanan yang menghendaki pembentukan negara teokrasi Yahudi dimana penduduk non-Yahudi tidak memiliki hak pilih. Partai-partai ini juga tegas menyatakan penolakan mereka akan adanya etnis Arab di wilayah Israel. Partai Otzma Yehudit merupakan representasi dari kelompok ini dalam politik Israel.

Kemudian ada partai sekuler-kanan, yaitu Yisrael Beiteinu yang populer di kalangan imigran dan masyarakat sayap kanan. Kedua kelompok tersebut menjadi basis pendukung partai ini. Yisrael Beiteinu juga memiliki sikap tegas untuk menekan kontrol kaum Haredi¹¹⁷ terhadap Israel. Ketiga, deretan partai-partai tengah-liberal juga ada di Israel. Termasuk dalam kelompok partai ini adalah Yesh Atid yang populer di kalangan masyarakat Israel sekuler dan kelas menengah serta memegang prinsip liberal dalam isu-isu sosial. Kemudian ada partai sayap kiri seperti Meretz yang hanya populer dan memiliki basis massa di Tel Aviv dan Kibbutzim serta Partai Buruh yang popularitasnya terus menurun sejak era Barak. Kelima adalah kelompok partai religius nasionalis seperti Tkuma dan Yamina yang sama-sama ingin memperluas pendudukan Israel di Tepi Barat serta mendorong kebijakan keras (*hawkish*) dalam isu keamanan Israel. Kemudian ada partai-partai religius Haredi. Shas mewakili ideologi Mizrahi Haredim dan berkarakter religius dan konservatif. Mereka menolak kandidat perempuan dalam Knesset dan mendorong upah yang besar untuk keluarga yang besar. Mewakili ideologi Ashkenazi Haredim, terdapat partai *United Torah Judaism* (UTJ) yang selain religius juga menolak perubahan *status quo* pendudukan Israel dan mendukung kontrol Rabbi Ortodoks di Israel.

Israel sendiri memasuki periode krisis politik mulai tahun 2018 hingga 2022. Dalam kurun waktu kurang dari empat tahun tersebut, Israel mengadakan 5 kali pemilihan umum untuk memilih anggota Knesset. Periode tersebut dimulai saat Likud mengumumkan bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan pada bulan April 2019 akibat tekanan politik terhadap Netanyahu karena adanya tuduhan korupsi, penyogokan, dan penyalahgunaan kewenangan. Pemilihan umum tersebut memunculkan dua partai pemenang dimana Likud dan koalisi *Blue and White*¹¹⁸ yang merupakan gabungan beberapa partai tengah-liberal pimpinan Benny Gantz¹¹⁹ meraih dukungan yang setara, dengan masing-masing memenangkan 35 kursi. Parlemen kemudian mengusulkan Netanyahu menjadi Perdana Menteri dengan dukungan partai-partai sayap-kanan.

¹¹⁷ Haredi merupakan kelompok yang mengikuti hukum Yahudi secara tegas (strict). Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok ultra-Orthodoks. Mereka menilai kelompok mereka merupakan Yahudi yang sesungguhnya meski klaim tersebut mendapat penolakan dari kelompok-kelompok Yahudi lain.

¹¹⁸ Koalisi ini beranggotakan Hosen L'Yisrael, Yesh Atid, dan Telem.

¹¹⁹ Benny Gantz merupakan pimpinan partai Hosen L'Yisrael.

Beberapa minggu setelah kemenangan tersebut, Netanyahu ternyata gagal membentuk kabinet akibat tidak mampu mendapatkan suara mayoritas Knesset (membutuhkan minimum 61 suara). Karena deadline pembentukan kabinet sudah lewat, Knesset memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum ulang.

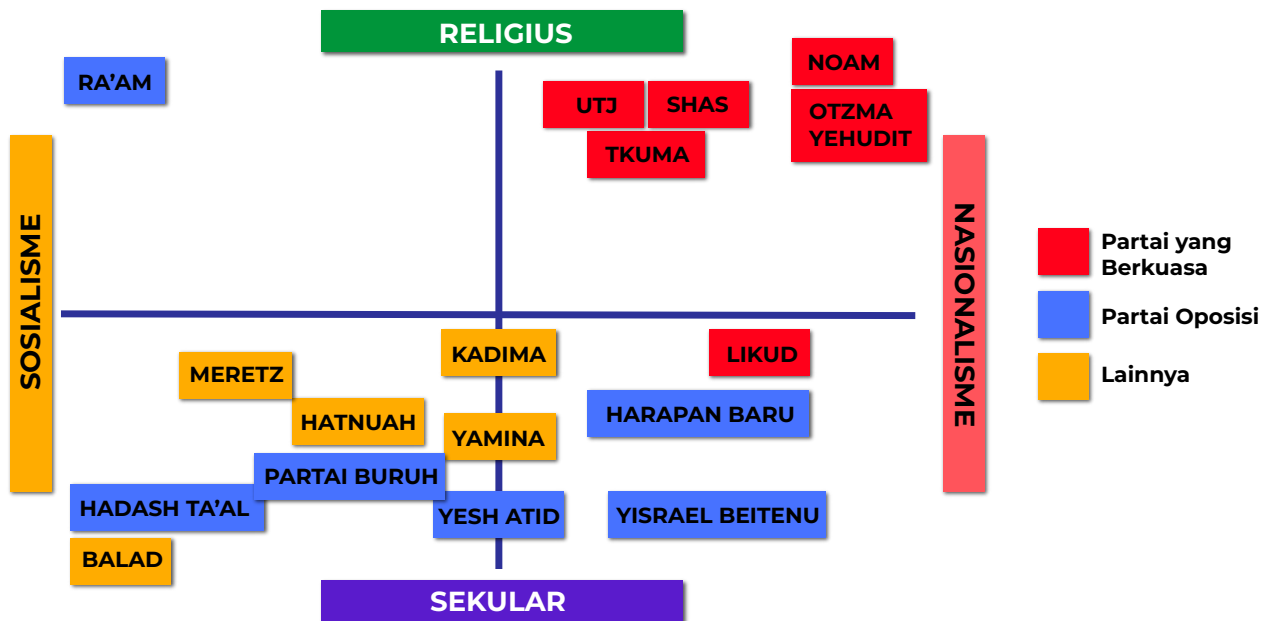
Pemilihan umum kemudian diadakan tanggal 17 September 2019 dimana koalisi *Blue and White* memenangkan 33 kursi sedangkan Likud 32 kursi. Netanyahu mengusulkan agar Gantz bergabung dengan Likud, namun tetap tidak mencapai kata sepakat dan mampu meraih suara mayoritas Knesset. Presiden Israel, Reuven Rivlin, kemudian memerintahkan Netanyahu untuk membentuk kabinet pemerintahan, namun gagal. Gantz menolak ajakan Netanyahu dengan alasan Netanyahu tersandung kasus korupsi. Presiden Rivlin kemudian menyerahkan tugas pembentukan kabinet tersebut pada Gantz, namun juga gagal. Jaksa Agung akhirnya menetapkan penuntutan Netanyahu dengan pasal korupsi, penyogokan, dan penyalahgunaan wewenang. Netanyahu mengelak dan melihat langkah sebagai upaya untuk menyingkirkan dirinya dari kursi pemerintahan. Karena deadline pembentukan kabinet kembali terlewat, Knesset memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum ulang.

Pemilihan umum kembali diadakan pada 2 Maret 2020 dengan Likud mendapatkan 36 kursi dan menjadi pemenang. Netanyahu dan Gantz akhirnya sepakat untuk membuat perjanjian koalisi. Likud dan koalisi *Blue and White* menandatangani kesepakatan rotasi untuk membentuk pemerintahan darurat bersama dengan pembagian waktu kekuasaan (18 bulan pertama dipimpin Netanyahu dan 18 setelahnya dipimpin Gantz). Perjanjian ini menuai kecaman keras dari masyarakat dibuktikan dengan terjadinya demo besar-besaran di Tel Aviv karena menilai perjanjian tersebut berpotensi mengancam demokrasi di Israel karena tidak adanya oposisi. Meski dikelilingi penolakan, Mahkamah Agung tetap mengesahkan perjanjian tersebut.

Belum berganti tahun kabinet bersama ini kolaps akibat ketidaksepakatan anggaran dan beberapa masalah lainnya. Netanyahu menuntut kabinet ini untuk memasukkan aliansi partai sayap-kanan dan partai religius sedangkan Gantz menolak menuruti kemauan Likud selama Netanyahu masih dalam persidangan kasus hukum. Kedua pihak juga memiliki visi berbeda soal bantuan Amerika Serikat bagi Palestina. Gantz masih menginginkan adanya perundingan damai dengan Palestina sedangkan Netanyahu dan Presiden Trump tidak menghendaki hal tersebut. Melalui negosiasi politik yang panjang yang tidak menunjukkan tanda-tanda adanya titik temu, Presiden Rivlin terpaksa mengadakan pemilihan umum kembali.

Pada 23 Maret 2021, pemilihan umum kembali diadakan. Likud berhasil memenangkan 30 kursi sedangkan Yesh Atid mendapatkan 17 kursi dan partai-partai lainnya mendapatkan kurang dari 10 kursi. Netanyahu yang memiliki waktu untuk membuat kabinet sampai tanggal 4 Mei 2021 ternyata mengalami kegagalan. Perintah pembentukan kabinet kemudian diberikan pada Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid, yang melakukan perbincangan koalisi dengan Naftali Bennet dari Partai Yamina. Pada 30 Mei 2021, Lapid dan Bennet mengumumkan pembentukan kabinet bersama dengan Bennet sebagai Perdana Menteri dan Lapid sebagai alternatif. Keduanya kemudian berhasil membentuk koalisi mayoritas dengan mengumpulkan pihak-pihak yang ingin menciptakan pemerintahan non-Netanyahu dan mengesahkan anggaran. Meski demikian, koalisi yang terdiri dari partai-partai liberal, religius, dan partai-partai lain yang anti-Netanyahu ini rentan dan rapuh. Koalisi tersebut akhirnya bubar dan memicu pemilu untuk digelar kembali. Pada tanggal 1 November 2022, pemilihan umum diadakan dimana Likud meraih kursi terbanyak (32 kursi). Posisi kedua ditempati oleh Yesh Atid dengan 24 kursi. Netanyahu kemudian mengumumkan bahwa dirinya telah berhasil membentuk koalisi dengan total 64 suara. Kabinet akhirnya disahkan pada 29 Desember 2022 dengan Netanyahu sebagai Perdana Menteri.

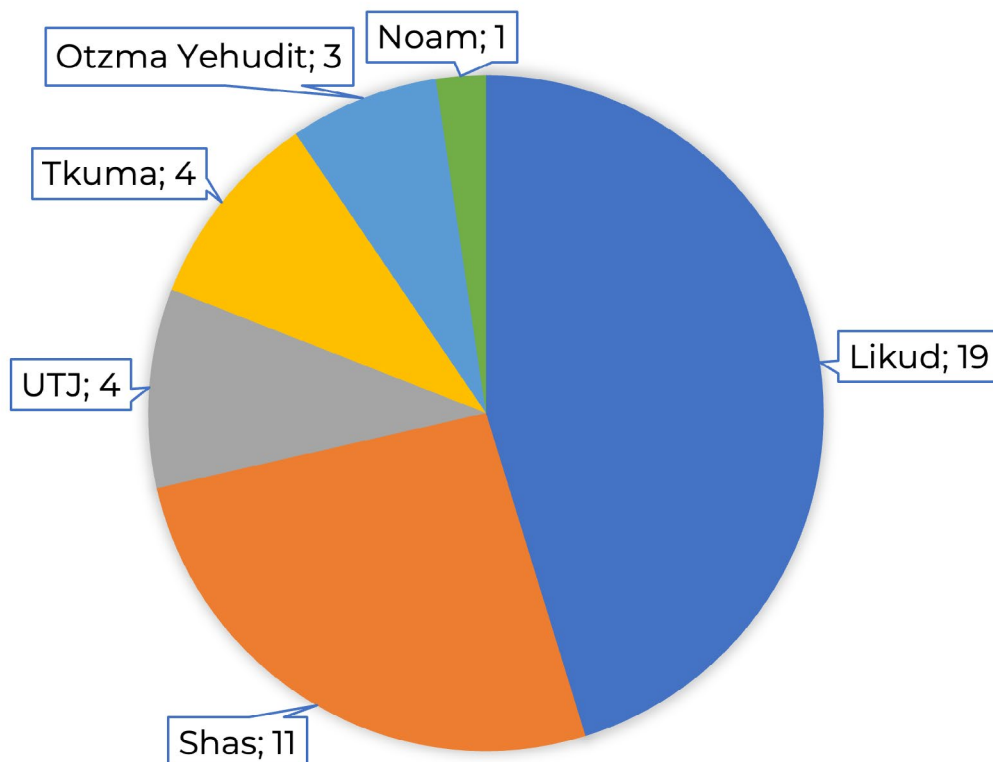
Bagan 6. Peta Politik Di Israel



Meski belakangan ini, politik internal Israel tidak pernah stabil dan kompleks dan partai-partai politik sangat cepat dilebur, berkoalisi, atau dibentuk baru untuk menyesuaikan kebutuhan pemilihan umum, Netanyahu secara konsisten berada pada posisi penting. Netanyahu menjadi figur sentral dalam politik Israel pasca berakhirnya era Ariel Sharon. Netanyahu mengambil alih kepemimpinan di Partai Likud, salah satu partai sayap kanan di Israel, setelah Sharon meninggalkan partai tersebut untuk membentuk Partai Kadima. Netanyahu beberapa kali menjadi Perdana Menteri Israel. Netanyahu pertama kali menjadi Perdana Menteri Israel pada 18 Juni 1996 menggantikan Shimon Peres. Kabinet ini merupakan kabinet tengah-kanan religius. Jabatan pertamanya ini berakhir tanggal 6 Juli 1999. Meski berasal dari partai sayap kanan, Netanyahu menandatangani Kesepakatan Wye River dengan Palestina tahun 1998 yang membuatnya kehilangan dukungan dari kelompok sayap kanan di Likud. Beberapa skandal keuangan yang melibatkan Netanyahu semakin memperburuk posisi politiknya hingga akhirnya kalah dalam pemilu melawan Ehud Barak. Sejak saat itu, Netanyahu menghilang dari peta politik Israel dan baru kembali ketika Sharon menjadi Perdana Menteri dan menawarkan jabatan Menteri Keuangan kepadanya tahun 2003. Pasca keluarnya Sharon dari Likud, Netanyahu memimpin partai tersebut sebagai oposisi hingga akhirnya menang dalam pemilu tahun 2009.

Periode kedua kepemimpinan Netanyahu dimulai tanggal 31 Maret 2009 hingga 13 Juni 2021 dalam empat periode yang berbeda, yaitu: 31 Maret 2009-18 Maret 2013, 18 Maret 2013-14 Mei 2015, 14 Mei 2015-17 Mei 2020, dan 17 Mei 2020-13 Juni 2021. Keempat periode tersebut dibangun sebagai koalisi tengah-kanan meski mayoritas anggota kabinet berasal dari partai-partai sayap kanan dan religius. Namun, periode ketiga pemerintahan Netanyahu dari 29 Desember 2022 hingga saat ini diisi oleh partai-partai sayap kanan dan religius dengan tanpa ada perwakilan partai tengah sama sekali. Hal ini nampak dalam komposisi pemerintahan Netanyahu. Dari komposisi tersebut, beberapa pos penting seperti Menteri Pemukiman Yahudi dipegang oleh UTJ yang berideologi religius-kanan, Menteri Keuangan dipegang oleh Tkuma yang ideologi religius-kanan jauh. Selain itu, posisi Menteri Keamanan dipegang oleh Otzma Yehudit yang senafas dengan Tkuma. Keberadaan sosok-sosok kanan maupun kanan-jauh tersebut membuat pemerintahan Netanyahu memiliki garis kebijakan yang keras dalam urusan Palestina.

Bagan 7. Komposisi Kabinet Netanyahu Sejak 29 Desember 2022



Rekam jejak Netanyahu sendiri konsisten menunjukkan ideologi politik sayap kanan. Selain itu, Netanyahu juga merupakan ahli ekonomi yang brilian. Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan, Netanyahu melakukan kocok ulang ekonomi untuk menghasilkan program omnibus dengan pendekatan yang ramah bisnis dan prinsip ekonomi “*supply-side*” untuk menjaga perputaran tabungan dalam pasar modal Israel. Reformasi Netanyahu tersebut mampu menyelamatkan ekonomi Israel dari resesi dimana Israel kemudian menjadi “*high-tech powerhouse*” dan menarik banyak sekali investor asing. Pada periode kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri, kebijakan ekonomi Netanyahu mengalami pergeseran. Tahun 2013, Netanyahu mengembangkan visi geopolitik-ekonomi dimana dia menganut segitiga kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan kekuatan geopolitik sebagai fokus kebijakan. Netanyahu memaksimalkan kekuatan ekonomi Israel melalui liberalisasi dan privatisasi untuk menarik banyak sekali investor asing.

Pandangan politik Netanyahu mengenai konflik Palestina-Israel juga radikal. Menurut Netanyahu, solusi dua negara adalah hubungan yang kompleks dan penuh perubahan. Tahun 2009, Netanyahu berpidato menentang negara Palestina. Pada 2015, posisi Netanyahu terhadap Palestina mengalami pergeseran dengan mendukung ide “*demilitarized Palestinian state*”. Namun, setelah pernyataan tersebut, Netanyahu kembali menentang pembentukan negara Palestina, termasuk menentang penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat. Netanyahu selalu dengan tegas menghindari komitmen terhadap solusi dua negara.

Netanyahu bersedia memberikan otonomi bagi Palestina, namun bukan sebagai negara utuh yang independen. Pada bulan Oktober 2019, Netanyahu menyatakan bahwa dia menginginkan “*a Palestinian state-minus, autonomy-plus, autonomy plus-plus*” dimana warga Palestina memiliki kemampuan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, namun tidak memiliki kekuatan untuk mengancam Israel atau hanya Israel yang boleh bertanggung jawab atas masalah keamanan.

Dengan kondisi tersebut, cenderung sulit bagi partai-partai tengah-liberal untuk membangun koalisi pemerintahan mengingat politik Israel didominasi oleh partai-partai sayap kanan-relijius. Partai-partai sayap kanan-relijius ini cenderung tidak terlalu mempertimbangkan isu-isu luar negeri. Namun, mereka memberikan perhatian pada isu Palestina secara khusus.¹²⁰ Hal ini terkait dengan keinginan untuk membentuk negara Israel Raya (bagi partai-partai sayap kanan) dan negara Yahudi (bagi partai-partai religius). Dengan demikian, tidak mengherankan jika kebijakan yang diambil oleh koalisi pemerintahan Israel cukup radikal terhadap Palestina. Sebagai gambaran, Itamar Ben-Gvir¹²¹ tidak jarang memberikan pernyataan yang provokatif untuk mendorong warga Yahudi untuk menggunakan kekerasan terhadap warga Palestina. Tindakan Ben-Gvir bahkan membuat Kepala Badan Intelijen Domestik Israel, Ronen Bar, menyampaikan komplain terbuka.¹²² Ben-Gvir juga tidak ragu untuk menghambat finalisasi anggaran manakala dia merasa bahwa anggaran untuk perluasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat tidak memadai.¹²³

Isu pemukiman Yahudi menjadi salah satu kendala utama untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Netanyahu sendiri secara konsisten mendorong perluasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk di wilayah-wilayah sengketa.¹²⁴ Peta pemukiman Yahudi dari B'tselem memperlihatkan bagaimana perluasan tersebut berkontribusi pada semakin kompleksnya penyelesaian konflik Palestina-Israel.¹²⁵ Perluasan tersebut juga berkontribusi pada kemenangan partai-partai sayap kanan mengingat pemukiman tersebut digunakan untuk mengakomodasi basis massa mereka. Namun, di sisi yang lain, perluasan pemukiman Yahudi tersebut menciptakan gejolak dari warga Palestina yang tergusur dan berakhir dengan bentrokan.

Dalam kondisi saat ini, partai-partai yang berkuasa di Israel tidak terlalu hirau dengan perkembangan regional, termasuk memikirkan secara serius isu normalisasi hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Salah satu narasumber menyatakan bahwa problem utama Israel saat ini adalah mencegah kemunduran demokrasi akibat terlalu kuatnya posisi partai-partai sayap kanan.¹²⁶ Hal ini akan membuat isu normalisasi hubungan diplomatik dengan Arab Saudi tidak akan mendapatkan fokus utama, meski juga tidak mendapat penolakan. Dengan demikian, skor yang diberikan untuk variabel adalah netral.

¹²⁰ Isu Palestina seringkali dipandang sebagai isu domestik.

¹²¹ Ben-Gvir berasal dari partai Otzma Yehudit yang merupakan partai ultra-kanan.

¹²² "Shin Bet Chief Said to Warn Ben Gvir He is Inciting Violence in East Jerusalem," *The Times of Israel*, 16 Februari 2023, <https://www.timesofisrael.com/shin-bet-chief-said-to-warn-ben-gvir-he-is-inciting-violence-in-east-jerusalem/>

¹²³ Carrie Keller-Lynn, "Ben Gvir Says Party Opposes Budget over Lack of Funds 'to Judaize Negev and Galilee'," *The Times of Israel*, 14 Mei 2023, <https://www.timesofisrael.com/ben-gvir-says-party-opposes-budget-over-lack-of-funds-to-judaize-negev-and-galilee/>.

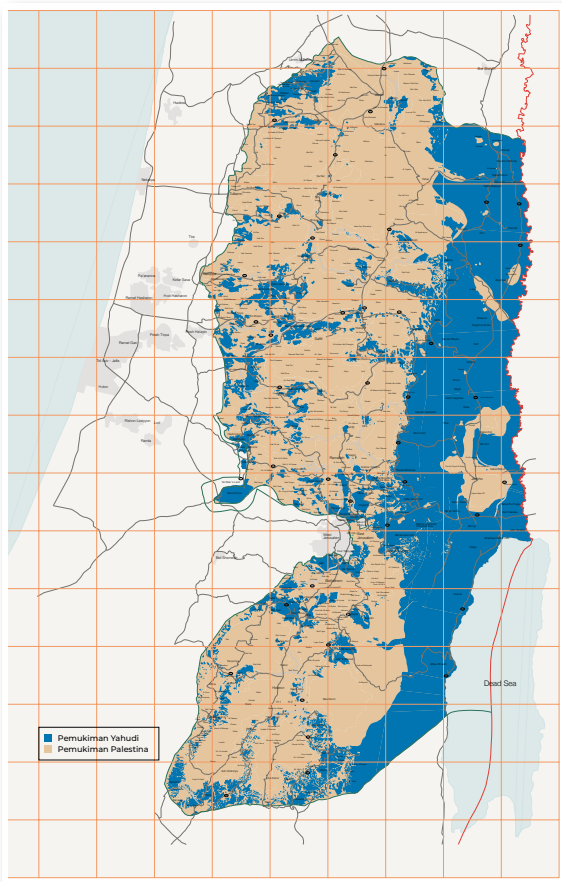
¹²⁴ Broto Wardoyo, "Proposal "Deal of the Century" dan Dampaknya bagi Proses Perdamaian Palestina-Israel," *Andalas Journal of International Studies* 10, no. 2 (2021): 171-191.

¹²⁵ "Jewish Settlements in the West Bank - B'tselem," *B'tselem*, Maret 2002, https://www.btselem.org/download/settlements_map_eng.pdf; "וישכע מולש - תיבה דומע," *Peace Now*, 2019, http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/08/settlements_map_eng-2019.pdf.

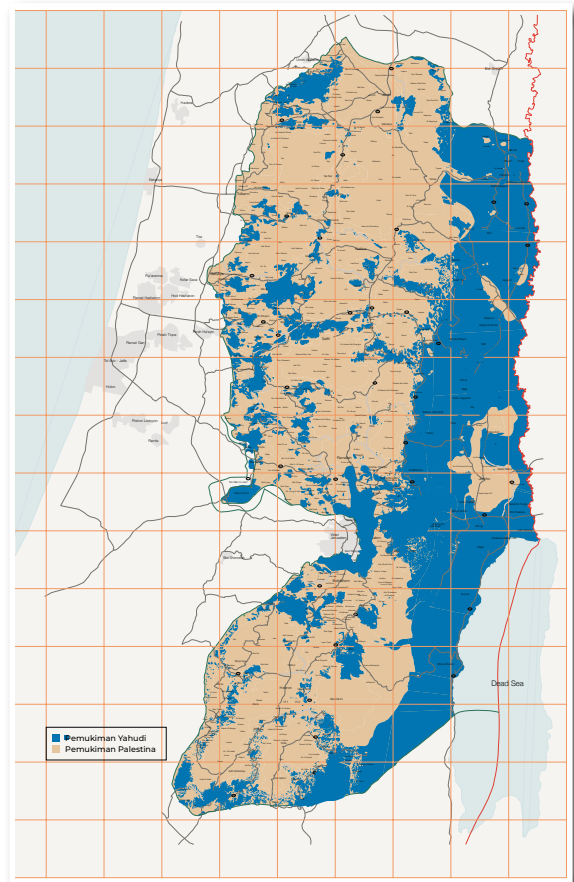
¹²⁶ Wawancara dengan narasumber, 11 April 2023.

Bagan 8. Perkembangan Pemukiman Yahudi Di Tepi Barat

2002



2019



Kondisi Domestik Arab Saudi: Peta Politik Arab Saudi (+)

Hal kedua yang perlu dipertimbangkan adalah peta politik domestik di Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara monarki yang saat ini dipimpin oleh Raja Salman. Namun, banyak pengamat menilai bahwa penguasa de facto Arab Saudi adalah Putra Mahkota MBS yang pada 22 September 2022 diangkat sebagai Perdana Menteri.¹²⁷ MBS lahir pada 31 Agustus 1985 di Jeddah dan merupakan anak tertua Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dari istri ketiganya, Fahda binti Falah bin Sultan. MBS menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, King Saud University, Riyadh. Pengangkatan MBS sebagai Putra Mahkota merupakan hal yang mengejutkan mengingat dia belum memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Hal tersebut berbeda dari praktik umum yang biasanya dilakukan di Arab Saudi dimana Putra Mahkota yang merupakan calon raja telah memiliki tour of duty di beberapa pos ekonomi, keamanan, dan hubungan luar negeri.

Pada tahun 2015, setelah Raja Salman berkuasa, MBS ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. MBS kemudian memimpin intervensi militer Arab Saudi dalam Perang Sipil Yaman untuk memadamkan pemberontakan kelompok Houthi. Sebagai Menteri

¹²⁷ "Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman Named PM," *Al Jazeera*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2022/9/27/saudis-crown-prince-mohammed-bin-salman-appointed-prime-minister>.

Pertahanan, MBS juga terlibat dalam pengawasan anggaran dan pengadaan militer Arab Saudi, termasuk perdagangan senjata yang nilainya mencapai 110 miliar USD dari Amerika Serikat pada tahun 2017. Pada tahun 2017¹²⁸, MBS ditunjuk sebagai Putra Mahkota untuk menggantikan sepupunya, Pangeran Mohammed bin Nayef (MBN). Sejak saat itu, MBS mulai memperkenalkan program reformasi ekonomi dan sosial-budaya yang ambisius, yang dikenal sebagai Saudi Vision 2030. Program tersebut bertujuan untuk memodernisasi perekonomian dan masyarakat Arab Saudi dan menjadi program sentral MBS.

Dalam dokumen resmi Saudi Vision 2030 disebutkan bahwa tujuan dari program tersebut adalah menjadikan Arab Saudi sebagai jantung dari Dunia Arab dan Islam, tokoh sentral dalam investasi, dan penghubung dari tiga benua (Asia, Afrika, dan Eropa).¹²⁹ Ada tiga besar yang diusung dalam Saudi Vision 2030, yaitu: membentuk masyarakat modern, membangun ekonomi yang mapan, dan menciptakan bangsa yang besar. Modernitas dipandang sebagai prasyarat atau fondasi untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Tema kedua disinkronkan dengan upaya membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat Arab Saudi untuk mendapatkan pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan pasar, menciptakan kesempatan bagi pengusaha, UMKM, serta korporasi besar. Selanjutnya, bangsa yang besar menjadi dasar untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan memiliki performa tinggi. Dalam setiap tema tersebut terdapat beberapa sorotan tema yang lebih detail dan tujuannya masing-masing.

Tema masyarakat modern dibagi lebih jauh ke dalam tiga komitmen yang lebih spesifik, yakni: membangun masyarakat yang bersemangat dengan akar yang kuat, hidup berkecukupan, dan memiliki pondasi yang kokoh. Akar yang kuat berarti pembangunan akan difokuskan pada identitas masyarakat Arab Saudi, yang tetap mengedepankan kepercayaan Islamis dan persatuan nasional. Membangun masyarakat dengan akar yang kuat ditujukan untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu: peningkatan kapasitas peziarah umrah dari delapan juta menjadi tiga puluh juta per tahun dan memperbanyak situs warisan budaya Arab Saudi yang diakui oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (*The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* atau UNESCO) sebagai objek wisata. Untuk menunjang masyarakat yang hidup berkecukupan, Saudi Vision 2030 menargetkan ada tiga kota di Arab Saudi yang masuk ke dalam peringkat seratus besar kota terbaik di dunia, peningkatan anggaran negara untuk aktivitas kultural dan hiburan di kerajaan dari 2,9% menjadi 6 %, dan meningkatkan rasio individu yang berolahraga dari 13% menjadi 40% dari total populasi. Terakhir, membangun masyarakat yang bersemangat dengan fondasi yang kuat berarti mempromosikan dan menyegarkan kembali perkembangan sosial untuk menunjang sebuah masyarakat yang produktif dan kuat. Tema ini ditargetkan untuk meningkatkan posisi Arab Saudi di Indeks Sosial Kapital dari posisi 26 ke posisi 10 dan meningkatkan angka harapan hidup dari 74 menjadi 80.

Tema perkembangan ekonomi dibagi ke dalam empat tema yang lebih spesifik, yakni: mengembangkan ekonomi yang memberikan peluang bermanfaat, investasi jangka panjang, keterbukaan terhadap bisnis, dan manfaat terhadap posisi unik Arab Saudi. Pengembangan ekonomi yang memberikan peluang bermanfaat bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dari 11,6% menjadi 7%, meningkatkan kontribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) pada GDP dari 20% menjadi 35%, dan meningkatkan keterlibatan perempuan pada ketenagakerjaan dari 22% menjadi 30%. Tema investasi

¹²⁸ Javier E David, "US-Saudi Arabia Seal Weapons Deal Worth Nearly \$110 Billion Immediately, \$350 Billion over 10 Years," *CNBC*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html>.

¹²⁹ "Vision 2030," *Saudi Vision 2030*, 2022, <https://www.vision2030.gov.sa/v2030/overview/>

jangka panjang ditargetkan untuk mencapai posisi 15 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, meningkatkan lokalisasi minyak dan gas hingga 75%, dan meningkatkan aset dana investasi publik hingga lebih dari 7 triliun. Di sisi lain, keterbukaan terhadap bisnis bertujuan untuk masuk dalam sepuluh besar negara paling kompetitif di dunia, meningkatkan investasi asing hingga 5,7% dari PDB, dan meningkatkan kontribusi sektor privat hingga 65% PDB. Terakhir, untuk memanfaatkan posisi uniknya, Arab Saudi bertujuan untuk meningkatkan performa logistik dan meningkatkan kontribusi ekspor non-minyak pada PDB hingga 50%.

Tema terakhir yakni bangsa ambisius dibagi ke dalam dua tema yang lebih spesifik, yaitu: bangsa ambisius yang dikelola secara efektif, dan diaktifkan secara bertanggung jawab. Tema pertama ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor non minyak sebesar 1 triliun, meningkatkan indeks efektivitas pemerintah dari 80 menjadi 20, dan masuk ke dalam 5 besar negara dengan pemerintahan elektronik terbaik dunia. Tema kedua ditujukan untuk mencapai peningkatan simpanan rumah tangga, peningkatan kontribusi sektor non-profit dan mencapai 1 juta relawan tiap tahunnya.

Untuk mencapai target-target di atas pada tahun 2030, Arab Saudi melaksanakan beberapa program yang terdiri dari restrukturisasi pemerintah, arahan strategis, penyeimbangan fiskal, manajemen proyek, peninjauan kembali aturan, pengukuran performa, transformasi strategis Saudi Aramco, restrukturisasi dana investasi publik, sumber daya manusia, transformasi nasional, penguatan pemerintahan pada sektor publik, privatisasi, dan kemitraan strategis.

Untuk menjalankan ambisi tersebut, setelah menjadi Putra Mahkota MBS pun melakukan konsolidasi kekuasaan. MBS melakukan penangkapan beberapa figur penting di Arab Saudi tahun 2017 dengan alasan kampanye anti-korupsi. Langkah tersebut menasar beberapa orang yang menghambat rencana ambisius MBS. MBS juga mengeliminasi para pengganggu yang konsisten mengkritik dirinya atau kebijakan yang dia ambil. Salah satu yang menjadi korban adalah Jamal Khashoggi, jurnalis Washington Post yang rutin mengkritik MBS.¹³⁰ Langkah-langkah konsolidasi kekuasaan tersebut dilakukan untuk memastikan program Saudi Vision 2030 berjalan dengan baik. Beberapa lawan politik MBS akhirnya berhasil dieliminasi dan sebagian lainnya memutuskan untuk memberikan loyalitas pada MBS. Namun, kasus-kasus tersebut juga membuat MBS dikritik karena sikap otoriternya dalam menjalankan pemerintahan.

Langkah konsolidasi kekuasaan MBS yang berlangsung dalam waktu singkat, meski sebenarnya tidak lazim, memperlihatkan bahwa dia memiliki dukungan kekuasaan yang kuat. Dukungan semacam itu, dalam politik di Arab Saudi, hanya dimiliki oleh Raja. Terlepas dari hal tersebut, langkah-langkah MBS berhasil memastikan adanya tokoh-tokoh kunci di lingkaran kekuasaannya yang loyal kepada dirinya untuk menjamin posisi politik dan implementasi program ekonomi dan sosial-budaya yang dia bawa. Bagan berikut adalah peta lingkaran kekuasaan MBS di Arab Saudi.

¹³⁰ Meski tidak dinyatakan terbukti oleh pengadilan Arab Saudi, namun laporan dinas intelijen Amerika Serikat menyebutkan adanya keterlibatan MBS dalam pembunuhan Khashoggi. Lihat dalam *"Assessing the Saudi Government's Role in the Killing of Jamal Khashoggi,"* 11 Februari 2021, <https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Assessment-Saudi-Gov-Role-in-JK-Death-20210226v2.pdf>

Bagan 9. Lingkaran Kekuasaan Mohammed bin Salman



Dari lingkaran kekuasaan tersebut, ada beberapa orang yang merupakan aktor penting dalam menopang kekuasaan MBS. Pertama, Saud al-Qahtani, seorang mantan penasihat Kantor Kerajaan (*Royal Court*) yang memainkan peran penting dalam kampanye “anti korupsi” MBS di tahun 2017. Namun, al-Qahtani terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi yang membuatnya dipecat dari jabatannya. Meski demikian, dia tetap menjadi salah satu orang kepercayaan MBS di bidang keamanan. Kedua, Turki Al-Sheikh yang juga seorang mantan penasihat Kantor Kerajaan yang kemudian ditunjuk sebagai kepala *General Entertainment Authority* pada tahun 2016. Al-Sheikh membantu MBS dalam promosi reformasi kultural di Arab Saudi. Ketiga, Yasir Al-Rumayyan yang diangkat MBS sebagai Ketua *Public Investment Fund* (PIF). Al-Rumayyan terlibat dalam beberapa kesepakatan investasi tingkat tinggi, seperti akuisisi Tesla. Keempat, Fahad Al-Mubarak, Gubernur Saudi *Arabian Monetary Authority* (SAMA) atau Bank Sentral Saudi yang juga berperan dalam implementasi reformasi ekonomi di Arab Saudi. Dari keluarga kerajaan, ada dua tokoh yang dikenal dekat dengan MBS. Yang pertama adalah Pangeran Khalid bin Salman, adik MBS yang juga Menteri Pertahanan Arab Saudi serta sebelumnya merupakan Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat. Pangeran Khalid, sama seperti MBS, terlibat dalam operasi militer di Yaman. Berikutnya adalah Pangeran Abdulaziz bin Salman, Menteri Energi yang juga merupakan anak Raja Salman. Pangeran Abdulaziz terlibat secara intens dalam reformasi ekonomi di Arab Saudi melalui implementasi Saudi Vision 2030.

Meski kekuasaan MBS semakin besar, tidak berarti tidak ada oposisi yang menentang kekuasaan dan kebijakan yang dia ambil. Oposisi pertama datang dari para ulama konservatif. Mereka menilai implementasi Saudi Vision 2030 sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional Wahabi. Saudi Vision 2030 yang sering disebut sebagai liberalisasi Arab Saudi ini sebenarnya merupakan upaya untuk mengembalikan wajah modern Arab Saudi di era Raja Faisal. Salah satu narasumber menekankan bahwa pada tingkatan akar rumput, kebijakan tersebut mendapatkan dukungan publik.¹³¹ Dia menyampaikan bahwa di sebelum era kepemimpinan Raja Salman, kehendak publik

¹³¹ Wawancara dengan narasumber, 8 April 2023.

terhadap kebebasan sebenarnya sudah sangat besar. Bahkan, tidak jarang warga Arab Saudi rela menyeberang ke Bahrain untuk menikmati kehidupan yang lebih bebas/liberal seperti diperkenankan untuk menonton bioskop. Hal-hal semacam itu tidak dapat dinikmati di Arab Saudi sejak era Raja Khalid yang menjalankan kebijakan religius yang lebih keras. Dalam konteks ini, penolakan dari kelompok ulama Wahabi juga didorong oleh berkurangnya peran dan kewenangan mereka dalam kehidupan bernegara di Arab Saudi.

Oposisi selanjutnya adalah kelompok aktivis. Mereka mengkampanyekan beberapa isu yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi, seperti "*male guardianship system*". Tokoh-tokoh seperti Loujain Al-Hathloul beberapa kali ditangkap dalam rentang 2014-2021 karena aktivitas mereka. Kemudian ada juga kelompok pejuang hak asasi manusia (HAM), termasuk organisasi HAM internasional seperti *Human Rights Watch* yang mengkritisi pelanggaran HAM pada kepemimpinan MBS. Kasus-kasus seperti pembunuhan Khashoggi, penangkapan aktivis, dan intervensi Yaman merupakan beberapa hal yang sering mereka serukan. MBS juga memiliki oposisi dari kalangan kerajaan. Beberapa anggota keluarga kerajaan, seperti Pangeran Ahmed bin Abdulaziz, yang merupakan satu satunya saudara kandung Raja Salman yang masih hidup.¹³²

Pangeran Ahmed akhirnya ditahan oleh MBS di tahun 2020.¹³³ Dia memiliki pandangan yang konservatif terhadap reformasi ekonomi dan sosial di Arab Saudi yang dibawa oleh MBS. Kemudian, ada beberapa pangeran yang menjadi korban kampanye anti-korupsi tahun 2017. Langkah MBS tersebut menuai kontroversi lantaran usaha tersebut dinilai sebagai cara MBS untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya tanpa ada gangguan dari pihak-pihak tertentu. Mereka yang ditangkap antara lain: Pangeran Alweed bin Talal, pebisnis Arab Saudi yang dikenal karena investasinya pada Citigroup dan Twitter, Pangeran Miteb bin Abdullah, mantan kepala *Saudi Arabian National Guard* dan anak dari Raja Abdullah, Pangeran Turki bin Abdullah yang juga anak dari Raja Abdullah dan mantan Gubernur Riyadh¹³⁴. Langkah kampanye anti-korupsi tersebut juga menyasar kalangan kebanyakan seperti Adel Fakeih, mantan menteri ekonomi yang sebenarnya pernah menjadi sahabat dekat MBS, Bakr bin Laden, Ketua Saudi Binladin Group, firma konstruksi terbesar di Saudi, Saleh Kamel, seorang pebisnis ulung yang mendirikan Dallah Al-Baraka Group dan memiliki kepentingan besar di perbankan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, Saud Al-Tobaishi, seorang pejabat militer senior yang bertugas di angkatan laut Saudi, dan Ibrahim Al-Assaf, mantan menteri finansial dan penasehat yang dekat dengan Raja Salman.

Salah satu lawan politik terbesar MBS dari keluarga kerajaan adalah Mohammed bin Nayef (MBN). MBN pernah menjadi pejabat tinggi pemerintahan. Dia merupakan anak dari Pangeran Nayef bin Abdulaziz Al Saud. MBN memulai karir politiknya di pemerintahan Arab Saudi di tahun 1978. Dirinya bertugas di Kementerian Dalam Negeri sebagai Pejabat Menteri Dalam Negeri selama lebih dari satu dekade sebelum diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri di tahun 2012, menyusul kematian ayahnya. Sebagai

¹³² "In Saudi Arabia, Criticism of MBS Increases after Oil Attack," *Al Jazeera*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2019/10/3/in-saudi-arabia-criticism-of-mbs-increases-after-oil-attack>.

¹³³ David D Kirkpatrick and Ben Hubbard, "Saudi Prince Detains Senior Members of Royal Family," *The New York Times*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://www.nytimes.com/2020/03/06/world/middleeast/saudi-royal-arrest.html>.

¹³⁴ "Saudi Corruption Crackdown 'Ends with \$106bn Recovered,'" *Al Jazeera*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2019/1/31/saudi-arabia-corruption-crackdown-ends-with-106bn-recovered>.

Menteri Dalam Negeri, MBN bertugas untuk mengawasi keamanan internal dan operasi penegakan hukum di Arab Saudi, termasuk mengurus upaya-upaya kontra-terorisme. Dia memainkan peran penting dalam pemberantasan Al-Qaeda di Semenanjung Arab dan dikenal karena kerja samanya dengan agensi intelijen Amerika Serikat dalam pemberantasan terorisme. Di tahun 2015, MBN ditunjuk sebagai Pangeran Mahkota menggantikan Pangeran Mahkota Muqrin bin Abdulaziz Al Saud. Meski demikian, jabatan sebagai Pangeran Mahkota tersebut berumur pendek ketika dia digantikan oleh MBS pada tahun 2017. MBN kemudian menjadi tahanan rumah dan hingga saat ini lokasi dan statusnya tidak jelas. Meski telah diturunkan dari jabatannya, MBN merupakan tokoh yang dihormati di Arab Saudi lantaran kompetensi dan pengalamannya di pemerintahan. Karirnya di Kementerian Dalam Negeri dan perannya dalam perang melawan terorisme memberikan reputasi sebagai pejabat pemerintahan yang berkemampuan dan efektif. Meski MBS saat ini sudah mampu mengkonsolidasikan kekuasaan, namun suksesi pemilihan Raja di Arab Saudi memiliki aturan formal serta informal yang terikat dengan tradisi dan kebiasaan keluarga kerajaan. Mekanisme formal untuk menemukan penerus takhta adalah dengan prinsip seniorisme agnatik, yang berarti penerus takhta haruslah lelaki tertua di dalam keluarga kerajaan yang dianggap mampu memimpin. Proses ini diatur oleh Dewan Kesetiaan (*Allegiance Council* atau *Hayat Al-Bayah*), sebuah badan yang didirikan oleh Raja Abdullah pada tahun 2006 untuk mengatur pemilihan Raja dan Pangeran Mahkota.

Dewan ini terdiri dari 34 orang anggota senior keluarga kerajaan, yang saat ini diisi oleh: Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota MBS bin Salman Al Saud, Pangeran Abdulrahman bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Mishaal bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Faisal bin Turki bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Bandar bin Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Khalid bin Faisal bin Turki Al Saud, Pangeran Turki bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Talal bin Mansour bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Nawaf bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Ahmed bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Abdullah bin Musaed bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Khalid bin Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Khaled bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Bandar bin Khalid Al Saud, Pangeran Abdulaziz bin Majid bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Abdulaziz bin Salman Al Saud, Pangeran Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Mohammed bin Nawaf bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Badr bin Abdullah bin Mohammed Al Saud, Pangeran Fahd bin Turki bin Abdulaziz Al Saud (ditahan oleh MBS), Pangeran Saud bin Abdullah bin Thunayan Al Saud, Pangeran Salman bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Saud bin Abdulmohsen Al Saud, Pangeran Sultan bin Fahd bin Salman Al Saud, Pangeran Khalid bin Abdullah bin Saud Al Saud, Pangeran Abdulaziz bin Ahmed bin Abdulaziz Al Saud, Pangeran Abdulaziz bin Turki bin Talal Al Saud, Pangeran Mohammed bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, dan Pangeran Abdulaziz bin Fahd bin Abdulaziz Al Saud.

Meski demikian, proses aktual pemilihan Raja dipengaruhi oleh beberapa faktor informal, seperti: politik keluarga, relasi personal, dan dinamika kekuasaan dalam keluarga kerajaan. Dalam praktiknya, Raja memiliki diskresi signifikan dalam memilih penerusnya dan keputusan Raja dipengaruhi oleh preferensi personal dan hubungannya dengan kandidat potensial. Raja Salman, misalnya dua kali menunjuk Putra Mahkota. Di tahun 2015, Raja Salman menunjuk keponakannya, MBN, sebagai Putra Mahkota dan penerusnya. Namun, di tahun 2017, Raja Salman mencopot MBN dari posisi tersebut dan menggantikannya dengan anak ketiganya, yakni MBS.

Untuk variabel ini, skor yang diberikan adalah plus (+) karena arah kebijakan Arab Saudi di bawah kendali MBS sangat jelas. MBS menghendaki Arab Saudi menjadi negara yang modern dan maju. Hal tersebut akan semakin melemahkan posisi kelompok

ulama Wahabi dalam politik Arab Saudi. Salah satu narasumber menegaskan bahwa masyarakat Arab Saudi memberikan dukungan pada Visi Saudi 2030 tersebut terlepas dari bagaimana posisi mereka terhadap kepemimpinan MBS.¹³⁵ Meski penolakan tentu akan tetap ada, namun konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh MBS nampaknya sudah lebih dari cukup.

Arah Kebijakan Negara-Negara Besar

Konstelasi politik di kawasan Timur Tengah disebut sebagai sebuah *penetrated system* atau sistem yang terpenetrasi.¹³⁶ Hal ini menjelaskan bahwa stabilitas dan instabilitas di kawasan ini tidak pernah bisa dilepaskan dari keberadaan negara besar yang ada di luar kawasan. Hanya saja, eksistensi aktor eksternal tersebut ada karena tarikan dari aktor lokal kawasan. Artinya, ada kemitraan antara aktor lokal dan eksternal yang dibangun karena faktor kepentingan bersama.

Amerika Serikat di Timur Tengah (netral)

Salah satu negara besar yang memiliki peran dominan di kawasan Timur Tengah adalah Amerika Serikat. Pengaruh mereka di Timur Tengah berjalan seiring dengan Perang Dingin. Saat ini, Timur Tengah dianggap sebagai bagian penting dalam kebijakan pembendungan (*containment*) untuk mencegah perluasan pengaruh Uni Soviet. Beberapa negara di Timur Tengah, seperti Israel, Iran, Arab Saudi, berada dalam pengaruh mereka sementara beberapa lainnya seperti Mesir atau Suriah ada dalam pengaruh Uni Soviet. Pasca Perang Dingin, Haas menyebut kawasan Timur Tengah masuk ke fase *pax-Americana* dimana Amerika Serikat menjadi pengendali tunggal kawasan ini.¹³⁷ Dalam fase ini, nampak betul dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain Iran dan Suriah, negara-negara utama lain cenderung dekat dengan Amerika Serikat dan mendengarkan betul masukan mereka.

Peran Amerika Serikat di Timur Tengah nampak dalam upaya perdamaian Arab-Israel yang mereka mediasi, seperti Konferensi Madrid, Perjanjian Oslo, Perjanjian Wadi Araba, dan, meski gagal, upaya negosiasi damai antara Israel dengan Suriah. Salah satu yang menjadi fokus utama Amerika Serikat adalah perdamaian Palestina-Israel. Sejak Perjanjian Oslo, Amerika Serikat senantiasa menjadi sponsor utama negosiasi damai hingga mereka mengalami kegagalan di Camp David tahun 1999 dan Taba tahun 2000. Kritik terhadap kepemimpinan Presiden Bill Clinton saat itu adalah Amerika Serikat terlalu banyak menggelontorkan anggaran untuk upaya perdamaian yang tidak mencapai kata sepakat. Kritik tersebut membuat Presiden George W. Bush mengubah fokus kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Meski demikian, Presiden Bush tidak

¹³⁵ Wawancara dengan narasumber, 8 April 2023.

¹³⁶ Istilah sistem yang terpenetrasi ini diperkenalkan oleh Leon Carl Brown. Fred Halliday menilai kompetisi negara-negara besar di kawasan ini berlangsung lebih lama dibandingkan dengan kawasan-kawasan Dunia Ketiga lain. Hal ini tidak lepas dari faktor strategik kawasan Timur Tengah. Pada saat yang bersamaan, kawasan Timur Tengah memiliki fragmentasi politik yang sangat tinggi yang ditandai dengan banyaknya konflik antar-aktor lokal di kawasan ini, biasanya karena keterbatasan sumber daya. Aktor-aktor lokal tersebut kemudian membangun kerja sama dengan aktor-aktor global yang memiliki kepentingan strategik atas penguasaan kawasan ini dan menciptakan kawasan yang penuh dengan jalinan kepentingan di berbagai konflik yang oleh Saul Cohen disebut sebagai *shatterbelt*. Lihat Leon Carl Brown, *International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Games* (London: I.B. Tauris, 1984). Lihat juga Fred Halliday, "The Great Powers and the Middle East," *Middle East Report* 18, no. 151 (1988): 3-6. Lihat juga Saul Cohen, "Middle East Geopolitical Transformation: The Disappearance of a Shatterbelt," *Journal of Geography* 91, no. 1 (1992): 2-10.

¹³⁷ Richard N. Haass, "The New Middle East," *Foreign Affairs*, 1 November 2006, <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2006-11-01/new-middle-east>.

menggeser mandala utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari Timur Tengah ke wilayah lain. Presiden Bush mengedepankan kebijakan promosi demokrasi dalam *Greater Middle East Initiative*. Untuk memulai kebijakan tersebut, Presiden Bush menyoal Irak. Setelah berhasil menyingkirkan Saddam Husein dari kekuasaan, Amerika Serikat memulai proyek besar untuk mendemokratiskan Irak. Proyek tersebut memakan dana yang tidak sedikit dan tidak mampu menghasilkan Irak yang stabil.

Belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, Presiden Obama memutuskan untuk menggeser fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari Timur Tengah ke Asia Pasifik melalui Asia Pivot. Secara praktis, Obama melakukan pengurangan pengiriman pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama Irak. Pasukan Amerika Serikat sendiri mulai ada secara de facto di Timur Tengah sejak Perang Teluk tahun 1990. Pengurangan tersebut menjadi perhatian negara-negara Timur Tengah yang selama ini menggantungkan jaminan keamanan mereka pada Amerika Serikat, termasuk Arab Saudi. Meski sempat menambah jumlah pasukan di Irak, dengan harapan hal tersebut akan menjadi operasi stabilisasi Irak yang terakhir, namun penurunan terus dilakukan hingga Presiden Obama selesai berkuasa. Presiden Trump tidak mengubah kebijakan Presiden Obama dengan tetap tidak memberikan porsi dominan pada kawasan Timur Tengah. Meski demikian, Presiden Trump tetap menunjukkan komitmennya untuk melindungi Israel. Berbagai kebijakan yang diambil oleh Presiden Trump, seperti mendukung Yerusalem sebagai ibukota Israel, memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, menyepakati *Basic Law on Golan Heights*, hingga mengusulkan *Peace for Prosperity*, menunjukkan keberpihakan tersebut.

Hubungan Amerika Serikat dan Israel sendiri bisa ditelusuri dari sejak tahun 1960-an ketika Presiden John F. Kennedy berkuasa. Istilah *strategic partnership* digunakan untuk menggambarkan hubungan yang kedua negara tersebut. Hubungan tersebut kemudian berkembang dengan Israel menjadi negara penerima bantuan militer terbesar dari Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan keunggulan kualitatif (*qualitative edge*) dalam penjualan senjata ke negara-negara Arab. Prinsip tersebut membuat Amerika Serikat tidak bisa menjual sistem persenjataan terkini kepada negara-negara Arab karena dikhawatirkan akan digunakan melawan Israel yang bisa berarti menghilangkan keunggulan teknologi perang yang dimiliki oleh negara Yahudi tersebut. Normalisasi hubungan UEA dengan Israel salah satunya didorong oleh keinginan UEA mendapatkan persenjataan terkini dari Amerika Serikat. Dan untuk itu, mereka diberikan syarat untuk menjadi “kawan” Israel dengan membuka hubungan diplomatik.

Kedekatan antara Amerika Serikat dengan Israel tidak hanya ada di level resmi atau pemerintah-ke-pemerintah. Dalam tataran komunitas, keduanya juga dekat. Salah satunya dibangun oleh adanya lobi Israel di politik Amerika Serikat. Bukan rahasia jika lobi tersebut menggelontorkan dana demi menjamin pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan yang pro-Israel. Hal tersebut memunculkan kritik dari Walt dan Mearsheimer bahwa kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah tidak dibangun atas dasar kepentingan Amerika Serikat namun lebih merepresentasikan kepentingan Israel.¹³⁸ Meski kritik tersebut tidak terlalu tepat, namun hal tersebut dapat dilihat sebagai peringatan yang serius bagi kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Jika Israel merupakan aktor yang tidak tergantikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tidak demikian halnya dengan Arab Saudi. Hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat diawali dengan sektor minyak dan gas ketika perusahaan-perusahaan

¹³⁸ Stephen Walt dan John J. Mearsheimer, “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy,” *KSG Faculty Research Working Paper, Series RWP06-011 (SSRN Electronic Journal, Maret 2006): 9.*

minyak dan gas negara tersebut mulai melakukan eksplorasi di Arab Saudi. Salah satu yang mendorong kedekatan tersebut adalah Raja Faisal yang mendorong modernisasi sektor energi di Arab Saudi. Meski sempat bersitegang karena isu Palestina-Israel dan bahkan Arab Saudi sempat memimpin embargo minyak pada akhir tahun 1970-an, hubungan kedua negara tidak pernah benar-benar berada dalam titik nadir. Bahkan, di tahun 1990-an Arab Saudi mulai menerima pengiriman pasukan Amerika Serikat yang terlibat dalam perang melawan Saddam Husein.

Ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa Arab Saudi dan Amerika Serikat dapat berjalan beriringan. Pertama, Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan pada Arab Saudi, baik melalui keberadaan pasukan Amerika Serikat di Arab Saudi maupun penjualan senjata. Kedua, Amerika Serikat tidak pernah mendorong demokratisasi di Arab Saudi. Hubungan keduanya juga berlangsung dalam tataran akar rumput. Amerika Serikat merupakan salah satu negara tujuan utama warga Arab Saudi yang ingin menuntut ilmu.¹³⁹

Meski demikian, hubungan keduanya juga memiliki beberapa masalah. Pertama, dalam upaya kontra-teror, terdapat beberapa ketegangan yang bersumber pada ketidakpercayaan Amerika Serikat pada keseriusan Arab Saudi. Hal ini yang menjadi salah satu perhatian MBS ketika dia mulai menjadi Menteri Pertahanan hingga dia menjadi Putra Mahkota dan Perdana Menteri. Kedua, Amerika Serikat, terutama di masa Presiden Joe Biden, mempermasalahkan pelanggaran HAM di Arab Saudi serta keterlibatan MBS dalam pembunuhan Khashoggi.

Variabel ini tidak memperlihatkan gejala yang mengarah pada dukungan maupun hambatan dalam normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel. Ada beberapa hal yang sifatnya mendukung, dan dapat diberikan nilai plus (+), seperti komitmen Amerika Serikat pada Israel, namun ada juga yang sifatnya menghambat, sehingga dapat diberikan nilai minus (-), seperti berkurangnya fokus Amerika Serikat di Timur Tengah dan kritik yang kontinyu dari Amerika Serikat di bawah Presiden Biden kepada Arab Saudi maupun MBS. Masalahnya, tanpa adanya peran mediasi Amerika Serikat akan cenderung sulit bagi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel untuk terwujud. Satu hal yang konsisten dalam konteks ini adalah perhatian penuh Amerika Serikat pada kepentingan Israel dan saat ini Netanyahu menilai hubungan diplomatik dengan Arab Saudi adalah prioritas utama kebijakannya.

Cina di Timur Tengah (netral)

Negara besar lain yang juga memainkan peran di Timur Tengah adalah Cina. Peran Cina di Timur Tengah tidak pernah nampak dominan, apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Karena itu, keberhasilan Cina dalam menjembatani normalisasi hubungan diplomasi Arab Saudi dan Iran menjadi perhatian banyak pihak.

Hubungan antara Arab Saudi dan Cina baru mulai hangat tahun 1990 ketika mereka melakukan pengakuan kedaulatan. Namun, benih hubungan kedua negara sudah mulai tercipta sejak tahun 1980-an. Di tahun 1986, Arab Saudi melakukan pembelian senjata (misil balistik DF-3/CSS-2) dari Cina. Tahun 1999, setelah ada pengakuan kedaulatan, kedua negara bersepakat melakukan transaksi minyak dan gas. Sejak saat itu, hubungan kedua negara terfokus pada isu energi dan juga ekonomi. Proses tersebut terinstitusionalisasi dengan baik dalam berbagai kunjungan resmi, penandatanganan kesepakatan-kesepakatan resmi, hingga pembentukan lembaga yang mengatur hubungan energi dan ekonomi kedua negara.

¹³⁹ Wawancara dengan narasumber, 8 April 2023.

Dokumen tersebut menekankan pada persahabatan antara Cina dan negara-negara Arab yang sudah dimulai lebih dari 2000 tahun lalu melalui Jalur Sutra. Cina juga senantiasa bersikap tegas dalam mendukung gerakan kemerdekaan negara-negara Arab. China's Arab Policy menekankan pada empat isu besar, yaitu: politik, investasi dan perdagangan, sosial, dan hubungan antar-masyarakat. Di bidang politik, Cina menawarkan kerja sama dalam berbagai platform inter-governmental dengan tujuan membangun dialog strategis atau bahkan blok diplomatik bersama. Di bidang investasi dan perdagangan, Cina menawarkan skema kerja sama "1+2+3" untuk meningkatkan kerja sama pragmatis dengan membawa kerja sama energi sebagai pusat, konstruksi infrastruktur dan perdagangan investasi sebagai dua sayap, serta teknologi nuklir dan satelit sebagai tiga terobosan. Cina bersedia untuk berinvestasi pada sektor-sektor krusial yang selama ini tidak mendapat porsi di negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi (sektor-sektor non-minyak dan gas). Di bidang sosial, kerja sama di bidang kesehatan menjadi fokus utama selain pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu narasumber menekankan betul bagaimana Cina menjadi salah satu tujuan utama pendidikan tingkat lanjut dari Arab Saudi.¹⁴⁰ Terakhir, dalam bidang budaya serta hubungan antar-masyarakat, Cina juga mendorong adanya penyebaran bahasa Mandarin di negara-negara Arab dan meningkatkan arus turisme. Meski tidak menjadi fokus, Cina tetap menawarkan kerja sama militer dan keamanan dengan negara-negara Arab. Hanya saja, fokus utama lebih diberikan pada penjualan senjata dan kerja sama anti-teror.

Sikap dan perilaku Cina tersebut menumbuhkan kedekatan yang mapan antara Arab Saudi dan Cina. Dalam pertemuan HLJC kedua di Riyadh tahun 2017 kedua negara menandatangani *Joint Investment Fund (JIF)* yang akan digunakan untuk mengembangkan proyek yang berkaitan dengan *Belt & Road Initiative* dan *Saudi Vision 2030*. Di tahun tersebut, kedua negara juga menandatangani kesepakatan untuk mendorong implementasi DSR, meliputi: layanan satelit, keamanan elektronik, konten digital, *cloud computing*, pengembangan SDM, dan, tidak ketinggalan, pembahasan mengenai pembangunan Neom (kota masa depan Saudi). Di bidang teknologi, keduanya juga sepakat untuk melakukan eksplorasi sumber daya uranium dan *thorium* dan pengembangan reaktor nuklir untuk proyek desalinasi air.

Cina tidak hanya melakukan pendekatan dengan Arab Saudi namun juga dengan Iran. Sama seperti dengan Arab Saudi, hubungan Cina dengan Iran juga memiliki sejarah panjang. Di era modern, hubungan diplomatik hubungan diplomatik Cina dan Iran pertama kali disahkan tahun 1971. Selama periode 1971-1979, Cina melihat Iran sebagai kekuatan revolusioner dan mendukung partai komunis lokal. Dukungan ini menjadi ganjalan dalam hubungan kedua negara mengingat Iran saat itu dekat dengan Barat. Di tahun 1979, Cina berhenti mendukung partai komunis di Iran. Cina mengalihkan dukungan pada Iran di bawah rezim Islamis dan berusaha mendapatkan keuntungan dari isolasi rejim Khomeini. Iran yang mendapatkan embargo persenjataan dari Barat kemudian mencari suplai senjata dari negara-negara Asia, salah satunya dari Cina. Hubungan keduanya berkembang dari yang tadinya hanya sebagai penyuplai persenjataan, menjadi berfokus memastikan Cina mendapatkan sumber energi untuk perkembangan ekonominya di periode 1980-an. Cina bahkan juga membantu Iran membangun pusat penelitian reaktor nuklir. Mereka melihat hubungan dengan Iran sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruhnya dalam kawasan yang didominasi oleh Amerika Serikat.

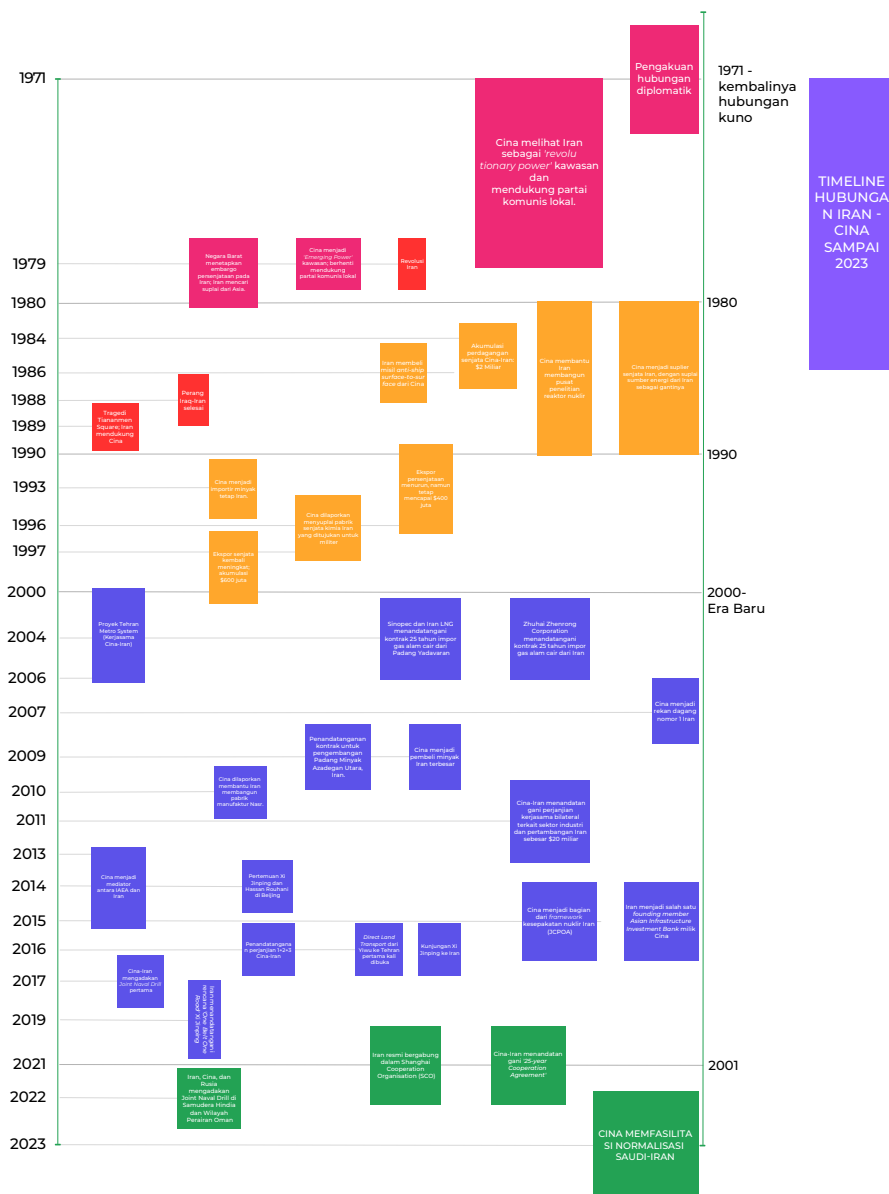
Meski demikian, sektor militer tetap menjadi prioritas utama hubungan kedua negara. Tahun 1986, misalnya, Iran membeli misil anti-kapal permukaan-ke-permukaan yang mendukung mereka untuk mampu menguasai Selat Hormuz beserta seluruh

¹⁴⁰ Wawancara dengan narasumber, 8 April 2023

perdagangan jalur laut dari dan menuju negara-negara Teluk. Kedekatan kedua negara juga nampak dari dukungan Iran terhadap sikap keras Cina dalam menekan gerakan pro-demokrasi dalam tragedi Tiananmen tahun 1989.

Di periode 1990-an, ekspor persenjataan Cina ke Iran mulai berkurang namun sejak tahun 1993 mereka menjadi importir minyak tetap Iran. Di periode 2000-an, isolasi Iran menjadi semakin meningkat seiring dengan krisis nuklir. Cina tetap setia dengan memberikan teknologi transportasi seperti mengerjakan proyek *Tehran Metro System* tahun 2000 hingga 2006. Di periode tersebut impor minyak dan gas Cina dari Iran tetap dominan. Pada bulan Maret 2004, misalnya, BUMN Cina, Zhuhai Zhenrong Corporation, menandatangani kontrak 25 tahun untuk mengimpor 110 juta metrik ton gas alam cair dari Iran. Pada bulan Oktober 2004, *China Petroleum & Chemical Corporation* (Sinopec) dan Iran LNG menandatangani kontrak 25 tahun untuk mengimpor gas alam cair dari Padang Yadavaran Iran sebesar 250 juta metrik ton. Akhirnya, tahun 2007 Cina menjadi mitra dagang terbesar Iran. Tahun 2009, mereka menjadi pembeli terbesar minyak dari Iran, mengalahkan Jepang.

Bagan 11. Lini Masa Hubungan Iran Dengan Cina



Di periode 2010-an, kedekatan Cina dengan Iran tetap berlanjut bahkan setelah Iran dijatuhi tambahan sanksi akibat pengembangan senjata nuklir. Cina dilaporkan membantu Iran membangun pabrik manufaktur Nasr dan menjadi mediator antara IAEA dengan Iran. Cina turut menjadi bagian dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) dan pada bulan Januari 2016, Presiden Xi berkunjung ke Iran sebagai upaya untuk mendorong niat baik politik dalam negosiasi nuklir.

Dari kedua lini masa tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan Cina di Timur Tengah lebih didorong oleh logika ekonomi daripada politik dan keamanan. Meski ada kerja sama politik dan keamanan, beberapa batasan membuat Cina tidak memberikan fokus pada kedua bidang tersebut. Dengan Arab Saudi, Cina tetap mempertimbangkan hubungan baik Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Penjualan senjata tetap ada namun tidak melibatkan sistem senjata utama. Dengan Iran, batasan dari Amerika Serikat juga menjadi ganjalan. Cina tidak secara terbuka membangun blok anti-Amerika Serikat meski secara politik Cina dan Iran memiliki posisi *anti-status quo*.

Ketika kemudian Cina berhasil memediasi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran apakah hal tersebut akan membawa implikasi dalam hubungan Arab Saudi dan Israel. Adanya persepsi ancaman yang sama memang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan hubungan Arab Saudi dan Cina. Dan Iran lah yang menjadi sumber ancaman tersebut. Meski demikian, pragmatisme juga menjadi dasar dalam hubungan Arab Saudi dan Israel, seperti dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Dengan demikian, pembukaan hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Iran tidak menjadi konsideran tunggal dalam proyeksi pembukaan hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Israel. Apalagi, hubungan kedua negara tersebut, Arab Saudi dan Iran, tidak dibangun dengan basis empirik yang kuat.

Hubungan antara Arab Saudi dan Iran lebih banyak ditandai dengan pola permusuhan daripada pola pertemanan. Berbagai insiden seperti Perang Irak-Iran atau pembentukan *Gulf Cooperation Council (GCC)* merupakan beberapa hal yang mengindikasikan permusuhan tersebut. Selain itu, keterlibatan Iran di beberapa negara Arab seperti di Lebanon, Afghanistan, Irak, Suriah, hingga Yaman juga mengindikasikan permusuhan tersebut. Belum lagi insiden-insiden haji yang beberapa berlangsung hanya menambah luka diantara kedua negara.

Catatan pertemanan kedua negara sebenarnya ada beberapa. Tahun 1997, misalnya, Presiden Mohammad Khatami mendorong kerja sama Arab Saudi dan Iran dalam bidang pemberantasan narkoba dan penyelundupan. Ketika harga minyak jatuh di akhir 1990-an, kedua negara sama-sama berkomitmen memangkas produksi yang kemudian mampu meningkatkan harga minyak. Namun, di era Presiden Mahmoud Ahmadinejad, catatan pertemanan tersebut menghilang. Pengembangan senjata nuklir Iran juga membuat Arab Saudi bereaksi keras dan mereka bahkan mendukung keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA.

Dari catatan tersebut, nampak bahwa hubungan antara Arab Saudi dan Iran lebih disebabkan oleh tekanan yang diberikan atau keuntungan yang didapatkan dari Cina. Tidak seperti hubungan Arab Saudi dan Israel yang prosesnya mengalami peningkatan setahap demi setahap, hubungan Arab Saudi dan Iran tidak dibangun dari pondasi yang stabil. Selain itu, Cina tidak nampak menjadi penghambat dalam upaya mediasi Amerika Serikat dalam hubungan Arab Saudi dan Israel atau dalam hubungan Arab Saudi dan Israel itu sendiri. Dengan demikian, faktor ini tidak berkontribusi negatif dalam proyeksi hubungan Arab Saudi dengan Israel.

Dengan demikian, variabel ini diberikan skor netral mengingat masih ada pro dan kontra dalam kebijakan Cina di Timur Tengah. Cina menunjukkan tanda-tanda semakin

aktif di kawasan Timur Tengah namun tidak terlalu nampak dalam bidang politik dan keamanan. Selain itu, normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran, meski tidak memiliki pondasi yang komprehensif dan berpotensi menghasilkan perdamaian dingin belaka, tentu menjadi pertimbangan Arab Saudi dalam mendorong percepatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Dampak normalisasi (+)

Dampak normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel bagi kedua negara hanya bisa diperkirakan dari potensi yang ada. Teknik pro/kontra digunakan untuk melakukan penilaian mengenai dampak tersebut dengan bersandar pada kondisi kedua negara.

Pertama, normalisasi hubungan diplomatik tersebut akan membutuhkan peran Amerika Serikat. Dengan demikian, Arab Saudi bisa mendapatkan keuntungan dalam hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Apalagi, normalisasi hubungan diplomatik mereka dengan Iran yang dimediasi oleh Cina membuat posisi tawar mereka terhadap Amerika Serikat pun menjadi meningkat. Terakhir, laporan media menyebutkan bahwa Arab Saudi menginginkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat kembali diberikan¹⁴¹ dan mereka diberikan akses pada pengembangan teknologi nuklir.¹⁴² Meski Presiden Biden mampu mengabulkan kedua permintaan tersebut, dia tetap membutuhkan persetujuan Kongres baik untuk pengiriman pasukan, penjualan senjata, maupun transfer teknologi nuklir. Permintaan tersebut sendiri konsisten dengan rencana MBS untuk mereformasi Arab Saudi. Teknologi nuklir merupakan salah satu indikator bagi modernitas yang menjadi kata kunci *Saudi Vision 2030*.

Kedua, bagi Netanyahu, normalisasi jelas akan memberikan posisi politik yang kuat bagi eksistensi Israel. Efek bola salju dari pengakuan Arab Saudi terhadap kedaulatan Arab Saudi akan mendorong negara-negara Islam dan Arab lain untuk melakukan hal serupa. Dalam kasus Oman, misalnya, sikap Arab Saudi menjadi petunjuk kunci.

Di sisi lain, normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel meski tidak akan menurunkan legitimasi MBS bisa jadi tidak cukup penting untuk dilakukan. Salah satu narasumber menilai bahwa Arab Saudi tidak benar-benar membutuhkan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.¹⁴³ Meski bisa jadi ada keuntungan ekonomi dari normalisasi tersebut namun angkanya masih diperdebatkan. Menurunnya ancaman dari Iran karena normalisasi hubungan diplomatik yang mereka lakukan juga membuat normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel menjadi tidak terlalu mendesak. Dalam logika tersebut, tidak mengherankan jika MBS memberikan harga yang tinggi terhadap Amerika Serikat.

Suara kontra di Israel sendiri tidak terlalu nampak mengingat isu ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting saat ini. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dampak positif yang didapatkan kedua pihak manakala normalisasi hubungan diplomatik benar-benar dibuka membuat variabel ini bisa diberikan skor plus (+).

¹⁴¹ Kevin Liptak, "Saudi Arabia Looks for Security Assurances from Us as Condition for Normalizing Ties with Israel," *CNN*, 10 Maret 2023, <https://edition.cnn.com/2023/03/10/middleeast/saudi-israel-normalization-conditions-intl/index.html>.

¹⁴² Michael Crowley, Vivian Nereim, and Patrick Kingsley, "Saudi Arabia Offers Its Price to Normalize Relations with Israel," *The New York Times*, 10 Maret 2023, <https://www.nytimes.com/2023/03/09/us/politics/saudi-arabia-israel-united-states.html>.

¹⁴³ Wawancara dengan narasumber, 11 April 2023.

Dari keseluruhan variabel tersebut nampak bahwa skor plus (+) ada dalam variabel pola normalisasi, kondisi domestik Arab Saudi, dan dampak normalisasi. Untuk variabel kondisi domestik Israel, kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, serta kebijakan Cina di Timur Tengah cenderung netral. Dengan tidak adanya penolakan yang serius di Arab Saudi, Israel, Amerika Serikat, maupun Cina, proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel mengarah pada kemungkinan positif. Hanya saja, situasi di Israel saat ini, dengan kuatnya pemerintahan sayap kanan-religius yang cenderung keras terhadap Palestina menjadi problem tersendiri. Selain itu, masih kuatnya posisi tawar Arab Saudi terhadap Amerika Serikat berpotensi membuat Presiden Biden sedikit ragu untuk memfasilitasi dialog Arab Saudi dengan Israel meski dia sendiri tidak melihat upaya mediasi sebagai hal yang harus ditolak. Jika dihitung dalam persentase sederhana, kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel berdasarkan kondisi saat ini hanyalah sekitar 80%. Mengingat Presiden Biden memerlukan waktu untuk menciptakan prakondisi untuk memenuhi keinginan Netanyahu dan harga yang diberikan oleh MBS maka normalisasi hubungan diplomatik tersebut sepertinya masih akan menunggu beberapa waktu.

Implikasi Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi-Israel terhadap Palestina dan Indonesia

Proyeksi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel tersebut, tentu membawa dampak bagi Palestina dan Indonesia. Bagian ini menjelaskan hal tersebut dengan asumsi bahwa normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel akan memperbesar ruang gerak Israel dalam konflik dengan Palestina. Asumsi ini mengikuti pengalaman UEA yang pada awalnya berargumen bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel akan membuat suara mereka dalam masalah Palestina didengarkan oleh Israel. Dalam kenyataannya, Israel tetap saja mengambil kebijakan sayap kanan bahkan pasca penandatanganan Perjanjian Abraham. Lebih jauh lagi, ketegangan di Palestina tentu membawa implikasi pada politik domestik di Indonesia mengingat isu Palestina merupakan salah satu isu yang memiliki ketertarikan cukup tinggi dengan politik elektoral di Indonesia.

Dampak bagi Palestina

Sebelum Perang Sipil Yaman tahun 1960-an, Arab Saudi bersikap tegas dengan memusuhi Israel. Dukungan penuh tersebut tidak hanya diberikan dalam retorika diplomatik, namun juga secara nyata dalam bentuk bantuan dana. Laporan Al Arabiya menyebut bahwa selama periode 2000 hingga 2018 Arab Saudi sudah menggelontorkan dana sebesar 6,4 milyar USD bagi Palestina, termasuk yang didistribusikan melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (*United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugee in the Near East* atau *UNRWA*).¹⁴⁴ Tahun 2019, dana bantuan Arab Saudi mencapai angka 174 juta USD meski di tahun berikutnya dipotong lebih dari 80% dan hanya tersisa 32,5 juta USD.¹⁴⁵

Selain bantuan dana secara resmi ke Palestina dan UNRWA, Arab Saudi juga menjadi negara pelindung beberapa kelompok Palestina. Meski sempat memburuk, hubungan Arab Saudi dengan Hamas kembali mengalami peningkatan dengan adanya rencana kunjungan Ismail Haniyeh ke Riyadh untuk membahas pembebasan tokoh-tokoh Hamas yang ditangkap oleh otoritas Arab Saudi.¹⁴⁶ Hubungan keduanya memburuk tahun 2007 pasca kegagalan pembentukan kabinet bersama antara Hamas dan Fatah.¹⁴⁷ Hal tersebut membuat Hamas menjadi penguasa *de facto* di Gaza sementara Tepi Barat ada dalam kendali Fatah. Arab Saudi menilai hal tersebut melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina. Sejak saat itu, Arab Saudi mulai menangkap tokoh-tokoh Islam yang bermukim di Arab Saudi dan memiliki kedekatan dengan Hamas.¹⁴⁸ Perbaikan

¹⁴⁴ "Saudi Arabia among Top Aid Providers for Palestinians, Nearly \$1 Mln per Day," *Al Arabiya English*, 15 Agustus 2020, <https://english.alarabiya.net/News/gulf/2020/08/15/Saudi-Arabia-remains-top-aid-provider-for-Palestinians-nearly-1-mln-per-day>.

¹⁴⁵ Mohammad Farid Mahmoud Abdullah and Zeynep Tufekci Gulay, "Palestinian Funding from Arab States down 85% in 2020," *Anadolu Ajansi*, 3 Maret 2021, <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestinian-funding-from-arab-states-down-85-in-2020/2163509>.

¹⁴⁶ "Saudi Arabia to Host First Hamas Delegation in over a Decade," *Middle East Eye*, 16 April 2023, <https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-host-hamas-delegation-first-over-decade>.

¹⁴⁷ Arab Saudi menjadi mediator dalam negosiasi pembentukan kabinet bersama tersebut sehingga tidak mengherankan jika mereka kecewa dengan kegagalan negosiasi. Paul Aarts, "Saudi Arabia Walks the Tightrope," *The International Spectator* 42, no. 4 (2007): 545-550.

¹⁴⁸ Perlu diingat bahwa induk Hamas adalah Ikhwanul Muslimin di Palestina dimana kelompok Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan.

hubungan tersebut sendiri didorong oleh normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran. Selama ini, Iran lah yang memainkan peran sebagai pelindung Hamas.

Pertanyaan utama dalam menilai dampak normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel adalah sejauh mana hal tersebut akan memojokkan Palestina. Ulrichsen menilai bahwa langkah tersebut akan membuat Palestina semakin ditinggalkan¹⁴⁹. Tambahan satu negara Arab yang memutuskan berdamai dengan Israel akan membuat perjuangan kemerdekaan Palestina semakin sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan negara-negara Arab terhadap Palestina nampak semakin berkurang. Hal tersebut berbeda dengan dukungan Indonesia kepada Palestina yang cenderung menunjukkan peningkatan.

Bagan 12. Dukungan Terhadap Palestina



Lebih lanjut, perjuangan kemerdekaan Palestina membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Saat ini, perjuangan kemerdekaan Palestina dijalankan melalui tiga cara sekaligus. Pertama, cara kekerasan didominasi oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina (JIP) meski kelompok-kelompok seperti Brigade al-Aqsa yang dekat dengan Fatah juga menggunakan cara tersebut. Hamas dan JIP merupakan dua kelompok yang sejak awal kelahirannya memilih cara kekerasan. JIP sendiri lahir sebagai bentuk ketidakpuasan atas Hamas yang dianggap mulai melunak *vis-à-vis Israel*. Keikutsertaan dalam pemilihan umum ataupun kesediaan mereka untuk melakukan gencatan senjata dengan Israel dianggap sebagai gejala melunaknya sikap Hamas tersebut.¹⁵⁰ Brigade al-Aqsa tumbuh dari intifada kedua tahun 2000. Saat itu, provokasi Sharon dengan mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa memunculkan respon penolakan dari Palestina yang kemudian berkembang menjadi bentrokan terbuka dan bersenjata. Fatah dan PLO yang terikat kesepakatan dengan Israel, yang salah satunya mensyaratkan mereka untuk meninggalkan kekerasan melawan Israel, membuat kedua kelompok tersebut tumpul menghadapi provokasi tersebut. Beberapa kelompok muda di Fatah dan PLO kemudian membentuk kelompok baru yang menggunakan kekerasan dalam melawan Israel. Kelompok tersebut adalah Brigade al-Aqsa.

¹⁴⁹ Kristian Coates Ulrichsen, "Palestinians Sidelined in Saudi-Emirati Rapprochement with Israel," *Journal of Palestine Studies* 47, no. 4 (2018): 79-89.

¹⁵⁰ Lihat misalnya Jeroen Gunning, "Peace with Hamas? The Transforming Potential of Political Participation," *International Affairs* 80, no. 4 (2004): 233-255; Jeroen Gunning, *Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence* (London: Hurst & Company, 2007).

Langkah kedua adalah melalui PBB. Status Palestina di PBB saat ini adalah “*non-member observer state*”. Status tersebut disahkan setelah mendapat persetujuan Majelis Umum PBB tahun 2012. Sejak saat itu Palestina aktif mendaftar sebagai anggota di organ-organ PBB. Meski demikian, DK PBB belum memberikan persetujuan atas keinginan Palestina menjadi anggota penuh PBB. Sebanyak 72% negara sebenarnya telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi negara Palestina dan hanya 28% yang tidak memberikan pengakuan tersebut. Hanya saja, diantara negara-negara yang menolak tersebut adalah negara-negara besar anggota tetap DK PBB seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

Selain melalui PBB, upaya non-kekerasan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina juga dilakukan melalui negosiasi. Diawali dari Perjanjian Oslo, proses negosiasi ini mengalami jalan buntu pasca kegagalan perundingan Camp David tahun 1999 dan Taba tahun 2000. Pasca Taba, ada beberapa langkah mediasi yang dilakukan oleh Kelompok Kuartet maupun Amerika Serikat namun selalu berakhir dengan kegagalan. Selain karena semakin kuatnya partai-partai sayap kanan dalam politik Israel, pertarungan politik internal antara Hamas dengan Fatah juga berkontribusi pada kegagalan tersebut. Alasan klasik yang selalu digunakan oleh Israel untuk menolak perundingan adalah ketidakmampuan Fatah dan PLO memberikan jaminan keamanan dari langkah Hamas menyerang Israel.

Lini masa perjuangan kemerdekaan Palestina sejak awal mereka menolak Resolusi MU PBB 181 mengenai rencana pemisahan Palestina pada tahun 1947 dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu tahun setelah penolakan tersebut, eskalasi konflik semakin meningkat dan menjadi Perang Arab-Israel yang melibatkan Arab Saudi, Lebanon, Suriah, Yordania, Irak, dan Mesir melawan Israel. Perang yang terjadi pada tahun 1948 ini menghasilkan beberapa peristiwa penting, yaitu pembentukan Israel sebagai negara yang langsung mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, keluarnya Resolusi PBB 194 terkait kepastian kepulangan para pengungsi Palestina serta menjadi dasar pembentukan UNRWA, dan penandatanganan gecatan senjata antara Israel dengan Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir pada tahun 1949.¹⁵¹ Keterlibatan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi dalam perang tersebut memperlihatkan adanya upaya besar dari negara-negara Arab untuk mendukung Palestina. Karakter utama dari perang tersebut adalah perang antar-negara yang melibatkan Israel dan negara-negara Arab. Palestina sendiri belum berstatus sebagai negara. Dua faksi politik utama Palestina baru lahir satu dekade kemudian. Fatah didirikan tahun 1959¹⁵² sedangkan PLO didirikan tahun 1964.¹⁵³ Kedua faksi ini kemudian akan menjadi faksi politik yang dominan dalam konteks politik Palestina.

Wilayah Palestina semakin terpojok dengan adanya okupasi Israel di wilayah Tepi Barat dan Gaza dalam Perang Enam Hari tahun 1967.¹⁵⁴ Perang yang melibatkan Mesir, Arab Saudi, Suriah, Yordania, dan Irak melawan Israel ini membuat Gaza, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai berada dibawah okupasi Israel.¹⁵⁵

¹⁵¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Treaty of Peace between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan,” *UN Peace Maker*, 1994, https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20JO_941026_PeaceTreatyIsraelJordan.pdf.

¹⁵² S. Shamir Hassan, “Al-Fatah – A Study of Ideological Evolution,” *Proceedings of the Indian History Congress* 61, (2000).

¹⁵³ Rashid Hamid, “What is the PLO?,” *Journal of Palestine Studies* 4, no. 4 (1975).

¹⁵⁴ Sebelumnya, wilayah Tepi Barat dikuasai oleh Yordania dan wilayah Gaza dikuasai oleh Mesir.

¹⁵⁵ “The 1967 Arab-Israeli War,” *Office of the Historian, Department of State United States of America*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://history.state.gov/milestones/1961-1968/arab-israeli-war-1967>.

Sebagai respons, DK PBB meloloskan resolusi 242 yang memerintahkan Israel untuk menghentikan okupasi dan meninggalkan seluruh wilayah yang mereka kuasai, termasuk Tepi Barat dan Gaza. Tuntutan PBB ini diabaikan oleh Israel. Israel terus menyoal gerilyawan PLO dan bahkan terlibat dalam tragedi "Black September" di Yordania tahun 1970.¹⁵⁶ Kemudian, Perang Yom Kippur pecah pada tahun 1973 dan DK PBB sekali lagi merespons, dengan meloloskan resolusi 338 yang menuntut Israel untuk mundur dan meninggalkan daerah yang berada di bawah okupasinya. Meski begitu, baku tembak dan pertempuran tetap terjadi bahkan beberapa hari setelah resolusi tersebut dirilis dan mendorong DK PBB memikirkan resolusi pelengkap.¹⁵⁷

Setahun setelahnya, Liga Arab secara resmi mengakui PLO sebagai satu-satunya representatif masyarakat Palestina yang sah.

Pada tahun 1982, Israel melakukan invasi terhadap Lebanon untuk menyerang PLO. Pertempuran besar kembali terjadi pada tahun 1987 saat barisan Jihad Islam Palestina melakukan perlawanan terhadap Israel dalam intifada. Kejadian ini juga menjadi penanda berdirinya Hamas yang merupakan salah satu faksi politik penting Palestina hingga saat ini.¹⁵⁸ Tahun berikutnya, PLO memutuskan untuk menerima resolusi PBB 242 dan 338 yang tanpa secara mendasar memberikan pengakuan terhadap Israel.¹⁵⁹

Sepanjang tahun 1990-an, terdapat beberapa usaha multilateral yang dilakukan, namun tidak ada yang membuat keadaan Palestina dekat dengan pembentukan negara. Salah satunya adalah Konferensi Madrid yang berakhir tanpa keputusan.¹⁶⁰ Ada pula beberapa kesepakatan bilateral antara PLO dan Israel, seperti: Perjanjian Oslo tahun 1993, Perjanjian Oslo II tahun 1995, dan Perjanjian Hebron tahun 1997 yang mengatur penarikan Israel dari Hebron.¹⁶¹ Status final tidak kunjung dicapai hingga perundingan Camp David 2 dilaksanakan tahun 1999.¹⁶²

Memasuki tahun 2000 dan seterusnya, hubungan keduanya diwarnai dengan pertempuran berskala besar saat Israel melakukan okupasi kota-kota di Tepi Barat dalam konteks intifada kedua.¹⁶³ Sebagai respons terhadap intifada kedua ini, API diinisiasikan oleh Liga Arab untuk mendorong perdamaian kawasan dengan menjunjung prinsip bahwa solusi militer tidak akan membawa perdamaian dan keamanan bagi pihak yang terlibat. Pada tahun 2004, Presiden Yasser Arafat meninggal yang menimbulkan ketidakpastian

¹⁵⁶ John B. Wolf, "Black September: Militant Palestinianism," *Current History* 64, (1973).

¹⁵⁷ "The 1967 Arab-Israeli War," *Office of the Historian, Department of State United States of America*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://history.state.gov/milestones/1961-1968/arab-israeli-war-1967>.

¹⁵⁸ Erika G. Alin, "Review: Dynamics of the Palestinian Uprising: An Assessment of Causes, Character, and Consequences," *Comparative Politics* 26, no. 4 (1994).

¹⁵⁹ Robbie Sabble, "UN Security Council Resolution 242," dalam *International Law and the Arab-Israeli Conflict* (Cambridge University Press, 2022).

¹⁶⁰ "The Madrid Conference 1991," *Office of the Historian, Department of State United States of America*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://history.state.gov/milestones/1989-1992/madrid-conference>.

¹⁶¹ "The Oslo Accords and the Arab-Israeli Peace Process," *Office of the Historian, Department of State United States of America*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://history.state.gov/milestones/1993-2000/oslo>.

¹⁶² Ian S. Lustick, "Camp David II: the Best Failure and its Lessons," *Israel Studies Bulletin* 16, no. 2 (2001).

¹⁶³ Nada Matta dan Rene Rojas, "The Second Intifada," *European Journal of Sociology* 57, no. 1 (2016).

politik di Palestina. Perang kembali pecah pada tahun 2006 saat Israel melakukan invasi ke Lebanon. Perang yang terjadi selama 34 hari ini membawa kesan tersendiri bagi Israel yang tidak memperkirakan perlawanan yang kuat dari Hezbollah.¹⁶⁴ Keberhasilan Hezbollah tersebut memberi kekuatan bagi kelompok-kelompok Palestina dalam melawan Israel. Dalam beberapa pertempuran berskala besar, seperti: penyerangan Gaza dalam "Operation Cast Lead" tahun 2008, "Operation Pillar of Defense" tahun 2012, dan "Operation Protective Edge" tahun 2014, Israel tetap tidak mampu menghancurkan kelompok-kelompok Palestina yang mengangkat senjata seperti Hamas, JIP, maupun Brigade al-Aqsa. Selain perang besar, ada juga pertempuran-pertempuran dengan skala yang lebih kecil seperti dalam "Knife Intifada", yang merupakan serangkaian serangan penusukan di Yerusalem yang berlangsung dari tahun 2015 hingga 2016.¹⁶⁵

Pertempuran kembali terjadi pada tahun 2021 saat tentara Israel menyerang Al-Aqsa yang dibalas dengan serangan roket dari Hamas. Tindakan ini menciptakan siklus kekerasan dan merupakan model normal dalam hubungan Israel dengan Palestina. Pertempuran ini disebut sebagai "11 Days Conflict". Sebagai respons, DK PBB melakukan rapat darurat untuk mengutuk tindakan Israel yang menyerang bangunan Masjid Al-Aqsa dan menuntut Israel untuk berhenti dengan mengacu pada Resolusi 242, 383, 2334, serta API.¹⁶⁶ Tidak hanya Hamas, Israel juga memiliki pertempuran dengan kelompok JIP dengan melancarkan serangan udara ke Gaza sebagai *pre-emptive strike* pada tahun 2022.¹⁶⁷

Berdasarkan lini masa tersebut, dapat dilihat posisi politik faksi-faksi Palestina. Mengacu pada Bagan 13, normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Israel sebenarnya tidak akan mengubah secara drastis posisi Palestina. Mereka memang akan terpinggirkan dalam arti dukungan politik dari negara-negara Arab akan mulai berkurang. Namun, di sisi lain, upaya multilateral Palestina melalui PBB tetap berlangsung. Kekhawatiran utama bahwa Palestina akan terpinggirkan dan berkurang dukungan politiknya tidak seutuhnya terbukti. Hanya saja, berkurangnya dukungan finansial akan memberi dampak yang kurang baik, apalagi komitmen dari negara-negara Arab secara keseluruhan juga berkurang.

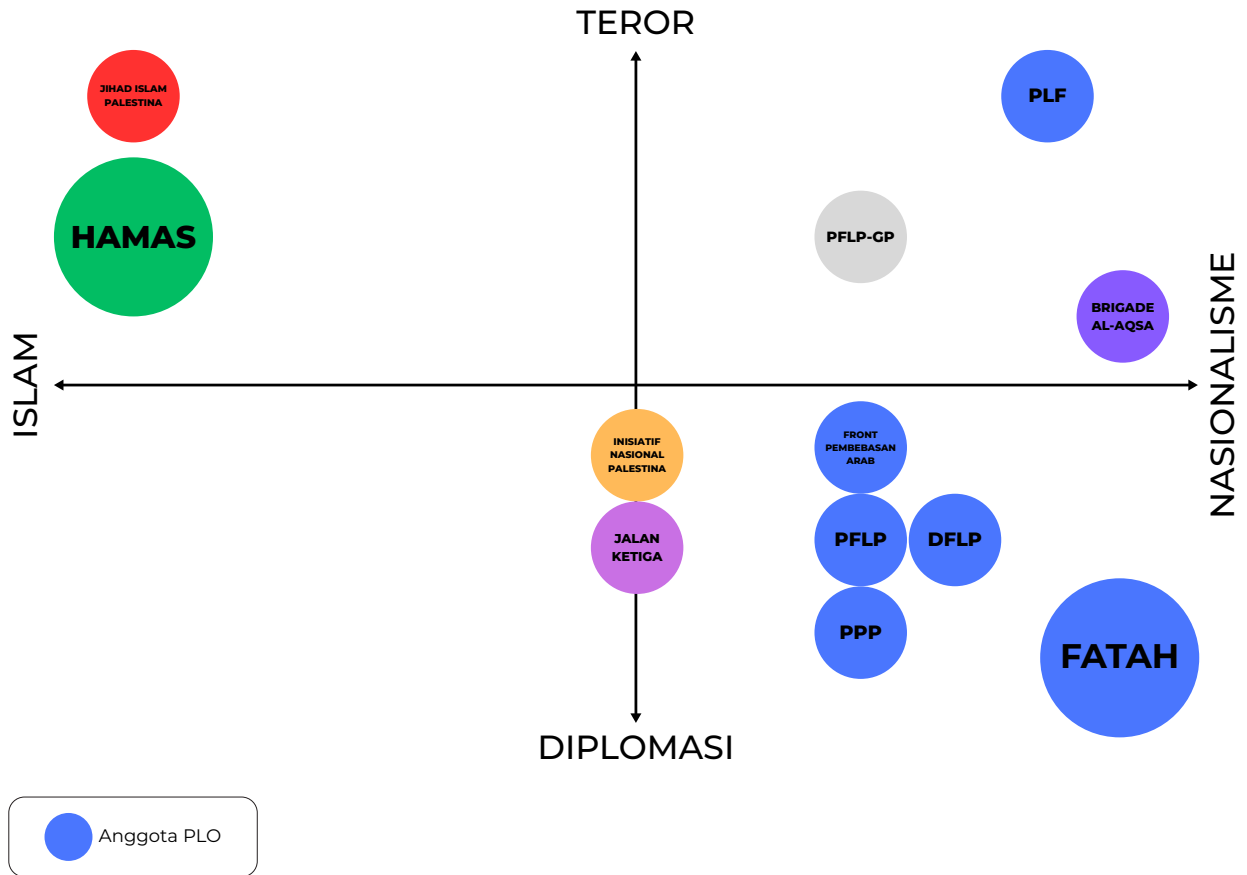
¹⁶⁴ Hussain Nazir, "The Israel-Lebanon War and Its Implications for Regional Security," *Policy Perspectives* 4, no. 1 (2007): 17.

¹⁶⁵ Jeffrey Goldberg, "The Paranoid, Supremacist Roots of the Stabbing Intifada," *The Atlantic*, 16 Oktober 2015, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/the-roots-of-the-palestinian-uprising-against-israel/410944/>.

¹⁶⁶ "Ceasefire Between Israel, Palestinian Militants 'Fragile', Middle East Coordinator Tells Security Council, Urging All Parties to Uphold Truce, Safeguard Past Gains," *United Nations Meetings Coverage and Press Releases*, 8 Agustus 2022, <https://press.un.org/en/2022/sc14994.doc.htm>.

¹⁶⁷ Maram Humaid, "Israel hits Gaza with air attacks as tensions escalate," *Al Jazeera*, 5 Agustus 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/5/israel-hits-gaza-with-air-strikes-as-tensions-escalate>.

Bagan 13. Pemetaan Kelompok Politik Palestina



Dampak bagi Indonesia

Hubungan Indonesia dengan Palestina memiliki sejarah yang cukup panjang. Keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina termanifestasikan dalam beberapa momentum dukungan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung Palestina. Pertama, solidaritas Muslim. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Konflik Palestina-Israel dianggap sebagai salah satu konflik terpenting dalam konteks umat Muslim dan dukungan untuk Palestina merupakan bagian dari tanggung jawab agama dan persaudaraan Islam. Kedua, perjuangan kemerdekaan. Sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajah memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya HAM dan kemerdekaan suatu bangsa. Oleh karena itu, secara moral dan politik Indonesia mendukung Palestina. Ketiga, resolusi PBB. Indonesia mengikuti pandangan mayoritas negara-negara di dunia, termasuk resolusi PBB yang mendukung penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara, yaitu pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, berdampingan dengan negara Israel yang diakui secara internasional.

Meski demikian, solusi dua negara saat ini tidak lagi dilihat memungkinkan oleh beberapa pihak. Salah satu narasumber menyatakan bahwa gerakan solusi satu negara, meski belum ada definisi yang konvergen mengenai solusi satu negara ini, sudah mulai berkembang di Israel maupun Palestina.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Wawancara dengan narasumber, 11 April 2023.

Survei publik di Palestina maupun Israel juga memperlihatkan penurunan dukungan terhadap solusi dua negara. PSR mencatat penurunan dukungan tersebut dari 32% menjadi 27% dalam dua survei terakhir mereka sedangkan 74% menilai solusi dua negara tidak lagi memungkinkan akibat kebijakan-kebijakan Israel.¹⁶⁹ Kebijakan-kebijakan yang diambil koalisi sayap kanan-religijs di Israel dalam beberapa tahun terakhir benar-benar mengubah lanskap demografis dan geografis di Israel yang membuat adanya kondisi satu negara.¹⁷⁰

Terlepas dari perkembangan tersebut, Indonesia tetap dalam posisi menerima solusi dua negara sebagai basis penyelesaian masalah Palestina. Atas nama perjuangan melawan kolonialisme dan kesamaan nasib bangsa-bangsa di Asia dan Afrika tahun 1955 dalam Konferensi Asia-Afrika, Soekarno menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Soekarno mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Sikap politik Soekarno ini menjadi landasan dan pijakan utama sikap politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel. Dukungan itu dipertegas pada tahun 1984 ketika Arafat bertemu Soeharto di Istana Merdeka dan pada tahun 1988 Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikan di Aljazair pada tanggal 15 Oktober 1988. Upaya Indonesia untuk mendukung Palestina terus berlanjut, pada tahun 1989 Penandatanganan Komunique Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Kementerian Luar Negeri (Ali Alatas) dan Kementerian Luar Negeri Palestina (Farouq Kaddoumi) sekaligus pembukaan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid berdialog dengan Arafat dan Peres secara terpisah di Istana Negara. Dialog tersebut ditujukan untuk mendamaikan kedua negara. Di tahun 2012 Indonesia mendukung pengangkatan status Palestina di PBB dari yang semula berstatus entitas, menjadi non-member observer entity pada 29 November 2012. Penegasan dukungan terhadap Palestina kemudian dinyatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Palestina merupakan kepentingan pokok dalam kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2014. Pada tahun 2022, Indonesia menginisiasi pertemuan OKI di Jeddah untuk merespons kondisi mengkhawatirkan Al-Aqsa. Indonesia mengajak anggota OKI untuk menggunakan seluruh kanal untuk mendukung Palestina. Di tahun 2023 Joko Widodo menyatakan bahwa keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 di Indonesia tak terkait konsistensi politik Indonesia terhadap Palestina.

Gelombang penolakan masyarakat Indonesia atas kehadiran tim nasional Israel pada Piala Dunia U-20 di Indonesia akhirnya membuat FIFA memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023. Meskipun menuai pro dan kontra di dalam negeri, tapi hal ini setidaknya membuktikan bahwa posisi politik Indonesia yang tetap tidak mengakui Israel sekaligus mengulangi sikap politik yang pernah ditunjukkan Soekarno sebelumnya yang memerintahkan tim nasional Indonesia untuk menolak bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958.

Satu catatan dalam hubungan Indonesia dengan Palestina tersebut adalah adanya koneksi dengan Israel yang dilakukan secara diam-diam. Hal ini tidak hanya berlaku untuk hubungan ekonomi maupun pariwisata, namun juga di bidang intelijen. Bahkan, tiga narasumber menegaskan bahwa beberapa pertemuan tingkat Menteri pernah diadakan oleh kedua negara dalam rangka mencari solusi atas masalah Palestina. Sifat

¹⁶⁹ "Public Opinion Poll No (87)," *PCPSR*, 23 April 2023, <https://www.pcpsr.org/en/node/938>.

¹⁷⁰ Michael Barnett et al., "Israel's One-State Reality," *Foreign Affairs*, 14 April 2023, <https://www.foreignaffairs.com/middle-east/israel-palestine-one-state-solution>.

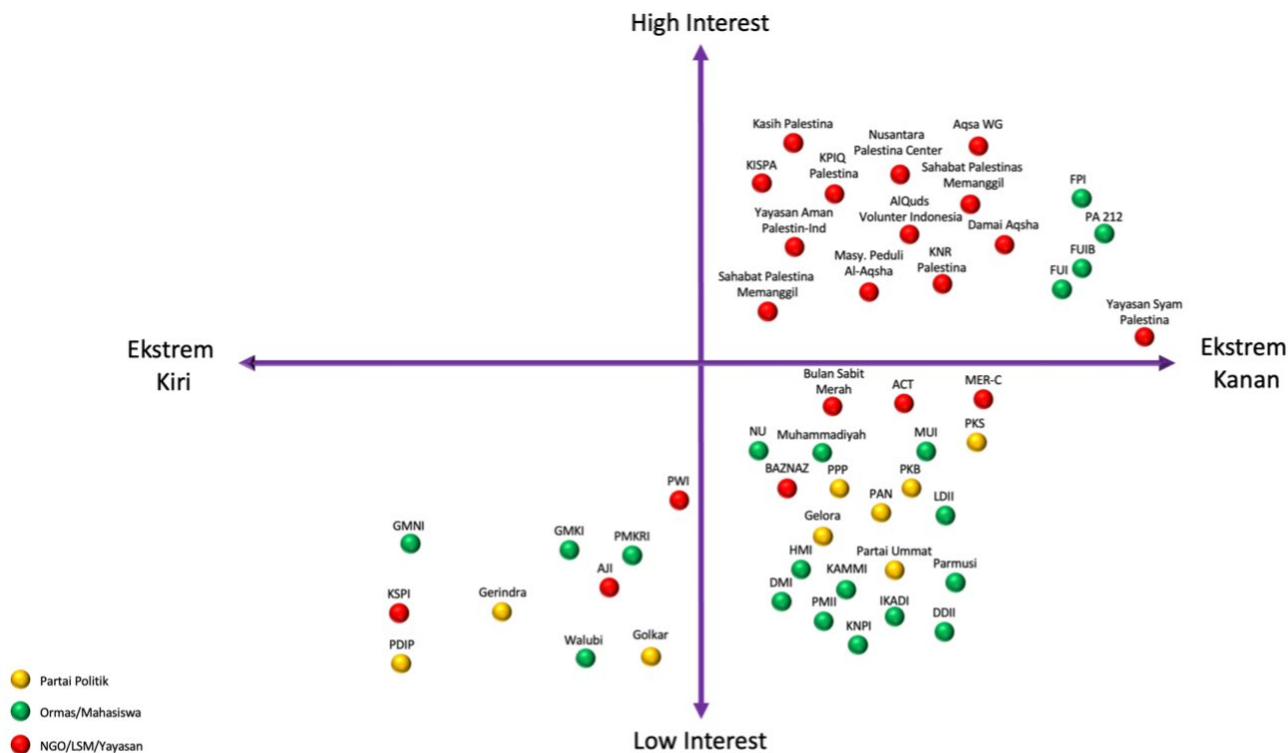
dari pertemuan tersebut yang rahasia membuat pemberitaan mengenai hal tersebut tidak muncul di publik.¹⁷¹

Sikap kelompok-kelompok Islam di Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah tidak selalu seragam. Meskipun mayoritas Muslim di Indonesia umumnya mendukung Palestina dan menyalahkan tindakan Israel, pendapat dan sikap ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman agama, politik, pengalaman pribadi, dan informasi yang diterima. Beberapa kelompok Islam di Indonesia menganggap konflik di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, sebagai perjuangan umat Islam melawan agresi dan pendudukan. Mereka melihat Israel sebagai penjajah dan penduduk asing yang tidak sah di wilayah Palestina. Kelompok-kelompok ini menyuarakan solidaritas dengan rakyat Palestina dan mendukung perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dan hak-hak mereka. Pada titik ini, isu agama dan solidaritas muslim menjadi variabel utama. Namun, ada juga kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang lebih moderat dan menganjurkan pendekatan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Mereka menekankan pentingnya negosiasi antara Israel dan Palestina serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Kelompok-kelompok ini berpendapat bahwa kedua belah pihak harus saling menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Beberapa figur seperti Gus Dur, Dahlan Iskan, Sandiaga Uno, Luhut Binsar Pandjaitan, Yahya Staquf, Bambang Brodjonegoro, Teten Masduki dan Yenny Wahid pernah mewacanakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dialog yang baik dan efektif hanya bisa terlaksana jika Indonesia dan Israel membuka hubungan diplomatik.

Dari berbagai spektrum ideologi politik kelompok, partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia hampir semuanya menyatakan dukungan terhadap Palestina. Akan tetapi, hampir tidak ditemukan organisasi yang memiliki agenda programatik terkait dukungan terhadap Palestina. Mayoritas organisasi hanya menggunakan simbol dan identitas Palestina yang sifatnya reaksioner, normatif dan pragmatis. Tidak sulit menemukan simbol atau bendera Palestina jika terjadi aksi-aksi demonstrasi kelompok kanan konservatif di Indonesia seperti FPI, HTI dan PA 212. Sikap paling umum dari kelompok atau ormas di Indonesia adalah reaksi dalam bentuk kecaman atau mengutuk jika terjadi insiden di Gaza, Al Aqsa atau tempat lainnya di Palestina. Meskipun begitu, tidak sedikit lembaga sosial Indonesia yang sampai saat ini aktif memberikan bantuan kemanusiaan di Palestina.

¹⁷¹ Wawancara dengan narasumber, 7 April 2023, 11 April 2023, 2 Mei 2023.

Bagan 14. Peta Kelompok Pendukung Palestina Di Indonesia



Dari paparan tersebut, nampak bahwa normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel akan membawa dampak bagi Palestina dan Indonesia. Dampak tersebut lebih terasa langsung bagi Palestina namun bagi Indonesia dampaknya lebih terlihat dari hasil kondisi di Palestina itu sendiri.

Saran Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, berikut adalah lima rekomendasi yang bisa diberikan pada pemerintah Indonesia.

Pertama, normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Israel akan membawa kemudahan posisi Indonesia dalam masalah Palestina. Konsistensi Indonesia dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan membuat kampanye mengenai hal tersebut lebih mudah dilakukan dengan membandingkannya dengan keputusan negara-negara Arab. Kampanye yang lebih terstruktur mengenai hal ini perlu dipertimbangkan dilakukan secara serius.

Kedua, normalisasi semacam itu akan menjadi justifikasi bagi kepemimpinan Netanyahu. Meski isu domestik tetap dominan dalam politik di Israel, keberhasilan mendapatkan dukungan Arab Saudi akan membuat Netanyahu lebih mudah dalam membangun kebijakan diskriminatif terhadap Palestina. Artinya, situasi buruk di Tepi Barat dan Gaza akan lebih mudah terjadi. Hal tersebut berpotensi menciptakan kegaduhan di Indonesia mengingat beberapa kelompok di Indonesia memiliki kebiasaan memanfaatkan gejolak di Palestina. Dalam kondisi menjelang pemilihan umum, penggunaan isu Palestina akan menjadi semakin besar kemungkinannya. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mendorong pengamatan yang lebih serius dalam masalah Palestina dan Israel dengan menugaskan individu atau tim khusus. Penugasan atau pembentukan tim khusus dalam penanganan masalah Palestina ini juga akan memberikan justifikasi ke publik bahwa pemerintah Indonesia memberikan dukungan pada Palestina.

Ketiga, implikasi global dari adanya normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel tidak terlalu besar. Penolakan dari negara-negara besar tidak akan dominan, termasuk dari Cina meski hal tersebut menunjukkan kembalinya peran Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal tersebut mengingat pendekatan Cina terhadap Timur Tengah lebih didorong oleh kepentingan ekonomi dan energi. Dengan demikian, tidak ada pertarungan yang antagonistik antara negara-negara besar, Amerika Serikat dan Cina, dalam langkah normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel. Kondisi tersebut membuat stabilitas dapat lebih terjaga dan Indonesia dapat lebih tenang dalam menentukan prioritas-prioritas globalnya.

Keempat, normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel akan mempengaruhi posisi politik Iran dan mitra-mitra aliansinya. Langkah tersebut tetap berpotensi mengubah arah kebijakan Iran dan meniadakan kembali “jaminan keamanan” Arab Saudi dari serangan Iran maupun sekutu-sekutunya. Hal ini akan menciptakan gangguan-gangguan dalam stabilitas di kawasan meski tidak memunculkan gejolak yang besar mengingat gangguan-gangguan tersebut bertolak belakang dengan kepentingan negara-negara besar yang menghendaki stabilitas. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia bisa mempersiapkan diri mengingat pendukung dari kelompok-kelompok mitra Iran tersebut di Indonesia relatif banyak.

Terakhir, normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel akan membawa dampak pada hubungan intra-Palestina. Meski kemungkinan mereka satu pendapat menantang langkah tersebut sangat besar, belum tentu mereka akan bersedia duduk bersama dalam satu kekuatan. Padahal, soliditas Palestina menjadi kunci dalam menghadapi Israel, termasuk sinkronisasi tiga langkah perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dapat mendorong dialog intra-Palestina yang lebih intens dan mendalam.

LAB 45 adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.lab45.id atau pindai kode QR.





 Jalan Mabes Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap,
DKI Jakarta 13890

 +62811452045

 lab45@lab45.id

 www.lab45.id

